

TESIS
LEGALITAS PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN RUMAH IBADAH NON
MUSLIM PERSPEKTIF 4 MADZHAB



OLEH
AHMAD HIDHIR ADIB
NIM. 220204210003

PROGRAM STUDI MAGISTER STUDI ISLAM
FAKULTAS PASCASARJANA
UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2024

TESIS

LEGALITAS PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN RUMAH IBADAH NON MUSLIM PERSPEKTIF 4 MADZHAB

Diajukan Kepada

Magister Studi Islam Fakultas Pascasarjana

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Magister (M.Ag)



OLEH

AHMAD HIDHIR ADIB

NIM. 220204210003

PROGRAM STUDI STUDI ISLAM

FAKULTAS PASCASARJANA

UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2024

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Ahmad Hidhir Adib

NIM : 220204210003

Program : Magister (S-2)

Institusi : Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Malang, 4 Mei 2024

Saya yang menyatakan



Ahmad Hidhir Adib

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN

Tesis dengan judul "Legalitas Pemberian Izin Pendirian Rumah Ibadah Non Muslim Perspektif 4 Madzhab" yang ditulis oleh Ahmad Hidhir Adib ini telah diperiksa dan disetujui pada tanggal 4 Mei 2024

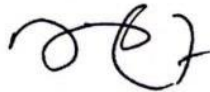
Oleh:

Dosen Pembimbing I



H. Mohammad Yahya, MA., Ph.D
NIP: 197406142008011016

Dosen Pembimbing II



Dr. Muhammad, Lc., M.Th.I
NIP: 198904082019031017

Mengetahui:
Ketua Program Studi



Dr. H. M. Lutfi Mustofa, M.Ag
NIP: 197307102000031002

LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGUJI

Tesis dengan judul **“Legalitas Pemberian Izin Pendirian Rumah Ibadah Non Muslim Perspektif 4 Madzhab”** ini telah diuji pada tanggal 1 Juli 2024 dan telah direvisi.

Dewan Penguji,



Dr. M. Fauzan Zenrif, M.Ag.
NIP: 196809062000031001

Penguji Utama



Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.
NIP: 197306031990031001

Ketua Penguji



Mohammad Yahya, M.A., Ph.D
NIP: 197406142008011016

Penguji



Dr. Muhammad, Lc., M.Th.I
NIP: 198904082019031017

Sekretaris

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana



Dr. D. Q. Anidmurni, M.Pd.
NIP: 196903032000031002

HALAMAN MOTTO

وَمِنْهَا إِعَانَةُ الْقُضَاةِ وَالْوُلَاةِ وَأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مَا تَوَلَّوْهُ مِنَ الْقِيَامِ بِتَحْصِيلِ الرَّشَادِ
وَدَفْعِ الْفَسَادِ وَحِفْظِ الْبِلَادِ وَتَجْنِيدِ الْأَجْنَادِ وَمَنْعِ الْمُفْسِدِينَ وَالْمُعَانِدِينَ

“(Kewajiban orang mukalaf) diantaranya adalah membantu para *Qādhī* (penegak hukum), pemimpin, dan imam umat Islam atas tugas yang telah diwajibkan atas mereka, meliputi tugas untuk memberikan pengarahan, menolak kerusakan, menjaga negara, merekrut pasukan keamanan, serta mencegah para perusak dan penghianat bangsa”.¹

الْفِقْهُ مَعْرِفَةُ النَّظَائِرِ

“Berfikih adalah seni untuk mengetahui kasus yang serupa”.²

¹ Izzuddin bin Abdis Salam, *Qawaid Al-Ahkam Fi Mashalih Al-Anam* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1991). Juz 1 H. 134

² Jalaluddin. Al-Suyuthi, *Al-Asybah Wa Al-Nadzair* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1993). H. 6

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ الْجَلِيِّ الْمُتَعَالِي، الَّذِي جَعَلَنَا مِنْ طُلَّابِ الْحَازِنِيِّ وَالْجَامِعَةِ وَالْمَعْمَدِ الْعَالِيِّ الْمَالِكِيِّ، حَتَّى نَتَشَرَّبَ
بُحُورَ عُلُومِ الْكِيَايِهِ عَبْدَ السَّلَامِ الْبُدُورَانِي، وَالْكُيَاهَاءِ وَالْمَشَايِخِ فِي الْمَالِكِيِّ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ
الَّذِي هُوَ أَفْضَلُ الرَّسُولِ وَالتَّيِّبِي، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ صَاحِبِ الْمَعَالِي. أَمَّا بَعْدُ.

Segala puji syukur tercurahkan kehadiran Allah Swt, atas segala nikmat, *taufiq* dan *'ināyah*-nya, sehingga tesis dengan judul “Legalitas Pemberian Izin Pendirian Rumah Ibadah Non Muslim Perspektif 4 Madzhab” bisa terselesaikan tanpa ada halangan apapun. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Saw, semoga kita semua diakui sebagai umatnya dan diberi nikmat berkumpul dengannya di akhirat kelak.

Tesis ini ini merupakan tugas akhir pribadi dalam menempuh jenjang pendidikan pasca sarjana di UIN Malang dengan konsentrasi Studi Islam. Selama proses pembelajaran sekaligus pengerjaan dan penyelesaian tesis, pribadi banyak dibantu oleh berbagai pihak. Untuk itu Peneliti bermaksud menyebutkan secara rinci dengan maksud penghormatan dan penghargaan kepada beliau-beliau diantaranya:

1. Kedua Orang Tua dan segenap keluarga besar dari arah *kulon*, *wetan*, *kidul* dan *lor*.
2. Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Dr. H. Zainuddin, MA, beserta jajaran Wakil Rektor, Senat, segenap pimpinan dan civitas akademika.
3. Direktur Pascasarjana, Prof. Dr. Wahid Murni, M.Pd, dan H. Basri Zein, P.hD selaku wakil Direktur.
4. Ketua Program Studi Magister Studi Islam, Dr. H. Lutfi Mustofa, M.Ag, dan Sekretaris Prodi, Dr. KH. Thoriquddin, Lc. Serta segenap dosen Studi Islam Pascasarjana UIN Malang.
5. Direktur Pusat Ma'had Al-Jami'ah dan Ma'had Al-Jami'ah Al-Aly, Dr. KH. Ahmad Izzuddin, M.Hi, beserta segenap pimpinan Ma'had.
6. Segenap Masyayikh Ma'had Aly UIN Malang, PP Al-Khoziny, PP Al-Asy'ary Al-Khoziny, LBM PCNU Kota Malang dan segenap keturunan biologis dan idiologis KHR. Khozin Khoiruddin Siwalan Panji.

7. Terkhusus kepada kedua pembimbing yang terhormat, H. Mokhammad Yahya, M.A., Ph.D dan Agus Dr. Muhammad, Lc., M.Th.I. Terima kasih atas segala bimbingan dan arahannya. Serta Ketua sidang dan Penguji utama seminar proposal dan ujian tesis.
8. Segenap keluarga besar LBM MJA, El-Mafakhir'20, ICP PAI H'19 dan M-SI'22. Terima kasih telah menjadi partner belajar selama ini, dan mohon maaf atas segala khilaf, salah dan perbuatan yang tak berkenan di hati semuanya.
9. Podo moro, Pujasera, Sam Suga, Cak Cul dan yang lainnya yang telah bersedia menjadi pelipur lapar. Serta Efbe, Ar-Riyash, JDFI Nashimus Sobah, Rodju Al-Syafa'ah yang telah setia membuat penulis fokus untuk berhadapan dengan laptop.
10. Terakhir, pribadi hendak *tafā'ulan* kepada bapak *mustahiq*, Dr. Nasrulloh, yang menuliskan kalimat berikut dalam pengantar tesisnya; "*Segenap mahasantri Ma'had Al-Jamiah Al-Aly yang senantiasa penulis harapkan menjadi santri hebat, teladan dan berkemajuan, dimana penulis banyak menimba pengalaman yang sangat luar biasa yang tidak akan pernah terbayarkan dengan apapun*", dan Ustadz M. Fashihuddin Husnan, M.H. Terima kasih banyak atas apapun itu ustadz.

Tidak ada kata yang pantas diucapkan kecuali Terima kasih dan Mohon Maaf. Semoga Allah Swt merahmati disebutkan di atas. Kendati telah berusaha semaksimal mungkin menganalisis, menelaah dan mengkomparasikan pandangan, pribadi menyadari bahwa apa yang ditulis ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya, meski penulisan Tesis ini telah rampung, kritik, saran dan koreksi tetap diterima, demi kesempurnaan kandungan tesis agar minim kesalahannya. Silahkan menyapa via email; rdhk6830@gmail.com

Malang, 4 Juli 2024

Ahmad Hidhir Adib
NIM. 220204210003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Indonesia Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah menggunakan model Library of Congress (LC) Amerika sebagai berikut:

A. Huruf

ا = a	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sh	ل = l
ث = th	ص = ṣ	م = m
ج = j	ض = ḍ	ن = n
ح = ḥ	ط = ṭ	و = w
خ = kh	ظ = z	ه = h
د = d	ع = ‘	ء = ,
ذ = dh	غ = gh	ي = y
ر = r	ف = f	

B. Vokal	Panjang	C.Vokal	Diftong
Vokal (a)	panjang= ā	او	= aw
Vokal (i)	panjang= ī	اى	= ay
Vokal (u)	panjang= ū	أو	= ū
		أى	= ī

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (*mad*), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū (أ، ا، و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti *lāyyinah*, *lawwāmah*. Kata yang berakhiran *etā’ marbūṭah* dan berfungsi sebagai *sifat* atau *muḍāf ilayh* ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai *muḍāf* ditransliterasikan dengan “at”.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL TESIS	I
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN.....	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN MOTTO.....	V
KATA PENGANTAR.....	VI
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	VIII
DAFTAR ISI	IX
DAFTAR TABEL	XI
ABSTRAK.....	XII
ABSTRACT	XIII
مستخلص البحث	XIV
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian	10
F. Definisi Istilah.....	12
G. Sistematika Penelitian	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
A. Tinjauan Pustaka	15
1. Regulasi Pendirian Rumah Ibadah	15
2. Konteks Rumah Ibadah	18
B. Perspektif Teori.....	21
1. Definisi dan Konsep teori.....	21
2. Legitimasi Teori	22
3. Operasional Teori	23
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Jenis Penelitian.....	26
B. Data dan Sumber Data	26
1. Madzhab Hanafi	27

2. Madzhab Maliki.....	28
3. Madzhab Syafi'i	29
4. Madzhab Hambali.....	30
C. Instrumen Penelitian.....	30
D. Teknik Pengumpulan Data.....	31
E. Pengecekan Keabsahan Data.....	31
F. Analisis Data	31
G. Prosedur Penelitian.....	32
BAB IV PEMBAHASAN	33
A. Persyaratan Pendirian Rumah Ibadah	33
1. Madzhab Hanafi	33
2. Madzhab Maliki.....	35
3. Madzhab Syafi'i	38
4. Madzhab Hambali.....	40
B. Tinjauan Terkait Formulasi Angka	43
C. Pemberian Izin Pendirian Rumah Ibadah Non Muslim	46
1. Madzhab Hanafi	46
2. Madzhab Maliki.....	53
3. Madzhab Syafi'i	56
4. Madzhab Hambali.....	59
D. Tinjauan Dalil Atas Kasus <i>i'ānah alā al-ma'siyāt</i>	61
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	70
LAMPIRAN DATA	XV
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	XL

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu	10
Tabel 2 Skema Teori <i>Ilhāq Al-Masāil bi Nazāirihā</i> atau <i>Ilhāq</i>	24
Tabel 3 Status Kenegaraan dan Implikasinya dalam Madzhab Hanafi.....	33
Tabel 4 Status Kenegaraan dan Implikasinya dalam Madzhab Maliki.....	36
Tabel 5 Status Kenegaraan dan Implikasinya dalam Madzhab Syafi'i.....	38
Tabel 6 Status Kenegaraan dan Implikasinya dalam Madzhab Hambali.....	41
Tabel 7 Contoh Kasus <i>I'ānah Alā Al-Ma'ṣiyāt</i> Dalam Madzhab Hanafi	46
Tabel 8 Klasifikasi <i>i'ānah alā al-ma'ṣiyāt</i> perspektif Ibnu 'Ābidīn.....	48
Tabel 9 Klasifikasi <i>i'ānah alā al-ma'ṣiyāt</i> perspektif Taqī Al-Utsmānī	49
Tabel 10 Penerapan Teori <i>Ilhāq</i> dalam Madzhab Hanafi	52
Tabel 11 Penerapan Teori <i>Ilhāq</i> dalam Madzhab Maliki.....	55
Tabel 12 Penerapan Teori <i>Ilhāq</i> dalam Madzhab Syafi'i.....	58
Tabel 13 Penerapan Teori <i>Ilhāq</i> dalam Madzhab Hambali	60
Tabel 14 Pandangan 4 Madzhab Atas Fokus Penelitian Kedua.....	61
Tabel 15 Pandangan 4 Madzhab atas kasus <i>i'ānah alā al-ma'ṣiyāt</i> dalam konteks transaksional.....	64

ABSTRAK

Ahmad Hidhir Adib, NIM 220204210003. Legalitas Pemberian Izin Pendirian Rumah Ibadah Non Muslim Perspektif 4 Madzhab. Tesis. Program Studi Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: (1) H. Mohammad Yahya, M.A., Ph.D (2) Dr. Muhammad, Lc., M.Th.I

Kebebasan pengekspresian keberagamaan segenap warga Negara Indonesia dijamin oleh konstitusi, hal ini dituangkan dalam UUD pasal 28 E. Namun dalam realitanya, masih sering terjadi penolakan pendirian rumah ibadah. Padahal telah diatur rapi dalam SKB 2 menteri antara Menteri Agama dan Menteri dalam negeri pada tahun 2006. Tentunya dengan berbagai faktor, namun peneliti fokus pada alasan yang mengatakan bahwa pemberian izin pendirian rumah ibadah non muslim ini tidak boleh, karena sebuah kemaksiatan. Oleh karenanya peneliti membahas (1) Apa tinjauan Fikih 4 Madzhab terkait persyaratan pendirian rumah ibadah yang mengharuskan mendapatkan izin dari 60 warga setempat? Dan (2) Apa hukum memberikan izin pendirian rumah ibadah Non Muslim perspektif 4 madzhab?

Jenis penelitian ini adalah studi pustaka, dengan menggunakan pendekatan penelitian berupa studi komparatif atau perbandingan madzhab. Di mana peneliti membahasnya dengan model konten analisis pada literatur 4 madzhab, dengan menggunakan teori *Ilhāq Al-Masāil bi Nazāirihā* (Analogi hukum).

Temuan dari penelitian ini mengungkapkan bahwasanya; (1) Ulama' madzhab mengesampingkan formulasi angka, melainkan mempertimbangkan pada aspek status kenegaraannya. (2) Menurut Madzhab Hanafi, seorang Muslim boleh memberikan izin pendirian rumah ibadah non muslim. Sebab yang demikian ini tidak bisa dianggap sebagai *i'ānah alā al-ma'siyāt* (menolong kemaksiatan), karena bukan menjadi pemicu langsung. Sedangkan menurut 3 Madzhab lainnya (Maliki, Syafi'i dan Hambali) adalah haram, karena dianggap sebagai tindakan *i'ānah alā al-ma'siyāt*. Kecuali jika mengikuti pendapatnya 'Izzuddin bin Abdis Salām dalam Madzhab Syafi'i dan Ibnu Rusyd Al-Jad atau Al-Nafrāwī dalam Madzhab Maliki, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

Kata Kunci : Legalitas, Izin Pendirian, Rumah Ibadah, Non Muslim, Madzhab

ABSTRACT

Ahmad Hidhir Adib, NIM 220204210003. Legality of Granting Permits to Establish Non-Muslim Houses of Worship from 4 Madzhab Perspectives. Thesis. Islamic Studies Program, Postgraduate Program at Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: (1) H. Mohammad Yahya, M.A., Ph.D (2) Dr. Muhammad, Lc., M.Th.I

Freedom of religious expression for all Indonesian citizens is guaranteed by the constitution, this is stated in Article 28 E of the Constitution. However, in reality, there is still often opposition to the establishment of places of worship. Even though it was neatly regulated in the SKB of 2 ministers between the Minister of Religion and the Minister of Home Affairs in 2006. Of course there are various factors, but researchers focus on the reasons that state that granting permission to establish a place of worship for non-Muslims is not permissible, because it is a sin. Therefore, the researcher discusses (1) What is the review of Fiqh 4 Madzhab regarding the requirements for establishing a place of worship which requires obtaining permission from 60 local residents? And (2) What is the law grant permission to establish a place of worship for non-Muslims from the perspective of the 4 schools of thought?

This type of research is a literature study, using a research approach in the form of a comparative study or comparison of schools of thought. Where the researcher discusses this using a content analysis model in the literature of the 4 schools of thought, using the theory of *Ilhāq Al-Masāil bi Nazāirihā* (Legal analogy).

The findings from this research reveal that; (1) Madzhab scholars ignore the numerical formulation, but instead consider aspects of state status. And (2) according to the Hanafi Madzhab, a Muslim may give permission to establish a non-Muslim house of worship. This reason cannot be considered as helping disobedience, because it is not a direct trigger. Meanwhile, according to other schools of thought (Maliki, Syafi'i and Hambali) are haram, because they are considered acts of helping disobedience. Unless you follow the opinion of 'Izzuddin bin Abdus Salām in the Syafi'i Madzhab and Ibnu Rusyd Al-Jad or Al-Nafrāwī in the Maliki Madzhab, as explained above.

Keywords : Legality, Establishment Permit, House of worship, Non Muslim, Madzhab

مستخلص البحث

أحمد خضر أديب، الرقم الجامعي ٢٢٠٢٠٤٢١٠٠٣. مشروعية منح إذن إنشاء دور عبادة غير المسلم عند مذاهب الأربعة. رسالة الماجستير. قسم دراسات الإسلامية لكليات دراسات العليا جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية. المشرف الأول د. محمد يحيى، والمشرف الثاني د. محمد.

حرية التعبير الديني لجميع المواطنين الإندونيسيين يكفلها الدستور الأساسي، وهذا منصوص عليه في المادة ثمانية وعشرين أية هـ لكن الحقيقة، لا تزال هناك معارضة في كثير من الأحيان لإنشاء دور العبادة. على الرغم من أنه تم تنظيمه بشكل متقن في القنون الذي أثبتته بين وزير الشؤون الدينية ووزير الداخلية في عام ألفين وستة. بالطبع هناك عوامل مختلفة، لكن الباحثين يركزون على الأسباب التي تنص على منح الإذن بإنشاء دور العبادة لغير المسلمين لا يجوز، لأنه معصية. ولهذا بحث الباحث عن المسألتين: (١) ما مراجعة مذاهب الأربعة فيما يتعلق بمتطلبات إنشاء المعبد الذي يتطلب الحصول على إذن ستين من السكان؟. و (٢) ما حكم منح إذن إنشاء دور عبادة غير المسلم عند مذاهب الأربعة؟.

هذا البحث من نوع الدراسة المكتبي، الذي يستخدم منهج البحث في شكل دراسة مقارنة. حيث تناول الباحث ذلك باستخدام نموذج تحليل المحتوى في كتب المذاهب الأربعة، وذلك باستخدام نظرية إلحاق المسائل بالنظائر.

وننتج هذا البحث أن؛ (١) علماء المذهب يتجاهل الصيغة العددية، ولكنهم بدلاً من ذلك يأخذون بعين الاعتبار جوانب وضع الدولة. و (٢) الأحناف يجوز للمسلم أن يأذن في إنشاء دور عبادة لغير المسلم. لأنه لا يسمى بإعانة على المعصية، لأنه ليس سببا مباشرا. وحرمة المالكية والشافعية والحنابلة، لأنه يعتبر من الإعانة على المصيات. إلا إن تتبع رأي عز الدين بن عبد السلام في المذهب الشافعي، وابن رشد الجد في المذهب المالكي، كما سبق بيانه.

الكلمات الرئيسية: مشروعية، إذن البناء، دور عبادة، غير المسلم، مذهب

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia adalah bangsa majemuk, yang mana terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan etnis. Kondisi keberagaman ini tentu saja memberikan dampak adanya potensi konflik yang sangat tinggi, salah satunya konflik terkait masalah antaragama. Di antara isu yang sering menjadi konflik antar umat beragama adalah konflik pendirian rumah ibadah.³

Sebenarnya negara menjamin kebebasan pengekspresian keberagaman setiap warga Negara. Hal ini dituangkan dalam pasal 28 E, bahwa mereka dipersilahkan untuk melaksanakan kegiatan ritual sesuai dengan agama masing-masing.⁴ Namun minoritas masih sering mendapatkan kesulitan dalam proses pendirian rumah ibadahnya.⁵ Topik tersebut paling marak dibandingkan topik lainnya seperti perkawinan beda agama, perayaan hari keagamaan, bantuan sosial dan lainnya. Sebab kasus ini cenderung menjadi pemicu adanya ketegangan antar umat beragama.⁶

Dalam sejarah Islam sendiri, terdapat beberapa elit agama yang merestui pembangunan rumah ibadah non muslim berupa gereja. Al-Kindī mengkisahkan bahwa pada era abad 2 Hijriah terdapat Gubernur Mesir (Ali bin Sulaimān) merobohkan Gereja, karena kejadian ini beliau dipecat oleh Khalifah Hārūn Al-

³ Adinda Tenriangke Muchtar et al., *Evaluation of the Requirements for the Establishment of Houses of Worship in the Joint Regulation of Minister of Religious Affairs and Minister of Home Affairs Number 9 and 8 of 2006 for the Right to Freedom of Religion and Belief in Indonesia* (Jakarta Pusat: The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research, 2024). H. VII

⁴ *UUD Negara Republik Indonesia 1945* (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2020). H. 156

⁵ Ibrahim Hosen and Nadirsyah Hosen, *Ngaji Fikih* (Sleman: PT Bentang Pustaka, 2020). H. 272

⁶ Ardiansyah, "Legalitas Pendirian Rumah Ibadat Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006" 16, no. 1 (2016): 165–82.

Rasyīd. Gubernur tersebut diganti dengan Mūsā bin Īsā, dan beliau membangun ulang Gereja-gereja yang dirobohkan tadi.

Putusan ini didasarkan pada arahan 2 elit agama yang masyhur pada masanya, yaitu Laith bin Sa'ad dan Abdullah bin Lahī'ah. Beliau berdua menyatakan "*Perbuatan tersebut (membangun ulang gereja yang telah dirobohkan) termasuk salah satu sikap memakmurkan negara*". Keduanya mereportasekan bahwasanya mayoritas Gereja yang ada di Mesir ini tidaklah dibangun, kecuali pada masanya Islam semenjak zamannya para Sahabat dan Tabi'in.⁷

Jika ditarik ke belakang terdapat juga kasus serupa, bahwa *Amīr Al-Mukminīn* ke-2 (Umar bin Khatthab) pernah menandatangani sebuah kesepakatan yang dikenal dengan *Mu'āhadat Iliyā* atau nota kesepakatan Elia pada tahun ke-15 Hijriah. Perjanjian tersebut berisikan berbagai jaminan yang dijanjikan oleh beliau, di antaranya adalah perlindungan hak hidup, properti, rumah ibadahnya, dan jaminan kebebasan beragama. Perjanjian ini pun disaksikan oleh *kibār al-ṣaḥābat*, antara lain adalah Khālīd bin Wālīd, Amr bin 'Āsh, Abdur Rahman bin 'Auf, dan Mu'āwiyah bin Abī Sufyān.⁸

Adapun dalam konteks Indonesia, jaminan kebebasan beragama dan mengekspresikan keberagamaannya sudah diatur secara rapi.⁹ Bahkan proses pendirian rumah ibadah non muslim yang menjadi topik penelitian ini telah diatur

⁷ Abu Umar bin Yusuf Al-Kindi, *Kitab Al-Wulāt Wa Kitab Al-Qudhāt* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2003). H. 100

⁸ Abu Ja'far jarir Al-Thabari, *Tarīkh Al-Umām Wa Al-Mulūk* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1997). Juz 2 H. 449

⁹ Rizky Adi Pinandito, "Implementasi Prinsip Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan Di Indonesia (Studi Kasus: Tanggung Jawab Negara Dalam Konflik Sampang, Madura)," *Jurnal Pembaharuan Hukum* 4, no. 1 (2017): 91, <https://doi.org/10.26532/jph.v4i1.1649>.

secara rinci dalam SKB (Surat Keputusan Bersama) atau PBM (peraturan bersama Menteri) 2 Menteri yang ditetapkan pada 21 Maret 2006 di Jakarta.¹⁰

Hingga kini SKB tersebut menjadi payung hukum bagi masyarakat dalam persoalan pendirian rumah ibadah, meskipun pada awal 2023 terdapat wacana penyederhanaan syarat pendirian rumah ibadah yang digaungkan oleh Menteri Agama Yaquut Cholil Qoumas melalui rancangan peraturan Presiden (perpres). Di mana ketika hendak mendirikan rumah ibadah, cukup dengan rekomendasi dari Menag saja.¹¹

Hanya saja keputusan SKB antara Menteri Agama (Muhammad Basyuni) dan Menteri dalam Negeri (Moh. Ma'ruf) ini ternyata tidak bisa menjadi solusi atas pelaksanaan kebebasan beragama dan beribadah di Indonesia seperti yang diamanatkan oleh konstitusi (kebebasan beragama), sebab masih banyak pihak yang mencegah perealisasi amanat tadi.¹²

Padahal dalam surat keputusan tersebut sudah dijelaskan secara gamblang, terlebih dalam pasal 14 yang menerangkan teknis pendirian rumah ibadah. Hanya saja tindak lanjut di lapangan masih sering menemui kebuntuan. Dalam klausul tersebut dituliskan;

1. Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.
2. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi;

¹⁰ Menteri Agama and Menteri Dalam Negeri, *Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2006*, 2006.

¹¹ "Penyederhanaan Syarat Pendirian Rumah Ibadah: Penghapusan Rekomendasi Fkub Mesti Diikuti Langkah Progresif Lain," Setara Institute, 2023, <https://setara-institute.org/penyederhanaan-syarat-pendirian-rumah-ibadah-penghapusan-rekomendasi-fkub-mesti-diikuti-langkah-progresif-lain/>. diakses pada tanggal 02 November 2023 pukul 14.00

¹² Mustaming and Rohana, "Jaminan Kebebasan Beragama Menurut Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam" 4, no. 2 (2020).

- a. Daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);
 - b. Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa;
 - c. Rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; dan
 - d. Rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota.
3. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat.¹³

Meski telah diatur sedemikian rupa, minoritas masih saja mengalami kesulitan dalam proses pendirian rumah ibadah. Pada realitanya, meski sudah memenuhi persyaratan tersebut, proses pendirian rumah ibadah mendapat penolakan keras dari berbagai elemen masyarakat.¹⁴

Bahkan banyak sekali kabar yang memberitakan demikian, antara lain;

1. Penolakan pembangunan Gereja di Solo (2023), karena belum memiliki izin operasional.¹⁵

¹³ Agama and Negeri, *Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2006*.

¹⁴ Nany Suryawati and Martika Dini Syaputri, "Intoleransi Dalam Pembangunan Rumah Ibadah Berdasarkan Hak Konstitusional Warga Negara," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 3 (2022): 433–46, <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i3.433-446>.

¹⁵ "Soal Penolakan Pembangunan Gereja Di Nusukan, Gibran: Memang Belum Lengkap Izinnya," *Republika.Co*, 2023, <https://news.republika.co.id/berita/rwhtjh436/soal-penolakan-pembangunan-gereja-di-nusukan-gibran-memang-belum-lengkap-izinnya>. diakses pada tanggal 02 Oktober 2023 pukul 16.30

2. Penolakan pembangunan Gereja di Bandung (2023), alasannya masyarakat beserta pejabat setempat merasa resah dengan aktifitas mereka.¹⁶
3. Penolakan pembangunan Gereja di Tanggerang (2023), alasan penolakannya adalah menjaga keharmonisan.¹⁷

Demikian adalah segelintir kasus saja, faktanya kaum minoritas sering mendapatkan perlakuan demikian. Hegemoni mayoritanisme sangat berpengaruh pada fenomena ini, sehingga siapa yang menjadi minoritas maka akan sulit untuk mendapatkan membangun rumah ibadah atau merenovasinya.¹⁸ Banyak kasus terhambatnya pembangunan rumah ibadah disebabkan oleh persyaratan administratif yang dianggap menyulitkan kaum minoritas agama di lingkungan tersebut.¹⁹

Menurut reportase jurnalis Republika, sindrom mayoritanisme ini kerap menjadi ajang balasan.²⁰ Makanya fenomena demikian juga dialami oleh masyarakat muslim yang kebetulan menjadi minoritas di sebuah daerah, misalnya adalah proses IMB Masjid Jabal Nur, Manado (Sulawesi Utara) dan Musala Assafiyah Denpasar (Bali).²¹ Minoritas sering mendapat kesulitan ini bukan

¹⁶ “Jalan Buntu Mendirikan Gereja Di Kabupaten Bandung,” 2023, <https://bandungbergerak.id/article/detail/158766/jalan-buntu-mendirikan-gereja-di-kabupaten-bandung>. diakses pada tanggal 02 Oktober 2023 pukul 16.30

¹⁷ “Pembangunan Gereja Di Sindang Jaya Tangerang Ditolak, Warga: Demi Keharmonisan,” Poskota.co, 2023, <https://poskota.co.id/2023/09/14/pembangunan-gereja-di-sindang-jaya-tangerang-ditolak-warga-demi-keharmonisan>. diakses pada tanggal 02 Oktober 2023 pukul 16.30

¹⁸ Ann Black, Hossein Esmaili, and Nadirsyah Hosen, *Modern Perspectives On Islamic Law* (Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2013). H. 47

¹⁹ Anifatul Kiftiyah and Tri Sutrisno, “ALIGNING PANCASILA VALUES IN THE REGULATION FOR,” *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan* 08, no. 39 (2023).

²⁰ Muhammad Hafil, “Bukan Hanya Gereja, Masjid Di Muslim Minoritas Juga Susah Dibangun,” 2022, <https://news.republika.co.id/berita/ri7qmv318/bukan-hanya-gereja-masjid-di-muslim-minoritas-juga-susah-dibangun>. diakses pada tanggal 02 November 2023 pukul 14.00

²¹ “Kontroversi Pendirian Rumah Ibadah Non Muslim,” n.d., <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/26/02450071/kontroversi-pendirian-rumah-ibadah-di-indonesia?page=all>.

hanya terjadi di Indonesia saja. Namun di belahan dunia juga sering, di antaranya adalah Muslim di Australia dan Inggris.²²

Jika ditarik pada beberapa tahun belakangan, salah satu lembaga pemerhati keberagamaan di Indonesia, Setara Institute pada Tahun 2022 mempublikasikan temuan mereka atas topik kebebasan beragama di Indonesia.²³ Setara institute mencatat 50 tempat ibadah diganggu dan dirampas hak kebebasan beragama sepanjang tahun 2022. Antara lain 21 kali di Gereja (18 Gereja Protestan dan 3 Gereja Katolik), 16 kali di Masjid, 6 kali di Wihara, 4 kali di Musala, 2 kali di pura, dan 1 kali di tempat ibadah penghayat kepercayaan yang diganggu.²⁴ Bahkan sejak 2023 hingga awal Januari 2024, kasus terkait isu pendirian rumah ibadah tidak kunjung usai.²⁵

Pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor (Selasa 17 Januari 2023), Presiden Jokowi memberikan peringatan keras kepala daerah peserta Rakornas agar menjamin kebebasan beribadah dan beragama. Beliau menegaskan bahwa yang demikian telah dijamin oleh UUD 1945, khususnya Pasal 29 ayat (2). Jaminan konstitusional ini tidak boleh dinegasikan dengan kesepakatan-kesepakatan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah dengan beberapa pihak di daerah setempat, seperti

²² Black, Esmaeili, and Hosen, *Modern Perspectives On Islamic Law*. H. 48

²³ Yuni Ayu Christanty and Maya Mustika Kartika Sari, "Wacana Toleransi Beragama Pada Unggahan Akun Tiktok @ Dasadlatifofficial," n.d., 645–60.

²⁴ "Setara Institute: 50 Rumah Ibadah Diganggu Sepanjang 2022, Jawa Timur Paling Intoleran," suaraindo.co, 2023, <https://www.suaraindo.id/2023/02/setara-institute-50-rumah-ibadah-diganggu-sepanjang-2022-jawa-timur-paling-intoleran/>. diakses pada tanggal 02 November 2023 pukul 14.00

²⁵ Muchtar et al., *Evaluation of the Requirements for the Establishment of Houses of Worship in the Joint Regulation of Minister of Religious Affairs and Minister of Home Affairs Number 9 and 8 of 2006 for the Right to Freedom of Religion and Belief in Indonesia*.

keepakatan yang dibuat pemerintah daerah dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang melarang pembangunan tempat ibadah.²⁶

Namun tetap saja masih ada kasus penolakan ini, bahkan pasca arahan bapak Presiden dalam acara tersebut. Menurut reportase Melissa Crouch, terdapat beberapa kasus penolakan meskipun sudah memenuhi syarat yang ada di regulasi. Contohnya adalah gereja di Cinere dan gereja Katolik Santa Maria Purwakarta, yang izinnya dibatalkan pada Oktober 2009.²⁷

Pakar HAM UNAIR (Haidar Adam) mengatakan bahwa lanskap intoleransi ini disebabkan adanya ruang bagi masyarakat untuk memmanifestasikan tendensi intoleransi pada pembangunan rumah ibadah. Yakni pada ayat 2 poin b, di mana disebutkan dalam klausul tersebut bahwa harus mendapatkan dukungan dari 60 warga sekitar. Hal ini tentu menjadi dilematis, sebab terminologi dukungan ini memberikan opsional pada warga untuk mengizinkannya atau tidak.²⁸

Berangkat dari fakta yang telah disebutkan, maka peneliti fokus pada kasus penolakan pendirian rumah ibadah non muslim dengan alasan yang demikian adalah perbuatan haram. Sebab tidak boleh memberikan dukungan terhadap pendirian rumah ibadah, demikian menurut penuturan Bupati Aceh Singkil (Dul Mursyid).²⁹ Selain itu, beberapa elit agama juga masif memfatwakan demikian.

²⁶ “Wanti-Wanti Jokowi Ke Kepala Daerah Soal Pendirian Tempat Ibadah,” 2023, <https://news.detik.com/berita/d-6521137/wanti-wanti-jokowi-ke-kepala-daerah-soal-pendirian-tempat-ibadah>. diakses pada tanggal 02 November 2023 pukul 14.00

²⁷ Melissa Crouch, “Implementing the Regulation on Places of Worship in Indonesia: New Problems, Local Politics and Court Action Implementing the Regulation on Places of Worship in Indonesia: New Problems, Local Politics and Court Action,” *Asian Studies Review* 34, no. May 2013 (2010): 37–41, <https://doi.org/10.1080/10357823.2010.527921>.

²⁸ Pradnya Wicaksana, “Cilegon Menolak Pembangunan Gereja, Pakar HAM UNAIR Berikan Catatan,” UNAIR, 2022, <https://unair.ac.id/cilegon-menolak-pembangunan-gereja-pakar-ham-unair-berikan-catatan/#:~:text=Hal ini dikarenakan bahwa upaya,pembangunan Gereja HKBP di wilayahnya>.

²⁹ Ayomi Amindoni, “Kisah Umat Kristen Di Aceh Singkil Yang Terpaksa Beribadah Di Bawah Tenda: ‘Anak Cucu Kita Janganlah Mengalami Apa Yang Kami Alami,’” *BBC Indonesia*, 2019, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50456294>.

Putusan tersebut muncul dengan mempertimbangkan kontribusi muslim, bahwa yang demikian ini dianggap andil dalam mendukung kemusyrikan.³⁰

Sehingga dari realitas ini, peneliti ingin membahas secara mendalam terkait legalitas pemberian izin rumah ibadah non muslim ini. Agar kerukunan antar umat beragama tetap terjaga dan tidak ada kasus penolakan lagi. Adapun titik pembeda pada penelitian ini adalah bahwa peneliti akan membahas ayat 2 poin b terkait legalitas pemberian izin dari masyarakat muslim atas pendirian rumah ibadah non muslim perspektif 4 madzhab, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, dengan menggunakan teori *Ilhāq Al-Masāil bi Nazāirihā* atau *Ilhāq* (Analogi hukum) dan mengacu pada aspek *i'ānah alā al-ma'ṣiyāt* (menolong orang lain dalam masalah kemaksiatan).

B. Fokus Penelitian

Mengacu pada paradigma yang telah dibangun di latar belakang, maka peneliti merumuskan rumusan masalah sebagaimana poin di bawah ini;

1. Apa tinjauan Fikih 4 Madzhab terkait persyaratan pendirian rumah ibadah yang mengharuskan mendapatkan izin dari 60 warga setempat?
2. Apa hukum memberikan izin pendirian rumah ibadah Non Muslim perspektif 4 madzhab?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah yang dicetuskan, maka penelitian ini bertujuan seperti yang ada di bawah ini;

³⁰ Muhammad Alwi, "Ketika Tuhan Dikungkung Dalam Rumah Ibadah," IBTimes.ID, 2023, <https://ibtimes.id/ketika-tuhan-dikungkung-dalam-rumah-ibadah/>.

1. Guna mengetahui tinjauan Fikih 4 Madzhab terkait persyaratan pendirian rumah ibadah yang mengharuskan mendapatkan izin dari 60 warga setempat.
2. Guna menjelaskan hukum memberikan izin pendirian rumah ibadah Non Muslim perspektif 4 madzhab.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan manfaat pada 2 aspek, yaitu teoritis dan praktis.

Berikut adalah penjabarannya;

1. Aspek Teoritis

Manfaat penelitian yang didapatkan secara teoritis adalah bahwasanya temuan ini bisa memberikan pemahaman pada umat terkait legalitas pendirian rumah ibadah non muslim. Selain itu, temuan ini juga diharapkan menjadi rujukan bagi elit politik dan elit agama dalam menyikapi pro kontra pendirian rumah ibadah non muslim. Adapun dalam aspek pengembangan teori, penelitian ini mencoba menerapkan konsep *Ilhāq* pada ruang lingkup yang berkaitan dengan *qanūn* (perundang-undangan).

2. Aspek Praktis

Dari sisi praktis, penelitian ini setidaknya menghasilkan pelbagai manfaat sebagaimana poin berikut;

- a. Bagi lingkungan masyarakat, hasil riset ini bisa menjadi pengetahuan atau wawasan dalam menyikapi kasus pendirian rumah ibadah non muslim.

- b. Bagi peneliti sendiri, penelitian ini diharapkan memberikan pengalaman riset, penelitian karya ilmiah, juga menambah pengetahuannya atas tema terkait. Sehingga menaikkan kualitas intelektual dan kepekaan sosial.

E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

Penelitian tentang kasus konflik rumah ibadah sudah banyak, hanya saja mayoritas penelitian tersebut berfokus pada resolusi hukum positif atau musyawarah. Memandang bahwa masyarakat muslim (sebagai mayoritas) yang sering menolak pendirian rumah ibadah, maka peneliti hendak mengisi ruang percakapan dalam topik ini. Yakni menjelaskan kepastian hukum atas pemberian izin rumah ibadah non muslim.

Di antara riset yang serupa dengan bahasan ini adalah sebagai berikut;

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No.	Identitas Riset	Persamaan	Perbedaan
1.	Wahyudi Sri Wijayanto - Resolusi Konflik Pembangunan Gereja Baptis Indonesia Di Tlogosari Semarang. ³¹	Topik pembahasan terkait resolusi konflik pendirian rumah ibadah	Resolusi yang ditawarkan.
2.	Riko Firdaus, Nurbaiti, Abdul Halim, dan Zaki Mubarak - Penyelesaian Konflik Pendirian Rumah Ibadah : Studi Kasus Konflik Gereja Methodist Kota Jambi. ³²	Topik pembahasan terkait resolusi konflik pendirian rumah ibadah	Resolusi yang ditawarkan.
3.	Ali Sunarno, Firman, Asep Iqbal dan Lala Indrawati - Upaya Meminimalisir Kasus	Topik pembahasan terkait resolusi konflik pendirian rumah ibadah	Resolusi yang ditawarkan.

³¹ Wahyudi Sri Wijayanto, "Resolusi Konflik Pembangunan Gereja Baptis Indonesia Di Tlogosari Semarang," *Jurnal Abdiel: Khazanah Pemikiran Teologi, Pendidikan Agama Kristen Dan Musik Gereja* 5, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.37368/ja.v5i1.235>.

³² Riko Firdaus et al., "Penyelesaian Konflik Pendirian Rumah Ibadah : Studi Kasus Konflik Gereja Methodist Kota Jambi" 4, no. 1 (2023): 433–46, <https://doi.org/10.18592/jiu.v22i1.9416>.

	Intoleransi Dalam Pendirian Tempat Ibadah Demi Terciptanya Kohesi Sosial Pada Masyarakat Multikultural Di Kalimantan Tengah. ³³		
4.	Ahmad Syaripudin dan Zulfikar Alim Said - Wages For Work To Build A Non-Moslim House Of Worship In A Muslim Majority Environment In The Perspective Of Islamic Law. ³⁴	Pembahasan konsep <i>i'ānah alā al-ma'ṣiyāt</i> atau menolong kemaksiatan.	Artikel tersebut membahas kasus aspek <i>i'ānah alā al-ma'ṣiyāt</i> dalam konteks menjadi buru dalam pembangunan pendirian rumah ibadah non muslim, sedangkan penelitian ini fokus pada pemberian izin pendirian rumah ibadah non muslim.
5.	Abdul Halim dan Zaki Mubarak membahas terkait pola konflik pendirian rumah ibadah yang terjadi di Kota Jambi. ³⁵	Topiknya sama-sama membahas konflik pendirian rumah ibadah	Artikel tersebut membahas pola konflik, sedangkan penelitian ini fokus membahas resolusinya.

Dari berbagai penelitian di atas, peneliti dalam pembahasan ini hendak mengisi ruang kosong dalam diskursus ini. Yakni peneliti fokus pada kajian legalitas seorang muslim memberikan izin rumah ibadah non muslim perspektif 4 madzhab, dengan menggunakan teori *Ilhāq Al-Masāil bi Nazāirihā* (Analogi hukum). Sebab SKB atau PBM Menag dan Mendagri mensyaratkan adanya izin dari masyarakat setempat, dalam hal ini peneliti membahas hukum seorang muslim memberikan izin pendirian rumah ibadah Non Muslim menurut 4

³³ Ali Sunarno et al., “Upaya Meminimalisir Kasus Intoleransi Dalam Pendirian Tempat Ibadah Demi Terciptanya Kohesi Sosial Pada Masyarakat Multikultural Di Kalimantan Tengah” 3 (2023): 93–100.

³⁴ Ahmad Syaripudin and Zulfikar Alim Said, “Wages For Work To Build A Non-Moslim House Of Worship In A Muslim Majority Environment In The Perspective Of Islamic Law” 8, no. 2 (2022): 235–48, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.2.183.2>.

³⁵ Abdul Halim, “Pola Konflik Agama Di Wilayah Plural : Studi Kasus Pendirian Rumah Ibadah Di Kota Jambi” 19, no. 1 (n.d.): 85–109.

Madzhab. Oleh karenanya peneliti mengangkat judul “Legalitas Pemberian Izin Pendirian Rumah Ibadah Non Muslim Perspektif 4 Madzhab”.

F. Definisi Istilah

1. Legalitas

Kosa kata Legalitas merupakan derivasi dari kata “Legal” yang berarti suatu hal yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum.³⁶ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Legalitas bermakna sebagai keadaan sah atau sesuatu yang pasti.³⁷ Dengan demikian legalitas bisa didefinisikan dengan suatu kegiatan atau benda yang diakui keberadaannya selama tidak ada ketentuan yang mengatur. Dalam konteks penelitian ini, peneliti hendak membahas legalitas, yakni hukum memberikannya ini diperbolehkan atau tidak dalam kaca mata Fikih 4 Madzhab.

2. Rumah ibadah

SKB 2 Menteri tahun 2006 pada pasal 1 ayat 2 mendefinisikan Rumah ibadah sebagai tempat yang memiliki tipologi tertentu, di mana ini khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluknya. Dan tempat tersebut permanen adanya, sehingga mengecualikan tempat ibadah yang dimiliki oleh individual atau keluarga.³⁸ Adapun menurut tokoh, rumah ibadah merupakan sarana keagamaan yang penting bagi pemeluk agama di suatu tempat. Selain sebagai simbol "keberadaan" pemeluk agama,

³⁶ Tasya Putu Ni Adella and Dewa Gede Rudy, “Legalitas Perdagangan Program Komputer Melalui Jejaring Sosial Media Online” 11, no. 4 (2022).

³⁷ “Definisi Legalitas,” n.d., <https://kbbi.web.id/legalitas>. diakses pada tanggal 02 November 2023 pukul 14.00

³⁸ Agama and Negeri, *Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2006*. Pasal 1 Ayat 3

rumah ibadah juga sebagai tempat penyiaran agama dan tempat melakukan ibadah.³⁹

3. *I'ānah alā al-ma'siyāt*

I'ānah alā al-ma'siyāt merupakan *tarkīb idāfī* (gabungan kalimat), yang terdiri dari diktum *i'ānah* dan *al-ma'siyāt*. Secara leksikal, kata pertama bermakna menolong dan kata kedua berarti maksiat. Terminologi ini merepresentasikan sikap atas menolong orang lain dalam masalah kemaksiatan. Istilah ini juga dikenal dengan adagium *i'ānah alā al-haram* (menolong orang lain untuk melakukan perbuatan yang haram), *i'ānah alā al-mahdzūr* (menolong orang lain untuk melakukan perbuatan yang dilarang) dan *i'ānah alā al-itsm* (menolong orang lain untuk berbuat dosa).⁴⁰

G. Sistematika Penelitian

Penelitian dalam tulisan ini dibuat menjadi Lima bab, yang mana isinya akan dijelaskan sebagaimana redaksi berikut;

1. BAB I

Pada bab yang pertama, peneliti akan menguraikan secara general terkait konten yang akan dibahas pada tulisan ini. Yang mana peneliti mengisinya dengan Latar belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Orisinalitas Penelitian, Definisi Istilah, dan Sistematika Penelitian.

³⁹ Abdul Hakim Bashori, *Fungsi Sosial Rumah Ibadah Dari Berbagai Agama* (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Beragama Departemen Agama RI, 2004). H. 34

⁴⁰ Hamd Yahya Al-Kamali and Ismail Kadzim Al-Isawi, *Qa'idah Al-I'ānah Ala Al-Haram* (Sharjah: Majalah Universitas Sharjahol., 2020). H. 79-82

2. BAB II

Pada bab yang kedua, peneliti membahas kajian terkait 3 tema. Yaitu kajian teori, perspektif teori dalam Islam dan kerangka konseptual.

3. BAB III

Pada bab ketiga, peneliti mendeskripsikan metode penelitian yang diterapkan. Yaitu Pendekatan dan Jenis Penelitian, Data dan Sumber Data, Instrumen Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Pengecekan Keabsahan Data, Analisis Data dan Prosedur Penelitian.

4. BAB IV

Pada Bab ini akan dibahas secara mendetail terkait temuan dari penelitian peneliti dan diisi dengan pembahasan dari temuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang telah dicetuskan.

5. BAB V

Pada bab penutup, peneliti menyampaikan kesimpulan terkait pembahasan yang kemudian dilanjut dengan pemberian saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

1. Regulasi Pendirian Rumah Ibadah

Regulasi pendirian rumah ibadah ini merupakan tindak lanjut dari pembahasan yang dilakukan oleh Jaksa Agung, Menteri Hukum dan Hak asasi manusia, serta elemen masyarakat lainnya. Regulasi ini muncul untuk menyikapi fenomena seringkali terjadi konflik antar umat beragama, terkhusus dalam konteks penolakan rumah ibadah. Oleh karenanya disahkanlah SKB 2 Menteri yang mengatur pendirian rumah ibadah.⁴¹

Proses pendirian rumah ibadah di Indonesia diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) atau PBM (peraturan bersama Menteri) 2 Menteri yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2006. Kedua menteri tersebut adalah Menteri Agama (Muhammad Basyuni) dan Menteri dalam Negeri (Moh. Ma'ruf). Terdapat banyak sekali syarat yang harus diepnuhi jika ingin mendirikan rumah ibadah, dalam klausul tersebut dituliskan;

1. Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.
2. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi;
 - a. Daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh

⁴¹ Ismardi, "Pendirian Rumah Ibadat Menurut Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 8 Dan 9 Tahun 2006," *Toleransi: Media Ilmiah Umat Beragama*, 2011.

- pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);
- b. Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa;
 - c. Rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; dan
 - d. Rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota.
3. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadah.⁴²

Syarat demikian berbeda dengan regulasi pendirian rumah ibadah di Aceh, di mana diatur dengan menggunakan peraturan Gubernur, bukan SKB 2 Menteri 2006. Sebab Aceh memiliki hak otonom atas daerahnya. Adapun syarat formulasi angka di Aceh ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan 60 dan 90 di SKB. Dalam Qanun tahun 2007 pasal 3 ayat 2 disebutkan bahwasanya untuk mendirikan rumah ibadah ini disyaratkan harus terdapat 150 pengguna dan izin dari 120 warga sekitar.⁴³

Menurut Faiq Tobroni, Qanun tersebut berkontribusi terhadap polarisasi ekspresi kebebasan beragama, khususnya mengenai jumlah tempat ibadah bagi kelompok minoritas di beberapa kabupaten/kota di Aceh. Beberapa agama sudah

⁴² Agama and Negeri, *Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2006*.

⁴³ "PERATURAN GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM NOMOR 25 TAHUN 2007," Dinas Syariat Islam Aceh, 2007, https://dsi.acehprov.go.id/media/2023.07/peraturan_gubernur_nanggroe_aceh_darussalam_nomor_25_tahun_2007_tentang_pedoman_pendirian_rumah_ibadah1.pdf.

memiliki jumlah tempat ibadah yang proporsional dengan jumlah penganutnya, ada yang memiliki lebih dari standar penganutnya, dan ada pula yang tidak memiliki jumlah tempat ibadah yang proporsional dengan jumlah penganutnya yang diwajibkan oleh Qanun. Klausul yang harus ditinjau ulang adalah jumlah pendukung, tingkat daerah dalam pemenuhan jumlah pendukung, dan kategori warga sebagai pendukung.⁴⁴

Terkait formulasi angka yang ada di regulasi, dapat dipahami bahwa alasan adanya klausul demikian adalah untuk menjaga ketertiban umum, mengingat Negara Indonesia adalah negara yang plural yang memiliki berbagai agama dan kepercayaan. Meskipun telah diatur secara rinci, faktanya sering terjadi penolakan atas pendirian rumah ibadah, tentunya dengan berbagai alasan.⁴⁵

Menurut pakar HAM Universitas Airlangga (Haidar Adam), regulasi tersebut justru mengekang amanat konstitusi atas jaminan kebebasan beragama. Sebab klausul demikian ini menyulitkan, terlebih adanya persyaratan sejumlah 90 dan 60 yang tidak ada landasan akademiknya. Seharusnya pembatasan dalam pendirian rumah ibadah harus didasarkan oleh batas yang netral, bukan preferensi keagamaan seseorang terhadap agama orang lain.⁴⁶

Peraturan tersebut tampaknya mempersulit kelompok agama minoritas untuk membangun rumah ibadah. Telah terbukti bahwa peraturan baru sebenarnya membatasi, alih-alih menjunjung tinggi hak atas kebebasan beragama, terutama

⁴⁴ Faiq Tobroni, *Local-Sharia Regulations and Religious Expression in Aceh: Criticism of the Qanun about Establishing Places of Worship*, vol. 55, 2021.

⁴⁵ Ardiansyah, "Legalitas Pendirian Rumah Ibadat Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006."

⁴⁶ Wicaksana, "Cilegon Menolak Pembangunan Gereja, Pakar HAM UNAIR Berikan Catatan."

bagi minoritas agama di Indonesia. Kecuali negara mengubah Peraturan Baru dan secara proaktif menangani konflik di tempat-tempat ibadah.⁴⁷

Bahkan peraturan tersebut berimplikasi pada disharmoni umat beragama dan terganggunya persatuan dan kesatuan bangsa.⁴⁸ Sudah waktunya peraturan terkait pembangunan untuk ditinjau dan disempurnakan, sehingga hubungan antara komunitas minoritas dan agama mayoritas dapat dipertahankan secara memadai.⁴⁹ Sebab peraturan terkait pendirian rumah ibadah ini seakan mengkebiri keadilan kaum minoritas, sehingga perlu dilakukan rekonstruksi Sendi Peraturan Menteri nomor 9 dan 8 tahun 2006 tentang pendirian rumah ibadah.⁵⁰

2. Konteks Rumah Ibadah

Peneliti membahas kasus ini pada konteks proses pendirian rumah ibadah yang diakui oleh negara, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khonghucu.⁵¹ Sehingga mengecualikan kepercayaan lain yang tidak dijamin kebebasan pengekspresiaan ritual keagamaannya.

Peneliti membahas kasus ini dalam konteks masyarakat muslim yang dimintai persetujuannya dalam memberikan izin pendirian rumah ibadah non muslim. Oleh karenanya peneliti mencetuskan judul penelitian “Legalitas Pemberian Izin Pendirian Rumah Ibadah Non Muslim Perspektif 4 Madzhab”. Yakni hukum

⁴⁷ Melissa Crouch, “REGULATING PLACES OF WORSHIP IN INDONESIA : UPHOLDING FREEDOM OF RELIGION FOR RELIGIOUS MINORITIES ?,” *Singapore Journal of Legal Studies* +, no. July (2007): 96–116, <https://www.jstor.org/stable/24869039>.

⁴⁸ Binsar Antoni Hutabarat, “Evaluasi Terhadap Peraturan Bersama Menteri Tahun 2006 Tentang Pendirian Rumah Ibadah,” *Societas Dei: Jurnal Agama Dan Masyarakat* 4, no. 1 (2017): 8, <https://doi.org/10.33550/sd.v4i1.41>.

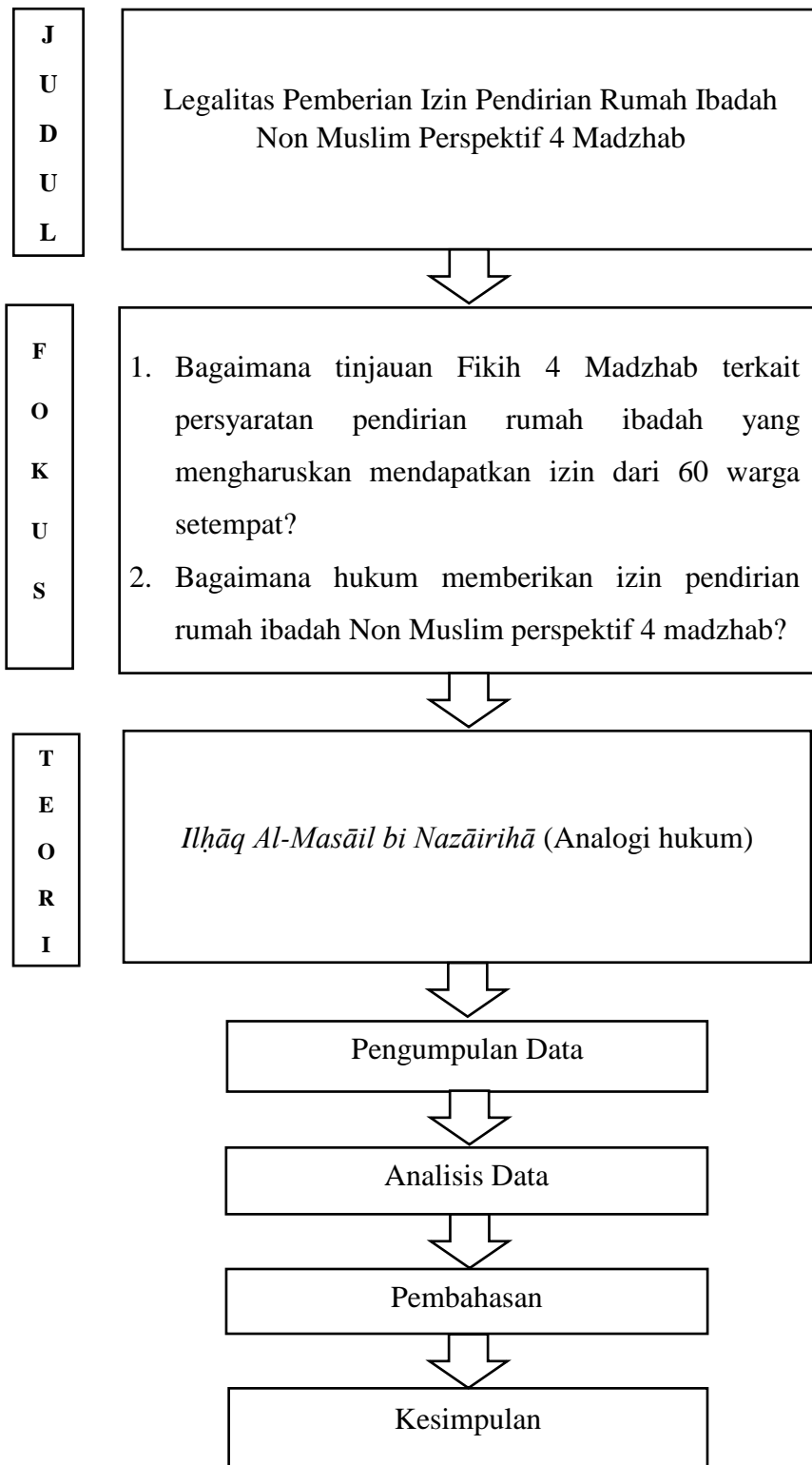
⁴⁹ Arifinsyah Arifinsyah and Ahmad Sofian, “Regulation on Worship House Establishment and Implication towards Minority Relation of Religious People Majority in Indonesia,” *International Journal of Social Sciences* 4, no. 1 (2021): 106–13, <https://doi.org/10.31295/ijss.v4n1.1396>.

⁵⁰ Budi Sulistiyo, Anis Mashdurohatun, and Sri Endah Wahyuningsih, “Legal Reconstruction of the Requirement for the Establishment of the House of Worship Based on Justice Values,” *Scholars International Journal of Law, Crime and Justice* 7956 (2023): 27–34, <https://doi.org/10.36348/sijlcj.2023.v06i01.005>.

⁵¹ Feby Yudianita, “Tinjauan Yuridis Terhadap Aliran Kepercayaan Dihubungkan Dengan Pasal 29 Ayat 2 UUD 1945” 2 (2015): 1–14.

seorang muslim memberikan izin pendirian rumah ibadah non muslim, ditinjau dari paradigma fikih 4 madzhab.

Pencetusan hukum ini ditempuh melalui teori *Ilhāq Al-Masāil bi Nazāirihā* (Analogi hukum), yang menitik beratkan pada aspek *i'ānah alā al-ma'siyāt* atau menolong orang lain dalam masalah kemaksiatan. Berikut adalah *flowchart* dari penelitian ini;



B. Perspektif Teori

Memandang bahwa kasus pemberian izin pendirian rumah ibadah Non Muslim ini merupakan kasus kontemporer yang tentunya tidak ditemukan pembahasannya di literatur fikih klasik, maka peneliti dalam hal ini akan mencetuskan hukum dengan menggunakan teori *Ilhāq Al-Masāil bi Nazāirihā* (Analogi hukum). Sebuah teori penganalogian hukum yang familiar dengan nomenklatur *Ilhāqī, Takhrīj al-furū' ala al-furū'*, atau jamak juga disebut dengan *Tandzīr*.⁵² Berikut adalah pembahasannya;

1. Definisi dan Konsep teori

Secara bahasa, *Ilhāq* bermakna menyamakan hukum.⁵³ Adapun secara istilah bermakna memutuskan hukum dengan menganalogikan kasus ini dengan kasus-kasus yang serupa dalam pembahasan literatur fikih klasik dari 4 madzhab.⁵⁴

Sehingga peneliti akan menggunakan metode *Ilhāqī*, bukan *aqwāli* (mengikuti pendapat yang sudah ada dalam literatur fikih).⁵⁵ Sebab kasus yang dibahas ini tidak ada referensi yang spesifik, sehingga peneliti akan menganalogikannya dengan kasus yang mirip dengannya, tentunya proses ini tetap dalam ruang lingkup 4 Madzhab saja.⁵⁶

Sebenarnya kasus pendirian rumah ibadah ini terdapat pembahasan yang rinci di fikih klasik, hanya saja karena geopolitiknya berbeda. Sehingga tidak memungkinkan untuk menjadikannya rujukan pada kasus kontemporer ini, yang mana geopolitiknya menjunjung tinggi kebebasan. Sebab menurut penuturan Al-

⁵² Zulfa Musthofa, *Al-Fatwa Wa Ma La Yanbaghi Li Al-Mutafaqqihi Jahluhu* (Jakarta Selatan: Mayang Publishing, 2021). H. 200

⁵³ Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il, 1926-1999* (Yogyakarta: LKIS, 2004). H. 122

⁵⁴ PBNU, *Ahkam Al-Fuqaha' Fi Muqarrat Mu'tamarat Nahdlat Al-Ulama'* (Surabaya: Khalista, 2011). H. 470

⁵⁵ Ahmad Muhtadi Anshor, *Bahth Al-Masail Nahdlatul Ulama'* (Yogyakarta: Teras, 2012). H. 132

⁵⁶ Abdul Muchit Muzadi, *NU Dan Fiqh Konstektual* (Yogyakarta: LKPS, 1994). H. 58-59

Qarāfi, memberikan putusan hukum harus menyesuaikan keadaan. Tidak boleh memaksakan keterangan di zaman dahulu, dengan mengaplikasikannya pada kasusistik di zaman sekarang.⁵⁷ Afifuddin Muhajir pun juga menyatakan hal yang sama, bahwa ketika telah ada rumusnya namun berbeda situasi, kondisi dan tradisinya, maka keterangan tersebut tidak bisa dipaksakan untuk diterapkan dalam menghukumi suatu kasus.⁵⁸

Maka putusan hukum atas kasuistik yang belum ada hukumnya merupakan keniscayaan bagi para elit agama.⁵⁹ Ketika kasus yang dibahas ini tidak diketemukan keterangan yang membahasnya, maka dilakukanlah penganalogian hukum.⁶⁰

Oleh karenanya peneliti menggunakan pendekatan *Ilhāq Al-Masāil bi Nazāirihā* atau *Ilhāq* (Analogi hukum), dalam prosesnya dibutuhkan pada 3 aspek (rukun). Yaitu sebagai berikut;

- a. *Mulhāq* (kasus yang akan dianalogikan hukumnya)
- b. *Mulhāq bih* (kasus yang dijadikan sebagai padanan hukum)
- c. *Wajh al-ilhāq* (sisi keserupaan substansi).⁶¹

2. Legitimasi Teori

Teori *Ilhāq Al-Masāil bi Nazāirihā* (Analogi hukum) bersumber dari arahan Sayyidina Umar bin Khatthāb pada Abu Mūsā Al-Asy'arī yang bertugas sebagai elit agama. Bahwa jika memutuskan sesuatu harus berdasarkan teks keagamaan

⁵⁷ Abu Al-Abbas Al-Qarafi, *Al-Furūq* (Beirut: Alam Al-Kutub, n.d.). Juz 1 H. 191

⁵⁸ Abdul Wafi, *Reformasi Bermadzhab Dalam NU* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2022). H. 346

⁵⁹ Husein Muhammad, *Menuju Fiqh Baru* (Yogyakarta: Ircisod, 2020). H. 13

⁶⁰ Daud K Fathonah and Mohammad Ridlwan Hambali, "The Methods Of Istinbath Nahdlatul Ulama (Nu): A Study On Fatwa Strategy In The Bahts Al-Masail Tradition In Indonesia," *Millennial: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 2 (2022): 1–22, <https://jurnal.alhamidiyah.ac.id/index.php/Millennial/article/view/182/172>.

⁶¹ LBM PWNU Jawa Timur, *Panduan Bahtsul Masail PWNU Jatim* (Surabaya: PWNU Jawa Timur, n.d.).

(Al-Qur'an dan Hadis), jika tidak menemukannya maka putuskanlah berdasarkan putusan hukum yang serupa dengan kasus yang dihadapinya.⁶²

Riwayat ini direkam oleh Al-Dāruquthnī dalam *sunan*-nya, logikanya adalah bahwa teks keagamaan sudah paripurna sedangkan kasus atau realitas yang terjadi di masyarakat ini terus menerus terbaru.⁶³ Oleh karenanya dipakailah teori *Ilhāq Al-Masāil bi Nazāirihā* atau *Ilhāq* (Analogi hukum), dan Imam Al-Suyūthī menyatakan bahwa riwayat tersebut merupakan dalil yang paling eksplisit terkait legitimasi teori *Ilhāq Al-Masāil bi Nazāirihā*.⁶⁴

Konsep *Ilhāq* ini dilegitimasi oleh *Tāj al-dīn* Al-Subki dan diafirmasi oleh anotasinya, yakni *Jalāl al-dīn* Al-Mahallī dan Ḥasan Al-Atthar.⁶⁵ Bahkan Al-Ḥāfidz Al-Irāqī menyatakan bahwa lebih utama menggunakan teori *Ilhāq Al-Masāil bi Nazāirihā* atau *Ilhāq* (Analogi hukum) dari pada mencetuskan hukum secara independen (melalui *istinbāth* sendiri), sebab dengan menggunakan teori tersebut berarti tetap menginduk pada pandangan ulama' otoritatif.⁶⁶

3. Operasional Teori

Teori ini tak ubahnya seperti metode *qiyās* sebagai istinbat hukum, hanya saja objek padanannya saja yang beda.⁶⁷ *Qiyās* menginduk ke Al-Qur'an dan Al-Sunnah, sedangkan *Ilhāq* menginduk kepada keterangan ulama'.⁶⁸ Sehingga titik

⁶² Abdullah bin Sulaiman AL-Jarhazi, *Al-Mawahib Al-Saniyyah Ala Faraid Al-Bahiyah* (Beirut: Dar Al-Basyair Al-Islamiyyah, 1996). Juz 1 H. 68

⁶³ Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, *Hasyiyah Al-Fawaid Al-Janiyyah Ala Al-Mawahib Al-Saniyyah* (Beirut: Dar Al-Basyair Al-Islamiyyah, 1996). Juz 1 H. 68

⁶⁴ Al-Suyuthi, *Al-Asybah Wa Al-Nadzair*. H. 6

⁶⁵ Hasan Al-Atthar, *Hasyiyah Al-Atthār Alā Syarh Al-Jalal Al-Mahallī Ala Jam' Al-Jawāmi'* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1999). Juz 2 H. 403

⁶⁶ Abdullah Yusuf Azam, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah* (Maktabah Syamilah Al-Dzahbiyyah, n.d.), <https://ketabonline.com/ar/books/7868>. H. 3

⁶⁷ Sukron Mamun, "Bahtsul Masa'il Nu; Antara Ijtihad Dan Ikhtiyat Sukron Ma'mun," n.d., 63–86.

⁶⁸ Muhammad Suhufi, "Fatwa Dan Aktualisasi Hukum Islam Di Indonesia" 8 (2010): 55–68.

persamaannya adalah penganalogian suatu kasus yang tidak ditemukan keterangannya.⁶⁹

Adapun prosedur atau cara kerja teori *Ilhāq Al-Masāil bi Nazāirihā* atau *Ilhāq* ini adalah sebagai berikut;

- a. Memahami kasus (*tashawwur al-Mas'alah*) yang akan dianalogikan hukumnya (*Mulhāq*) dengan benar.
- b. Mencari padanan kasus (*Mulhāq bih*) yang telah tercantum dalam literatur otoritatif, atas dasar adanya persamaan atau keserupaan substansi antara keduanya (*wajh al-Ilhāq*).
- c. Menetapkan hukum *Mulhāq* dengan hukum yang sama seperti hukumnya *Mulhāq bih*.⁷⁰

Contoh pengaplikasian dari teori ini adalah sebagaimana penganalogian dalam kasus penggusuran tanah untuk jalan tol (infrastruktur pemerintah) yang disamakan dengan penggusuran tanah karena perluasan masjid.⁷¹

Tabel 2 Skema Teori *Ilhāq Al-Masāil bi Nazāirihā* atau *Ilhāq*

<i>Mulhāq</i> (kasus yang akan dianalogikan hukumnya)	<i>Mulhāq bih</i> (kasus yang dijadikan sebagai padanan hukum)	<i>Wajh al-ilhāq</i> (sisi keserupaan substansi)
Penggusuran tanah untuk keperluan jalan tol	Menggusur tanah masyarakat untuk keperluan masjid	Penggusuran untuk kepentingan umum

Dalam literatur klasik disebutkan kebolehan menggusur tanah masyarakat untuk keperluan masjid, kasus ini sebagai *Mulhāq bih*. Adapun penggusuran tanah untuk keperluan jalan tol ini sebagai *Mulhāq*, sedangkan sisi kesamaan substansinya atau *wajh al- Ilhāq* adalah penggusuran untuk kepentingan umum.

⁶⁹ Musthofa, *Al-Fatwa Wa Ma La Yanbaghi Li Al-Mutafaqqihi Jahluhu*. H. 201

⁷⁰ LBM PWNNU Jawa Timur, *Panduan Bahtsul Masail PWNNU Jatim*. H. 13

⁷¹ Riza Rifani, "Konsep Ilhaq Al-Masail Bi Nazhairiha Dan Metode Penerapannya Pada Kasus Kontemporer" 8742 (2023).

Sehingga putusan hukumnya disamakan antara keduanya. Karena hukum asal dari *Mulhāq bih* adalah boleh, maka putusan hukum atas *Mulhāq* ini dihukumi sama dengannya. Di antara masalah lain yang diputuskan dengan metode ini adalah Vasektomi, Tubektomi, reksadana, hutang negara, sandiwara dll.⁷²

⁷² Luthfi Hadi Aminuddin, *Dari Qawli Hingga Manhaji (Dinamika Metode Penetapan Fatwa Hukum Islam Di Nahdlatul Ulama)* (Surabaya: PW LTN NU Jawa Timur, 2022). H. 208-210

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah studi pustaka, yakni suatu penelitian yang menjadikan buku atau literatur sebagai objek kajian.⁷³ Dengan demikian, penelitian ini akan mengambil data dari karyanya para elit agama dari kalangan 4 madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali). Yang mana nanti akan ditunjang dengan berbagai literatur serupa, guna memperkaya wacana dalam penelitian ini.

Adapun model pendekatan penelitiannya adalah studi komparatif atau perbandingan madzhab, yaitu jenis penelitian hukum Islam yang berorientasi pada usaha untuk menampilkan argumentasi masing-masing madzhab.⁷⁴

Sehingga dalam penelitian ini, peneliti melakukan konten analisis dengan mengkomparasikan pandangan 4 madzhab terkait kasus seorang Muslim memberikan izin pendirian rumah ibadah Non Muslim, dengan menggunakan landasan teori *Ilhāq Al-Masā'il bi Nazā'irihā* (analogi hukum).

B. Data dan Sumber Data

Sumber data adalah sumber diperolehnya data sebagai bahan penelitian.⁷⁵ Jenis data terbagi menjadi 2, yakni data primer yang berarti data yang diambil dari objek penelitian. Sedang data sekunder adalah data yang diperoleh sebagai

⁷³ Iwan Hermawan, *Teknik Menulis Karya Ilmiah Berbasis Aplikasi Dan Metodologi* (Kuningan: Hidayatul Qur'an, 2019). H. 27

⁷⁴ Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi penelitian hukum Islam*. (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2016). H. 56

⁷⁵ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: CV. syakir Media Press, 2021). H. 12

penunjang terhadap objek penelitian.⁷⁶ Dan dalam penelitian ini, data primernya adalah literatur otoritatif dalam 4 madzhab.

Munas (Musyawarah Nasional) Alim Ulama' NU di Sukolilo pada tahun 2006 mencetuskan sebuah konsep dari literatur otoritatif. Di mana untuk menyematkan keotoritatifan ini didasarkan pada 3 aspek, yaitu kredibilitas penulis (berafiliasi sunni, memiliki sifat *wara'* dan pengetahuan yang komprehensif), kontennya (jika pendapatnya sendiri, maka parameternya adalah argumentasinya. Namun jika berupa kutipan, maka acuannya adalah validitas kutipannya) dan mendapat pengakuan dari komunitas madzhabnya.⁷⁷

Berikut adalah beberapa judul kitab yang dianggap sebagai rujukan otoritatif yang bisa merepresentasikan pandangan madzhab;

1. Madzhab Hanafi

Literatur otoritatif di Madzhab Hanafi dibagi menjadi 3 klaster, antara lain;

- a. *Kutub dzāhir al-riwāyat* (literatur yang memuat riwayat imam Abū Ḥanīfah, Abū Yūsuf dan Muḥammad Al-Syaibānī) yang berjumlah 6, antara lain *Al-Jāmi' Al-Shaghīr*, *Al-Jāmi' Al-Kabīr*, *Al-Siyar Al-Shaghīr*, *Al-Siyar Al-Kabīr*, *Al-Mabsūth*, dan *Al-Ziyādaāt*;
- b. *Masāil al-nawādir* (kasus yang tidak disebutkan oleh ketiga imam madzhab dalam literatur *dzāhir al-riwāyat*) seperti karyanya Muhammad selainnya yang berjudul *Al-Kaisāniyyāt*, *Al-Hārūniyyāt*, *Al-Jurjāniyyāt*, *Al-Ruqqiyyāt*, dan karyanya Abū Yūsuf yang berjudul *Al-Amālī*; dan

⁷⁶ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2014). H. 31

⁷⁷ PBNU, *Ahkam Al-Fuqaha' Fi Muqarrat Mu'tamarat Nahdlat Al-Ulama'*. H. 863

- c. *Al-Wāqi'āt* (literatur hasil *istinbāth* para ulama' kurun *muta'akhhirīn* atau pasca eranya Abū Yūsuf dan Muḥammad Al-Syaibānī atau murid dari murid keduanya) seperti *Al-Nawāzil li Al-Faqīh* (Abū Al-Laits Al-Samarqandī), *Majmū' Al-Nawāzil wa Al-Wāqi'āt* (Al-Nāthifi), *Al-Wāqi'āt* (Al-Shadr Al-Syahīd) dll.⁷⁸

Ketika ternyata terdapat keterangan yang bertentangan pendapatnya, maka keterangan yang ada di kitab jenis *dzāhir al-riwāyat* ini tidak bisa digunakan. Sebab yang dipertimbangkan oleh para *muḥarrir* (penyeleksi pendapat madzhab) adalah kuatnya dalil dan kesesuaian dengan kaedah imam madzhab.⁷⁹

Pada perkembangan selanjutnya, rujukan yang dianggap otoritatif ini berkembang menjadi model resume dan anotasi. Sehingga menghasilkan banyak sekali literatur yang mewakili pandangan madzhab. Misalnya adalah *Al-Mabsūth* (Al-Sarakhsyī), *Hasyiyah Ibnu Ābidin*, *Badā'i' al-ṣanā'i'* (Al-Kāsānī), *Kanz Al-Daqāiq* (Al-Nasafī), *Al-Hidāyah* (Al-Marghinānī), *Tabyīn Al-Haqāiq* (Al-Zayla'ī), *Fath Al-Qadīr* (Ibnu Al-Himām) dan beberapa literatur lainnya.⁸⁰

2. Madzhab Maliki

Madzhab Maliki membagi literturnya menjadi 2, yakni *Fiqh Nadzari* (literatur fikih yang memuat semua diskursus) dan *Fiqh Tathbīqi* (literatur fikih yang hanya memuat satu diskursus saja atau kompilasi fatwa). Dalam penelitian ini, peneliti hanya merujuk pada literatur jenis pertama seperti *Mukhtashar Khalīl* (Khalīl bin Ishāq) dan anotasinya, *Al-Mukhtashar Al-Fiqhī* (Ibnu 'Arafah), *Audhah Al-Masālik* (Al-Rahūnī), *Hasyiyah Al-Dasūqī Alā Al-Syarh Al-Kabīr* (Al-

⁷⁸ Ibnu 'Abidin, *Radd Al-Muhtar Ala Al-Durr Al-Mukhtar* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1992). Juz 1 H. 69

⁷⁹ Muhammad Ibrahim Ahmad Ali and Abdul Aziz Ali, *Al-Madzhab Inda Al-Hanafīyyah Al-Malikiyyah Al-Syafi'iyah Al-Hanabilah* (Kuwait: Al-Wa'y Al-Islami, 2012). H. 102

⁸⁰ PBNU, *Ahkam Al-Fuqaha' Fi Muqarrat Mu'tamarat Nahdlat Al-Ulama'*. H. 864-865

Dasūqī),⁸¹ *Al-Syāmil* (Bahram Al-Damīrī), *Jāmi' Al-Ummahāt* (Ibnu Al- Hājib), *Al-Fawākih Al-Dawāni* (Al-Nafrāwī), dan literatur lainnya.⁸²

3. Madzhab Syafi'i

Perspektif Madzhab Syafi'i, sebuah literatur dianggap otoritatif, ketika pendapat tersebut telah diseleksi oleh Imam Al-Nawāwī dan Al-Rafī'ī dalam kapasitasnya sebagai *mujtahid tarjih*. Sehingga literatur (pendapat) yang ada sebelum era keduanya tidak bisa dipakai, hingga bisa dipastikan bahwa pendapat tersebut memang sesuai dengan kaedah madzhab.⁸³

Bahkan sekalipun pendapatnya Imam Al-Syāfi'ī, maka tetap yang didahulukan adalah pendapat yang diseleksi oleh keduanya. Alasannya adalah karena menyesuaikan dengan kaedah Imam Al-Syāfi'ī sendiri, sehingga ketika pendapatnya Imam Al-Syāfi'ī bertentangan dengan kaedahnya, maka kaedahnya yang diunggulkan.⁸⁴

Hirarki pendapat yang dianggap otoritatif dalam madzhab Syafi'i adalah pendapat yang disepakati oleh *Syaikhān* (Al-Nawāwī dan Al-Rafī'ī), Namun ketika ternyata antara keduanya berbeda pendapat, maka yang diunggulkan adalah Imam Al-Nawāwī. Ketika ditemukan bahwasanya Imam Al-Nawāwī tidak menyeleksi satu pandangan, maka berpijak pada pentarjihannya Imam Al-Rafī'ī, lalu pendapat yang diunggulkan mayoritas, orang yang paling pakar dan *wara'*.⁸⁵

⁸¹ Ali and Ali, *Al-Madzhab Inda Al-Hanafiyah Al-Malikiyyah Al-Syafi'iyah Al-Hanabilah*. H. 261

⁸² PBNU, *Ahkam Al-Fuqaha' Fi Muqarrat Mu'tamarat Nahdlat Al-Ulama'*. H. 867

⁸³ Ibnu Hajar Al-Haitami, *Tuhfat Al-Muhtaj Fi Syarh Al-Minhaj* (Beirut: Dar Ihya' Turats Al-Arabi, 1983). Juz 1 H. 39

⁸⁴ Sulaiman Al-Kurdi, *Al-Fawaid Al-Madaniyyah* (Damaskus: Dar Nur Al-Shabah, 2011). H. 43

⁸⁵ Abu Bakar Syatha' Al-Bakri, *I'nanah Al-Thalibin Fi Hall Alfadz Fath Al-Mu'in* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2015). Juz 1 H. 27

Peneliti membahas topik ini dengan merujuk pada karya Al-Nawāwī dan literatur yang ditulis setelahnya seperti *Fath al-qarīb*, *Fath Al-Mu'īn*, *Fath Al-Wahhāb*, *Asnā Al-Mathālib*, dan anotasinya serta beberapa literatur lainnya.

4. Madzhab Hambali

Adapun untuk Madzhab Hambali, peneliti merujuk pada literatur otoritatifnya seperti *Muntahā Al-Irādāt* dan anotasinya, *Dalīl al-Thālib*, *Al-Iqnā'*, *Zād Al-Mustaqni'*, *Al-Mughnī*,⁸⁶ *Al-Furū'*, *Al-Inṣāf*, *Mathālib uli Al-Nuhā*, *Kasyyāf Al-Qinnā'*, dan beberapa literatur lainnya.⁸⁷

Adapun data sekundernya adalah literatur keagamaan, fikih komparatif (*Al-Majmū' Syarh Al-Muhaddzab* karya Al-Nawāwī Al-Syāfi'ī, *Al-Mughnī* karya Ibnu Qudāmah Al-Ḥambalī, *Al-Muhallā* karya Ibnu Ḥazm Al-Dzāhirī, *Bidāyat Al-Mujtahid* karya Ibnu Rusyd Al-Ḥafīd Al-Mālikī, *Al-Fiqh Ala Madzāhib Al-Arba'ah* karya Al-Jazīrī, *Al-fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh* karya Wahbah Al-Zuhāilī dan *Mausū'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*) dan seperangkat literatur lainnya yang menunjang kompleksitas data ini.

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah sarana yang dipakai untuk mengumpulkan data.⁸⁸ Adapun dalam penelitian ini instrumen penelitiannya menggunakan model observasi, yakni riset dari segala data yang serupa dengan judul penelitian ini terkhusus studi literatur yang dijadikan objek penelitian.⁸⁹ Di samping itu, peneliti

⁸⁶ Nuruddin Ali Jum'ah, *Al-Bayan Li Ma Yusghil Al-Adzhan* (Kairo: Dar Al-Muqattham, 2009).

⁸⁷ PBNU, *Ahkam Al-Fuqaha' Fi Muqarrat Mu'tamarat Nahdlat Al-Ulama'*. H. 868

⁸⁸ Arikunto Suharmi, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik," *Jakarta: Rineka Cipta*, 2012. H. 21

⁸⁹ Iwan Hermawan, "Metodologi Penelitian Pendidikan (Kualitatif, Kuantitatif Dan Mixed Method) - IWAN HERMAWAN, S.Ag.,M.Pd.I - Google Buku," *Hidayatul Quran*, 2019. H. 38

juga mengkaji beberapa literatur lain yang relevan dengan pembahasan yang diangkat.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti memakai teknik dokumentasi. Yaitu usaha mengumpulkan data dengan menelaah sumber tertulis, baik berupa buku, laporan atau informasi lainnya yang diperlukan dalam penelitian.⁹⁰

Dengan demikian peneliti mengumpulkan data dari sumber primer dan sekunder. Setelah data terkumpul, maka dilakukan konseptualisasi. Lalu dianalisa dan dikaji secara mendalam, kemudian ditutup dengan penyampaian kesimpulan dan saran.

E. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, peneliti memverifikasi data dengan membandingkan teks kitab yang diterbitkan oleh *maktabah syāmilah* dan penerbit, kemudian membaca literatur fikih kepada akademisi yang berkompeten, mengkaji anotasi dan beberapa resumennya. Di samping itu, peneliti juga mengkaji beberapa literatur yang terkait dengan pembahasan ini (baik dari kitab, buku, maupun jurnal dll).

F. Analisis Data

Analisis data adalah langkah menarasikan dan mensistematiskan data yang telah diperoleh, sehingga bisa dipublikasikan kepada khalayak.⁹¹

Dengan demikian, peneliti mereduksi data dari sumber data yang telah ada. Lalu diinterpretasikan dan disajikan dengan narasi, kemudian dikomparasikan dan ditarik sebuah kesimpulan penelitian.

⁹⁰ Amir Hamzah, *Penelitian Berbasis Proyek Metode Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D Kajian Teoritik Dan Contoh-Contoh Penerapannya* (Malang: Literasi Nusantara, 2019). H. 29

⁹¹ Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020). H. 20

G. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian studi pustaka menurut Carol Kuhlthau, sebagaimana yang dikutip oleh Mirzaqon adalah dengan memilih topik, mencari data, membatasi fokus riset, menyajikan data dan menarasikan hasil penelitian.⁹²

Sehingga peneliti mengkaji keterangan literatur fikih 4 madzhab terkait topik yang dibahas, dan membaca anotasinya, serta beberapa literatur lainnya yang relevan dengan pembahasan ini. Lalu dilakukan sebuah analisis untuk menjawab rumusan masalah, kemudian dinarasikan dan disajikan sebagai hasil penelitian.

⁹² Budi Purwoko and Abdi Mirzaqon, “Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori Dan Praktik Konseling Expressive Writing Library Research Of The Basic Theory And Practice Of Expressive Writing Counseling,” *BK Unesa*, 2018.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Persyaratan Pendirian Rumah Ibadah

Mendapatkan dukungan dari 60 warga sekitar dan ketercapaian 90 orang yang hendak beribadah merupakan salah satu syarat yang cukup sulit direalisasikan. Sehingga tidak mengherankan jika Haidar Adam mempertanyakan landasan akademik dari formulasi angka tadi.⁹³ Namun menurut Ardiansyah, hal demikian ini dilandaskan pada logika penjagaan ketertiban umum, agar keberadaan rumah ibadah ini menjadi tertata.⁹⁴

Adapun dalam konteks fikih klasik, persyaratan demikian ini tidak ada. Ulama' madzhab mengesampingkan terkait formulasi angka, melainkan mempertimbangkan pada aspek status kenegaraannya. Berikut adalah klasifikasinya;

1. Madzhab Hanafi

Ibnu Al-Himām menjelaskan bahwasanya status kenegaraan dalam pandangan Madzhab Hanafi ini dibagi menjadi 3, berikut adalah klasifikasinya dan implikasinya;⁹⁵

Tabel 3 Status Kenegaraan dan Implikasinya dalam Madzhab Hanafi

No.	Status Kenegaraan	Implikasi
1.	Daerah yang didirikan oleh umat Islam, seperti Bashrah, Kufah, Baghdad, Wasit (Irak).	Tidak diperbolehkan mendirikan rumah ibadah non muslim.
2.	Daerah yang ditaklukkan dengan peperangan atau <i>'anawah</i>	Tidak diperbolehkan mendirikan rumah ibadah non muslim, tapi rumah ibadah yang ada boleh digunakan.

⁹³ Wicaksana, "Cilegon Menolak Pembangunan Gereja, Pakar HAM UNAIR Berikan Catatan."

⁹⁴ Ardiansyah, "Legalitas Pendirian Rumah Ibadat Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006."

⁹⁵ Ibnu Al-Himam, *Fath Al-Qadir* (Beirut: Dar Al-Fikr, n.d.). Juz 5 H. 68

3.	Daerah yang ditaklukkan tanpa peperangan (rekonsiliasi) atau <i>shuluḥ</i>	Diperinci. Jika dalam rekonsiliasi terdapat klausul bahwa status tanah masih milik mereka, namun mereka menyanggupi untuk membayar upeti, maka diperbolehkan mendirikan rumah ibadah dll. Sedangkan jika tanahnya menjadi milik orang Islam, maka kebebasan beragama disesuaikan dengan klausul dalam rekonsiliasi.
----	--	---

Keterangan serupa juga disebutkan oleh Al-Nasafī,⁹⁶ dan para komentarnya seperti Ibnu Nujaim,⁹⁷ Fakhruddin Al-Zayla’ī,⁹⁸ dan *Sirājuddīn* Umar Nujaim.⁹⁹ Selain itu, ada juga Abdur Rahman Afandī,¹⁰⁰ Al-Sarakhsyī,¹⁰¹ Al-Kāsānī,¹⁰² Badruddin Al-‘Aini,¹⁰³ dan *Akmaluddīn* Al-Bābirī,¹⁰⁴ lain-lain.

Ketika membahas ini dalam anotasinya, Ibnu Ābidīn memberikan keterangan tambahan terkait sengketa status tanah. Bahwasanya jika non muslim menganggap tanah tersebut adalah *shuluḥ* (rekonsiliasi), sedangkan kaum Muslimin menganggapnya tanah *‘anawah* (ditaklukkan melalui peperangan). Maka kepala negara diarahkan ke para elit agama, untuk melacak apakah ada fakta literatur yang menjelaskan status demikian. Namun jika tiada atau fakta literturnya berbeda, maka tanah tersebut distatusi sebagai *shuluḥ*. Sehingga masalah

⁹⁶ Abul Barakat Al-Nasafī, *Kanz Al-Daqaiq* (Beirut: Dar Al-Basyair Al-Islamiyyah, 2011). H. 385

⁹⁷ Ibnu Nujaim Zainuddin Al-Misri, *Al-Bahr Al-Raiq Syarh Kanz Al-Daqaiq* (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Islami, n.d.). Juz 5 H. 121

⁹⁸ Fakhruddin Al-Zayla’ī, *Tabyin Al-Haqaiq* (Kairo: Al-Mathba’ah Al-Kubro Al-Amiriyyah, 1990). Juz 3 H. 279

⁹⁹ Sirajuddin Ibnu Nujaim, *Al-Nahr Al-Faiq Syarh Kanz Al-Daqaiq* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2018). Juz 3 H. 44

¹⁰⁰ Abdur Rahman Afandī, *Majma’ Al-Anhar* (Beirut: Dar Ihya’ Turats Al-Arabi, n.d.). Juz 1 H. 673

¹⁰¹ Muhammad bin Ahmad Al-Sarakhsi, *Al-Mabsuth* (Beirut: Dar Al-Ma’rifah, 1997). Juz 16 H. 39

¹⁰² ‘Alauddin Al-Kasani, *Badai’ Al-Shanai’ Fi Tartib Al-Syara’i* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2019). Juz 7 H. 114

¹⁰³ Badruddin Mahmud Al-Aini, *Al-Binayah Syarh Al-Hidayah* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2000). Juz 7 H. 255

¹⁰⁴ Akmaluddin Al-Babirī, *Al-Inayah Syarh Al-Hidayah* (Beirut: Dar Al-Fikr, n.d.). Juz 6 H. 257

kebebasan beragama (mendirikan rumah ibadah) disesuaikan dengan kesepakatan yang ada.¹⁰⁵

Oleh karenanya, dalam Madzhab Hanafi hanya ada 2 konteks yang memperbolehkan non muslim mendirikan rumah ibadah. Yaitu dalam konteks rekonsiliasi yang memuat klausul adanya kebebasan beragama dan pada konteks daerah yang masih menjadi milik mereka (tapi dikenakan upeti).¹⁰⁶

Larangan pendirian rumah ibadah ini didasarkan pada sabdanya Rasulullah Saw yang berbunyi;

لَا خِصَاءَ فِي الْإِسْلَامِ وَلَا كَنِيسَةَ

“Tidak boleh melakukan kebiri dan mendirikan gereja di daerah Islam”.¹⁰⁷

Selain itu, putusan tersebut juga berlandaskan pada alasan larangan mempublikasikan kekafiran.¹⁰⁸

2. Madzhab Maliki

Madzhab Maliki membagi status kenegaraan menjadi 3 jenis, yakni *'anawi*, *al-shulḥi* dan *Dār / balad al-islām*. Kategori *'anawi* adalah daerah yang ditaklukkan dengan peperangan, sedangkan jenis *al-shulḥi* adalah daerah yang ditaklukkan tanpa melalui ekspansi militer (gencatan senjata atau rekonsiliasi). Adapun jenis ketiga yang dimaksud adalah daerah yang sudah dihuni orang islam.¹⁰⁹

Pendirian rumah ibadah non muslim, dibedakan sesuai dengan status kenegaraannya. Berikut adalah klasifikasinya;

¹⁰⁵ 'Abidin, *Radd Al-Muhtar Ala Al-Durr Al-Mukhtar*. Juz 4 H. 203

¹⁰⁶ Al-Misri, *Al-Bahr Al-Raiq Syarh Kanz Al-Daqaiq*. Juz 5 H. 122

¹⁰⁷ Al-Zayla'i, *Tabyin Al-Haqaiq*. Juz 3 H. 280

¹⁰⁸ Burhanuddin Mahmud Mazzah, *Al-Muhit Al-Burhani* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, n.d.).

¹⁰⁹ Muhammad 'Ulaisy, *Minah Al-Jalil* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1984). Juz 3 H. 221

Tabel 4 Status Kenegaraan dan Implikasinya dalam Madzhab Maliki

No.	Status Kenegaraan	Implikasi
1.	' <i>Anawi</i> (daerah yang ditaklukkan dengan peperangan)	Diperinci, jika dalam penaklukkan ada klausul demikian dan kepala negara mengizininnya, maka diperbolehkan. Namun jika tiada, maka dilarang mendirikannya.
2.	<i>Al-shulhi</i> (daerah yang ditaklukkan tanpa peperangan atau rekonsiliasi)	Non Muslim diperbolehkan mendirikan rumah ibadah
3.	<i>Dār / balad al-islām</i> (daerah yang didirikan oleh orang islam)	Boleh mendirikan rumah ibadah non muslim, ketika ketiadaannya itu berdampak pada stabilitas negara.

Termasuk semakna dengan mendirikan rumah ibadah adalah merenovasinya.¹¹⁰ Keterangan serupa juga disampaikan oleh literatur yang menganotasinya, seperti karyanya Muḥammad bin Yūsuf Al-Gharnāthī,¹¹¹ Al-Kharsyī,¹¹² Muḥammad 'Ulaisy,¹¹³ Muḥammad Al-Ru'īni,¹¹⁴ 'Abdul Bāqī Al-Zurqānī,¹¹⁵ dan Al-Bannānī.¹¹⁶

Di antara contoh negara yang menurut Madzhab Maliki terkategoriikan sebagai '*anawi* atau '*anawah* adalah Fustat (Kairo lama, Mesir), Bashrah, Kufah (Irak), daerah Afrika, Syam (Suriah) dll. Namun, jika dalam peniadaannya ini berdampak pada stabilitas negara, maka non muslim diperbolehkan untuk mendirikan rumah ibadahnya bahkan pada daerah yang terkategoriikan sebagai

¹¹⁰ Kholil bin Ishaq, *Mukhtashar Khalil* (Kairo: Dar Al-Hadis, 2005). H. 92

¹¹¹ Muhammad bin Yusuf Al-Gharnathi, *Al-Taj Wa Al-Iklil* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2020).Juz 4 H. 499

¹¹² Muhammad bin Abdullah Al-Kharsy, *Syarh Mukhtashar Khalil* (Beirut: Dar Al-Fikr, n.d.). Juz 3 H. 148

¹¹³ 'Ulaisy, *Minah Al-Jalil*. Juz 3 H. 221

¹¹⁴ Muhammad Al-Ru'ini, *Mawahib Al-Jalil* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1992). Juz 3 H. 384

¹¹⁵ Abdul Baqi Al-Zurqani, *Syarh Al-Zurqani Ala Mukhtashar Khalil* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2012). Juz 3 H. 257

¹¹⁶ Muhammad Al-Bannani, *Al-Fath Al-Rabbani Fima Dzahala 'anhu Al-Zurqani* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2012). Juz 3 H. 257

Dār / balad al-islām sekalipun.¹¹⁷ Contoh daerah yang terkategoriikan sebagai *Dār / balad al-islām* adalah Kairo.¹¹⁸

Adapun alasan mengapa implikasi dari daerah '*anawi* dan '*al-shulhi* berbeda adalah karena tanah di daerah '*anawah* sudah menjadi harta *fay*' (harta yang diambil dari kepemilikan non muslim melalui jalur damai), sehingga dalam status kenegaraan '*anawah* ini tidak bisa serta merta mendirikan rumah ibadah bagi non muslim (kecuali dalam penaklukannya ada klausul kebolehan demikian).¹¹⁹

Adapun menurut Ibn Abdil Barr, alasan kenapa tidak boleh mendirikan rumah ibadah non muslim dalam daerah yang terkategoriikan sebagai '*anawah* adalah karena daerah tersebut otomatis menjadi wakaf bagi kemaslahatan kaum muslimin.¹²⁰ Sedangkan alasan kebolehan mendirikan rumah ibadah non muslim di daerah adalah karena daerah tersebut memang tanah milik mereka pada asalnya, sehingga tidak perlu izin ke kepala negara.¹²¹

Menurut Al-Dardīr, perjanjian berupa pendirian rumah ibadah dalam daerah '*anawah* ini harus dijadikan klausul dan diizini oleh kepala negara.¹²² Bahkan menurut komentatornya, kebolehan tersebut tanpa mempertimbangkan formulasi demografi dalam daerah tersebut. Sehingga ada atau tidaknya Muslim, asal telah mendapatkan izin dari seorang kepala negara, maka diperbolehkan bagi mereka. Demikian menurut penuturan Al-Shawi dalam anotasinya atas karya Al-Dardīr.¹²³

¹¹⁷ 'Ulaisy, *Minah Al-Jalil*. Juz 3 H. 221

¹¹⁸ Ahmad Al-Dardir, *Aqrab Al-Masalik Li Madzhab Al-Imam Malik* (Kairo: Dar Al-Ma'arif, n.d.). Juz 2 H. 314

¹¹⁹ Al-Zurqani, *Syarh Al-Zurqani Ala Mukhtashar Khalil*. Juz 3 H. 257

¹²⁰ Ibnu Abdi Al-Barr, *Al-Kafi Fi Fiqh Ahl Al-Madinah* (Riyadh: Maktabah Al-Riyadh Al-Haditsah, 1980). Juz 1 H. 482

¹²¹ Abul Hasan Al-Lakhmi, *Al-Tabshirah* (Qatar: Wizarat Al-Auqaf wa Al-Syu'un Al-Islamiyyah, 2011). Juz 10 H. 4969

¹²² Al-Dardir, *Aqrab Al-Masalik Li Madzhab Al-Imam Malik*. Juz 2 H. 314

¹²³ Abul Abbas Ahmad Al-Shawi, *Bulghat Al-Salik Li Aqrab Al-Masalik* (Beirut: Dar Al-Ma'arif, n.d.). Juz 2 H. 314

3. Madzhab Syafi'i

Imam Al-Nawāwī menyebutkan bahwasanya kebolehan mendirikan rumah ibadah non muslim ini ditinjau dari status kenegaraannya, berikut adalah klasifikasinya dan implikasinya;¹²⁴

Tabel 5 Status Kenegaraan dan Implikasinya dalam Madzhab Syafi'i

No.	Status Kenegaraan	Implikasi
1.	Daerah yang didirikan oleh umat Islam, seperti Bashrah, Kufah, Baghdad, Wasit (Irak) dan Kairo (Mesir). Dan juga daerah yang ditaklukkan tanpa perang atau rekonsiliasi. Seperti Yaman dan Madinah.	Tidak diperbolehkan mendirikan rumah ibadah non muslim.
2.	Daerah yang ditaklukkan dengan peperangan.	Tidak diperbolehkan mendirikan rumah ibadah non muslim, tapi rumah ibadah yang ada boleh digunakan.
3.	Daerah yang ditaklukkan melalui jalur rekonsiliasi, yakni tanpa peperangan	Diperinci. Jika dalam rekonsiliasi terdapat klausul bahwa status tanah masih milik mereka, namun mereka menyanggupi untuk membayar upeti, maka diperbolehkan mendirikan rumah ibadah dll. Sedangkan jika tanahnya menjadi milik orang Islam, maka kebebasan beragama disesuaikan dengan klausul dalam rekonsiliasi.

Keterangan Serupa Juga Disampaikan Oleh para komentator kitab tersebut, semua anotasi setuju dengan pendapat Imam Al-Nawāwī. Seperti Ibnu Hajar Al-Haitamī,¹²⁵ Pernyataan ini diafirmasi oleh *Muḥasyyī*-nya, yakni Al-Syarwānī,¹²⁶ dan Al-'Ubbādī.¹²⁷ Kemudian diusung juga oleh Imam Al-Ramlī,¹²⁸ yang juga

¹²⁴ Muhyiddin Yahya Al-Nawawi, *Minhaj Al-Thalibin Wa Umdat Al-Muftin* (Jeddah: Dar Al-Minhaj, 2021). H. 528

¹²⁵ Al-Haitami, *Tuhfat Al-Muhtaj Fi Syarh Al-Minhaj*. Juz 9 H. 293

¹²⁶ Abdul Hamid Al-Syarwani, *Hawasyi Syarwani Ala Tuhfat Al-Muhtaj* (Beirut: Dar Ihya' Turats Al-Arabi, 1983). Juz 9 H. 293

¹²⁷ Ibnu Qasim Al-Ubbadi, *Hawasyi Al-Ubbadi Ala Tuhfat Al-Muhtaj* (Beirut: Dar Ihya' Turats Al-Arabi, 1983). Juz 9 H. 293

diafirmasi oleh *Muḥasyiyī*-nya, yakni ‘Ali Syibrāmalisī,¹²⁹ dan Al-Rasyīdī.¹³⁰ Syekh Khathīb Al-Syirbinī,¹³¹ dan Imam Jalāl Al-din Al-Maḥallī,¹³² yang juga diafirmasi oleh *Muḥasyiyī*-nya, yakni Al-Qulyūbī,¹³³ dan ‘Umairah.¹³⁴

Dalil yang dijadikan landasan pelarangan pendirian rumah ibadah non muslim dalam konteks status yang pertama (daerah yang didirikan oleh umat Islam dan daerah yang ditaklukkan tanpa perang atau rekonsiliasi) adalah sabda Rasulullah Saw yang berbunyi;

لَا تُبْنَ كَنِيسَةً فِي الْإِسْلَامِ

“Tidak boleh mendirikan gereja di daerah Islam”.

Selain itu, nalar hukum ini juga berpijak pada logika bahwa yang demikian adalah kemaksiatan, sehingga tidak diperbolehkan. Baik yang demikian ini disyaratkan atau tidak.¹³⁵

Adapun contoh daerah yang ditaklukkan dengan peperangan adalah Mesir dan Isfahan (Iran). Sehingga dalam daerah tersebut tidak bisa dibangun rumah ibadah non muslim, bahkan jika ada yang roboh itu tidak bisa direnovasi. Alasannya adalah karena kaum Muslim mengekspansi daerah tersebut, sehingga

¹²⁸ Syamsuddin Al-Ramli, *Nihayat Al-Muhtaj Ila Syarh Al-Minhaj* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1984). Juz 8 H. 99

¹²⁹ Nuruddin Ali Al-Syibrāmalisī, *Hasyiyah Al-Syibrāmalisī Ala Al-Nihayat* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1984). Juz 8 H. 99

¹³⁰ Ahmad bin Abdur Razzaq Al-Rasyidi, *Hasyiyah Al-Rasyidi Ala Al-Nihayah* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1984). Juz 8 H. 99

¹³¹ Syamsuddin Al-Khatib Al-Syirbinī, *Mughni Al-Muhtaj Ila Ma’rifat Ma’ani Alfadz Al-Minhaj* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2020). Juz 6 H. 76

¹³² Jalaluddin Al-Mahalli, *Kanz Al-Raghibin* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1995). Juz 4 H. 235

¹³³ Ahmad Salamah Al-Qulyubi, *Hasyiyah Al-Qulyubi* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1995). Juz 4 H. 235

¹³⁴ Ahmad Al-Barlisi Umairah, *Hasyiyah Umairah* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1995). Juz 4 H. 235

¹³⁵ Khatib Syirbinī, *Iqna’ Fi Hall Alfadz Abi Syuja’* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2019). Juz 2 H. 538

kepemilikannya berpindah. Oleh karenanya daerah tersebut distatusi sebagai daerah Islam.¹³⁶

Sedangkan contoh daerah yang ditaklukkan melalui jalur rekonsiliasi dan membuat kesepakatan adalah Yerusalem (Baitul Maqdis, Palestina). Namun ketika dalam rekonsiliasi ini tidak ada klausul atau dimutlakkan, maka tidak ada kebebasan beragama bagi mereka. Namun menurut pendapat yang kedua (*muqābil al-ashah*), mereka difasilitasi dengan alasan mereka butuh kepadanya.¹³⁷

Adapun terkait status rumah ibadah yang sudah ada, maka dalam konteks daerah status pertama dan kedua ini boleh dirobohkan. Namun tidak boleh dirobohkan dalam daerah yang terkategori dalam status ketiga (adanya klausul kebebasan beragama).¹³⁸

Hanya saja, jika mereka membangun rumah ibadah yang baru dalam konteks daerah status pertama dan kedua, maka boleh dirobohkan.¹³⁹ Sedangkan rumah ibadah yang tidak diketahui asalnya, maka dibiarkan saja.¹⁴⁰

4. Madzhab Hambali

Ibnu Qudāmah menyampaikan bahwasanya dalam Madzhab Hambali ini dibagi menjadi 3 status kenegaraannya. Berikut adalah klasifikasi dan implikasinya;¹⁴¹

¹³⁶ Sulaiman Al-Bujairimi, *Tuhfat Al-Habib Ala Syarh Al-Khatib* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1995). Juz 4 H. 287

¹³⁷ Al-Ramli, *Nihayat Al-Muhtaj Ila Syarh Al-Minhaj*. Juz 8 H. 99

¹³⁸ Zakariyya Al-Anshari, *Fath Al-Wahhab* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1994). Juz 2 H. 221

¹³⁹ Sulaiman Jamal, *Futuhat Al-Wahhab Bi Taudih Syarh Manhaj Al-Thullab* (Beirut: Dar Al-Fikr, n.d.). Juz 5 H. 223

¹⁴⁰ Zakariyya Al-Anshari, *Asna Al-Mathalib Fi Syarh Raudh Al-Thalib* (Beirut: dar Al-kitab Al-Islami, n.d.). Juz 4 H. 219

¹⁴¹ Ibnu Muflih, *Al-Mubdi' Fi Syarh Al-Muqni'* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1997). Juz 3 H. 379

Tabel 6 Status Kenegaraan dan Implikasinya dalam Madzhab Hambali

No.	Status Kenegaraan	Implikasi
1.	Daerah yang didirikan oleh umat Islam, seperti Bashrah, Kufah, Baghdad, Wasit (Irak).	Tidak diperbolehkan mendirikan rumah ibadah non muslim.
2.	Daerah yang ditaklukkan dengan peperangan.	Tidak diperbolehkan mendirikan rumah ibadah non muslim, tapi rumah ibadah yang ada boleh digunakan.
3.	Daerah yang ditaklukkan tanpa peperangan atau rekonsiliasi	Diperinci. Jika dalam rekonsiliasi terdapat klausul bahwa status tanah masih milik mereka, namun mereka menyanggupi untuk membayar upeti, maka diperbolehkan mendirikan rumah ibadah dll. Sedangkan jika tanahnya menjadi milik orang Islam, maka kebebasan beragama disesuaikan dengan klausul dalam rekonsiliasi.

Keterangan Serupa Juga Disampaikan Oleh Ibn Abī Umar,¹⁴² ‘Alā’ Al-ddīn Al-Mardāwī,¹⁴³ Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah,¹⁴⁴ Musthafā Al-Rahibānī,¹⁴⁵ Aḥmad Al-Ba’lī,¹⁴⁶ Manshūr Al-Bahūtī,¹⁴⁷ dll.

Alasan mengapa dalam daerah yang no. 1 (didirikan umat Islam) tidak diperkenankan untuk mendirikan rumah ibadah non muslim adalah bahwa tanah tersebut merupakan milik orang islam, sehingga non muslim tidak bisa mengekspresikan keberagamaannya di sana. Intinya mereka dilarang untuk melakukan hal-hal yang melanggar syariat islam, seperti mendirikan rumah ibadah, minum-minuman keras, menggembala Babi dll. Logika hukum ini

¹⁴² Ibnu Abi Umar, *Al-Syarh Al-Kabir Ala Al-Muqni'* (Kairo: Hajr li Al-Thiba'ah, 1995). Juz 10 H. 460

¹⁴³ 'Alauddin Ali Al-Mardawi, *Al-Inshaf Fi Ma'rifat Al-Rajih Min Al-Khilaf* (Kairo: Hajr li Al-Thiba'ah, 1995). Juz 4 H. 192

¹⁴⁴ Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *Ahkam Ahl Al-Dzimmah* (Al-Damam: Ramadi, 1997). Juz 3 H. 1192-1209

¹⁴⁵ Musthofa bin Sa'ad Al-Rahibani, *Mathalib Uli Al-Nuha Fi Syarh Ghayat Al-Muntaha* (Beirut: Al-Maktab Al-Islami, 1994). Juz 2 H. 564-566

¹⁴⁶ Ahmad Al-Ba'li, *Al-Raudh Al-Nadi* (Riyadh: Al-Muassasah Al-Sa'idiyyah, n.d.). H. 202

¹⁴⁷ Manshur bin Yunus Al-Bahuti, *Al-Raudh Al-Murabbi' Syarah Zad Al-Mustaqni'* (Beirut: Muassasah Al-Risalah, n.d.). Juz 2 H. 189

berlandaskan pada hadis yang diriwayatkan oleh Ikrimah, bahwa ia mendengar Ibnu Abbas menyatakan;

أَيُّمَا مِصْرٍ مَصَّرْتُهُ الْعَرَبُ، فَلَيْسَ لِلْعَجَمِ أَنْ يَبْنُوا فِيهِ بَيْعَةً، وَلَا يَضْرِبُوا فِيهِ نَاقُوسًا، وَلَا يُشْرِبُوا فِيهِ خَمْرًا، وَلَا يَتَّخِذُوا فِيهِ خَنْزِيرًا. رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ، وَاحْتَجَّ بِهِ.

“Setiap daerah yang didirikan oleh orang Arab, maka non arab tidak boleh mendirikan rumah ibadah di daerah tersebut. Selain itu mereka juga dilarang membunyikan lonceng penanda ibadah, meminum minuman keras dan menggembala Babi”.

Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal, dan inilah yang dijadikan rujukan oleh madzhab ini.¹⁴⁸

Perlu dicatat bahwasanya dalam konteks daerah yang no. 3, ketika sudah ada klausul kebebasan beragama misalnya, maka wajib dipenuhi. Karena pada hakikatnya, tanah tersebut masih menjadi hak milik mereka, sehingga harus dihormati hak propertinya dan sebagainya.¹⁴⁹

Hanya saja, kepala negara lebih baik untuk memberikan klausul seperti halnya Sayyidina ‘Umar bin Khatthāb. Yakni tidak boleh mendirikan rumah ibadah dan mengekspresikan keberagamaannya secara terbuka. Demikian pula berlaku, dalam konteks rekonsiliasi mutlak (tiadanya klausul-klausul tertentu).¹⁵⁰

Adapun dalam konteks rumah ibadah yang ada, maka tidak wajib dirobohkan. Bahkan ketika berada di daerah yang berimplikasi haram untuk mendirikannya. Hanya saja, ketika ada yang rusak atau roboh, non muslim dilarang untuk merenovasinya. Sebab yang demikian ini semakna dengan merestorasi ulang.¹⁵¹ Hal ini didasarkan pada riwayat yang disampaikan oleh

¹⁴⁸ Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, *Al-Mughni* (Kairo: Maktabah Al-Qahirah, 1969). Juz 9 H. 354

¹⁴⁹ Manshur bin Yunus Al-Bahuti, *Daqaiq Uli Al-Nuha* (Irbid: Alam Al-Kutub, 1993). Juz 1 H. 666

¹⁵⁰ Al-Maqdisi, *Al-Mughni*. Juz 9 H. 354

¹⁵¹ Manshur bin Yunus Al-Bahuti, *Kasyyaf Al-Qanna’ an Matn Al-Iqna’* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2015). Juz 3 H. 133

Sayyidina ‘Umar bin Khatthāb bahwa “*tidak boleh membangun gereja di Negara Islam, dan yang roboh pun tidak boleh direnovasi*”.¹⁵²

Adapun dalil yang digunakan oleh kalangan yang tidak mewajibkan perobohan rumah ibadah yang sudah ada adalah riwayatnya Ibnu ‘Abbās juga, bahwa “*setiap tempat yang dimiliki oleh non muslim ini harus dihormati kesepakatannya*” dan faktanya semenjak zamannya sahabat itu tidak pernah merobohkan rumah ibadah non muslim yang sudah ada terlebih dahulu.¹⁵³ Oleh karenanya menurut Ibnu Muflih ada dua pendapat dalam konteks rumah ibadah yang sudah ada, yakni ada yang mewajibkan untuk merobohkannya dan tidak.¹⁵⁴

Adapun jika di daerah yang berstatuskan negara Islam, jika ada yang mendirikan rumah ibadah, maka wajib dirobohkan. Menurut Ibnu Taimiyyah, hal ini berlandaskan pada sabda Nabi Saw yang berbunyi “*tidak ada 2 kiblat dalam 1 negara*” dan riwayat dari ‘Umar bin Khatthāb yang berbunyi “*tidak ada gereja di daerah Islam*”.¹⁵⁵

B. Tinjauan Terkait Formulasi Angka

Berangkat dari pembahasan di atas, maka syarat berupa mendapatkan dukungan dari 60 warga sekitar ini tidak dikenal dalam pandangan 4 madzhab. Sebab formulasi angka ini tidak pernah disitir oleh Rasulullah Saw, melainkan terkait status kenegaraannya. Pola dari 4 madzhab terkait status kenegaraan ini sama, mereka mengklasifikasikannya menjadi 3. Lebih dari itu, implikasinya juga sama.

¹⁵² Al-Bahuti, *Al-Raudh Al-Murabbi’ Syarah Zad Al-Mustaqni’*. Juz 2 H. 189

¹⁵³ Al-Maqdisi, *Al-Mughni*. Juz 9 H. 354

¹⁵⁴ Ibnu Muflih, *Al-Mubdi’ Fi Syarh Al-Muqni’*. Juz 3 H. 379

¹⁵⁵ Ibnu Taimiyyah Al-Harrani, *Masalah Fi Al-Kanais* (Riyadh: Maktabah Al-’Ubaikan, n.d.). H. 145

Melansir dari laman kemlu (kementrian luar negeri), agama di sana terdiri dari Hindu 48,5%, Katolik Roma 26,3%, Muslim 17,3%, Kristen lainnya 6,4%, lainnya 0,6% dan ateis 0,7%.¹⁵⁸

Dalam undang-undangnya, regulasi pendirian rumah ibadah harus didasarkan pada desain yang diatur oleh negara. Jelasnya, tidak ada aturan spesifik terkait klausul berupa pengguna rumah ibadah.¹⁵⁹

Dari ketiga negara di atas, bisa diketahui bahwasanya formulasi angka juga tidak dikenal, intinya pendirian rumah ibadah harus berdasar kebutuhan. Seharusnya SKB 2 menteri yang menjadi payung hukum atas pendirian rumah ibadah juga memperhatikan hal demikian. Peraturan tersebut tampaknya mempersulit kelompok agama minoritas untuk membangun rumah ibadah, bahkan peraturan tersebut berimplikasi pada disharmoni umat beragama dan terganggunya persatuan dan kesatuan bangsa.¹⁶⁰

Sehingga patut rasanya, peraturan tersebut ditinjau ulang. Demi merealisasikan amanat konstitusi terkait kebebasan beragama, sehingga kerukunan antar umat beragama benar-benar terjadi.¹⁶¹ Padahal di negara-negara Eropa saja, tidak ada klausul demikian. Yakni negara memang hadir dalam proses pendirian, buktinya adalah kebijakan mereka tidak terlalu sulit untuk dipenuhi.¹⁶²

¹⁵⁸ "Mauritius," n.d., <https://www.kemlu.go.id/antananarivo/id/read/mauritius/4036/etc-menu>.

¹⁵⁹ "Design Guidance Places of Worship," n.d., https://housing.govmu.org/Documents/PlanningPolicy/PPG_3_Design_Guidance_Places_of_Worship.pdf.

¹⁶⁰ Hutabarat, "Evaluasi Terhadap Peraturan Bersama Menteri Tahun 2006 Tentang Pendirian Rumah Ibadah."

¹⁶¹ Arifinsyah and Sofian, "Regulation on Worship House Establishment and Implication towards Minority Relation of Religious People Majority in Indonesia."

¹⁶² Sulistiyo, Mashdurohatun, and Wahyuningsih, "Legal Reconstruction of the Requirement for the Establishment of the House of Worship Based on Justice Values."

C. Pemberian Izin Pendirian Rumah Ibadah Non Muslim

Di antara klausul yang sering mendapati kebuntuan dalam kasus pendirian rumah ibadah adalah pasal 14 ayat 2 poin b, yakni mendapatkan dukungan dari 60 warga sekitar. Sebab opini yang beredar di mereka adalah yang demikian haram hukumnya, karena andil dalam sebuah kemusyrikan atau kemaksiatan. Terlebih beberapa elit agama banyak yang memfatwakan demikian.¹⁶³

Berangkat dari nalar bahwa kasus yang diangkat ini tidak ada putusannya dalam teks keagamaan, maka peneliti membahasnya dengan metode *Ilhāq Al-Masāil bi Nazāirihā* (Analogi hukum). Oleh karenanya, peneliti menghimpun beberapa kasus yang serupa dengan titik fokus pada aspek *i'ānah alā al-ma'siyāt* (menolong orang lain dalam masalah kemaksiatan) dalam spektrum 4 madzhab, berikut adalah perinciannya;

1. Madzhab Hanafi

Berikut adalah beberapa kasus yang bersinggungan dengan konsep *i'ānah alā al-ma'siyāt* (menolong orang lain dalam masalah kemaksiatan) dalam Madzhab Hanafi;

Tabel 7 Contoh Kasus *I'ānah Alā Al-Ma'siyāt* Dalam Madzhab Hanafi

Kasus yang distatusi <i>i'ānah alā al-ma'siyāt</i>	Kasus yang tidak distatusi <i>i'ānah alā al-ma'siyāt</i>
Diharamkan untuk menunjukkan jalan pada non Muslim yang hendak beribadah ke rumah ibadahnya, menunjukkan jalan pada orang yang hendak berbuat kemaksiatan, ¹⁶⁴ dan mengantarkan orang tua yang non muslim ke rumah ibadahnya. Namun jika menjemputnya untuk pulang, ini	Menyewakan rumah untuk dijadikan rumah ibadah non muslim di daerah terpencil, menurut Abū Ḥanīfah ini boleh. Karena yang dipertimbangkan adalah aspek penyewaan kemanfaatan sebuah bangunan, dan adapun terkait dijadikan sebagai tempat maksiat itu adalah hal lain. namun kedua muridnya

¹⁶³ Alwi, "Ketika Tuhan Dikungkung Dalam Rumah Ibadah."

¹⁶⁴ Muhammad Al-Khadimi, *Bariqah Mahmudiyyah Fi Syarh Tariqat Muhammadiyyah Wa Syariat Nabawiyyah Fi Sirat Ahmadiyyah* (Aleppo: Mathba'ah Al-Halbi, n.d.). Juz 4 H. 9

tidak termasuk menolong kemaksiatan. ¹⁶⁵	(Abū Yūsuf dan Muḥammad Al-Syaibānī) menganggap itu adalah haram, karena <i>i'ānah alā al-ma'siyāt</i> . Adapun dalam konteks daerah Islam atau mayoritas muslim, maka kesemuanya sepakat tidak boleh. Sebab terbebani dengan mempropagandakan syariat Islam. ¹⁶⁶
Diharamkan membantu orang yang berihram untuk berburu hewan. ¹⁶⁷	Menjual perasan anggur atau membawakan minuman keras pada non muslim. ¹⁶⁸
Menjual senjata atau rakitannya pada orang yang memusuhi negara (<i>Ahl Al-Ḥarb</i>) dihukumi makruh <i>Tahrīm</i> . ¹⁶⁹	Membangun Rumah Ibadah Non Muslim, ¹⁷⁰ merenovasi gereja, ¹⁷¹ dan bekerja di Rumah ibadah non Muslim. ¹⁷²

Menurut Ibnu 'Ābidīn, klasifikasi kasus seperti di atas muncul sebab adanya pemetaan atas singgungannya dengan sesuatu yang dianggap kemaksiatan. Yakni jika menjadi pemicu langsung pada sebuah kemaksiatan, maka ini dianggap sebagai tindakan yang *i'ānah alā al-ma'siyāt* (menolong orang lain dalam masalah kemaksiatan). Contohnya seperti menjual budak kecil kepada orang yang terkenal dengan disorientasi seksual (Homo atau Lesby) atau menjual senjata pada orang yang akan menggunakannya untuk kejahatan. Adapun jika tidak bersinggungan secara langsung atau menjadi pemicu tidak langsung, maka tidak dianggap sebagai *i'ānah alā al-ma'siyāt*. Contohnya seperti, karena yang

¹⁶⁵ Nidzam Al-Din Al-Bulkhi, *Al-Fatawa Al-Hindiyyah* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2020). Juz 2 H. 250

¹⁶⁶ Afandi, *Majma' Al-Anhar*. Juz 2 H. 529

¹⁶⁷ Al-Sarakhsi, *Al-Mabsuth*. Juz 4 H. 96

¹⁶⁸ Al-Nasafi, *Kanz Al-Daqaiq*.

¹⁶⁹ 'Alauddin Muhammad Al-Hashkafi, *Al-Durr Al-Mukhtar* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2002). H.352

¹⁷⁰ 'Abidin, *Radd Al-Muhtar Ala Al-Durr Al-Mukhtar*. Juz 6 H. 391

¹⁷¹ Khalil Al-Nahlawi, *Al-Durar Al-Mubahah Fi Al-Hadzr Wa Al-Ibahah* (Maktabah Syamilah Al-Dzahbiyyah, n.d.). Juz 1 H. 76

¹⁷² Mazzah, *Al-Muhit Al-Burhani*. Juz 5 H. 362. Al-Zayla'i, *Tabyin Al-Haqaiq*. Juz 6 H. 29

demikian ini masih membutuhkan hal atau proses lain. seperti menjual komoditas yang menjadi rakitannya senjata.¹⁷³

Tabel 8 Klasifikasi *i'ānah alā al-ma'siyāt* perspektif Ibnu 'Ābidīn

Klasifikasi	Implikasi	Contoh
' <i>Ain Munkar</i> atau secara materilnya memang sebuah kemungkaran	Distatusi sebagai <i>i'ānah alā al-ma'siyāt</i> (menolong orang lain dalam masalah kemaksiatan) dan dihukumi Makruh <i>taḥrīm</i> .	Menjual senjata pada orang yang memusuhi negara (<i>Ahl Al- Ḥarb</i>).
' <i>Ain Ghair Munkar</i> atau secara materilnya memang bukan sebuah kemungkaran	Tidak distatusi sebagai <i>i'ānah alā al-ma'siyāt</i> (menolong orang lain dalam masalah kemaksiatan), sehingga dihukumi bukan Makruh. Karena kemaksiatannya tidak berdasarkan andilnya.	Menjual rakitannya senjata.

Pemetaan Ibnu 'Ābidīn di atas hanya berfokus pada kasus transaksional saja, Shalah Muhammad menambahkan bahwasanya dalam kasus non-transaksional juga demikian polanya. Yakni jika tidak menjadi faktor penentu utama dan masih ada usaha dari pelaku, maka tidak distatusi sebagai *i'ānah alā al-ma'siyāt* (menolong orang lain dalam masalah kemaksiatan) yang berimplikasi hukum haram.¹⁷⁴

Kalangan Ahnaf kontemporer lainnya, mengklasifikasikannya lebih detail lagi. Misalnya adalah Muḥammad Taqī Al-Uṣmānī yang menukil dari penjelasan ayahnya (Muḥammad Syafī'). Bahwa konsep *i'ānah alā al-ma'siyāt* (menolong orang lain dalam masalah kemaksiatan) ini diperinci dalam dua aspek, yaitu pemicu tidak langsung (*sabab al-ba'īd*) dan pemicu langsung (*sabab al-qarīb*). Menurutny, pemetaan ini sangat penting, sebab jika tidak demikian, maka tidak akan ada perkara mubah (boleh) di dunia. Misalnya dalam masalah bisnis pakaian, di mana yang memakai itu bisa siapa saja. Sehingga jika tidak dipetakan dengan

¹⁷³ 'Abidin, *Radd Al-Muhtar Ala Al-Durr Al-Mukhtar*. Juz 4 H. 268, Juz 6 H. 391

¹⁷⁴ Sholah Muhammad, *Khulashah Al-Kalam Fi Masalah Al-I'ānah Ala Al-Haram Fi Al-Madzhab Al-Hanafī* (Amman: Markaz Anwar Al-Ulama' Li Al-Dirasat, 2020). H. 67

konsep pemicu langsung dan tidak, niscaya akan dosa terus. Sebab pakaian yang dijual, akan dipakai oleh orang-orang nir adab.¹⁷⁵ Berikut adalah klasifikasinya,¹⁷⁶

Tabel 9 Klasifikasi *i'ānah alā al-ma'ṣiyāt* perspektif Taqi Al-Utsmānī

Klasifikasi	Implikasi	Contoh
Pemicu tidak langsung (<i>sabab al-ba'īd</i>)	Makruh <i>Tanzīh</i> .	Menjual rakitan senjata pada orang yang akan menggunakannya dalam kemaksiatan.
Pemicu langsung (<i>sabab al-qarīb</i>) dibagi lagi menjadi 2.	Pertama, pemicu langsung yang dihukumi haram. Yakni dalam konteks jika bukan karenanya, maka tidak akan terjadi kemaksiatan. Sedangkan yang kedua, ada pemicu langsung yang menjadi penentu terjadinya maksiat dan ini dihukumi haram karena disamakan dengan perilaku <i>i'ānah alā al-ma'ṣiyāt</i> (menolong orang lain dalam masalah kemaksiatan). Kemudian yang kedua adalah pemicu langsung tapi membutuhkan <i>fi'l al-mukhtār</i> (adanya upaya dari pelaku). Hukumnya diperinci, jika mengetahui akan digunakannya dalam kemaksiatan, dihukumi haram. Sedang jika tidak mengetahuinya, dianggap udzur.	Contoh pertama seperti menjual senjata pada orang yang akan menggunakannya dalam kemaksiatan dan contoh kedua seperti menjual sesuatu yang akan dijadikan minuman keras.

Oleh karenanya, berangkat dari paradigma yang telah disebutkan. Maka kasus yang diangkat peneliti tidak dihukumi sebagai *i'ānah alā al-ma'ṣiyāt* (menolong orang lain dalam masalah kemaksiatan), sebab pemberian izin pendirian rumah ibadah ini tidak menjadi pemicu langsung dan faktor penentu utama. Buktinya adalah bahwa hanya dengan memberikan perizinan ini tidak otomatis membuat mereka bisa beribadah, yakni masih membutuhkan hal lain (membangun, menyiapkan acara dan sebagainya). Terlebih lagi dalam Madzhab Hanafi dihukumi boleh untuk bekerja pada non muslim, bahkan untuk membangun

¹⁷⁵ Muhammad Taqi Al-Utsmani, *Buhuts Wa Qadhaya Fiqhiyyah Mu'ashirah* (Damaskus: Dar Al-Qalam, 2003). H. 360

¹⁷⁶ Al-Utsmani. H. 361-362

rumah ibadah untuknya. Di samping itu, kasus non-transaksional tidak akan dihukumi *i'ānah alā al-ma'ṣiyāt* (menolong orang lain dalam masalah kemaksiatan) yang diharamkan ketika masih ada membutuhkan *fi'l al-mukhtār* (adanya upaya lebih lanjut dari pelaku).¹⁷⁷

Berikut adalah rangkuman dari parameter dan implikasi konsep *i'ānah alā al-ma'ṣiyāt* (menolong orang lain dalam masalah kemaksiatan) menurut beberapa ulama' Hanafi;

¹⁷⁷ Muhammad, *Khulashah Al-Kalam Fi Masalah Al-I'annah Ala Al-Haram Fi Al-Madzhab Al-Hanafi*. H. 67

ضوابط الإعانة على العصية عند الأحناف



Namun sebagaimana penukilan dari Taqi Al-Ustmānī (di atas), Abdur Rahman Afandī,¹⁷⁸ Al-Zayla’ī,¹⁷⁹ dan Al-Syalbī,¹⁸⁰ bahwa sebagai tindakan preventif agar tidak distatusi sebagai *i’ānah alā al-ma’šiyāt* (menolong orang lain dalam masalah kemaksiatan). Maka seyogyanya seorang Muslim dalam memberikan perizinannya, diniati sebagai menjalankan amanat konstitusi berupa jaminan kebebasan beragama. Konklusi ini berangkat dari nalar hukum sebagai berikut;

Tabel 10 Penerapan Teori *Ilhāq* dalam Madzhab Hanafi

<i>Mulhāq</i> (kasus yang akan dianalogikan hukumnya)	<i>Mulhāq bih</i> (kasus yang dijadikan sebagai padanan hukum)	<i>Wajh al-ilhāq</i> (sisi keserupaan substansi)	Implikasi Hukum
Membangun rumah ibadah Non Muslim	Pemberian izin pendirian rumah ibadah Non Muslim	Fasilitator dalam keberagamaan	Boleh

Dengan demikian bisa dipahami bahwa dengan menggunakan skema teori *Ilhāq Al-Masāil bi Nazāirihā* (Analogi hukum), bisa ditarik kesimpulan bahwa Madzhab Hanafi menghukumi boleh dan tidak dianggap sebagai tindakan *i’ānah alā al-ma’šiyāt* (menolong orang lain dalam masalah kemaksiatan) dalam kasus memberikan izin pendirian rumah ibadah non muslim.

❖ Catatan

Klasifikasi hukum dalam Madzhab Hanafi terdapat perbedaan dengan mayoritas, yakni dalam madzhab ini terdapat istilah makruh *tahrīm* dan makruh *tanzīh*. Selain itu haram juga beda dengan *makruh tahrīm*, yakni hukum haram ini berdasarkan dalil yang *qath’ī* (dalil yang eksplisit), sedangkan *makruh tahrīm* berdasarkan dalil yang *dzannī* (dalil yang implisit, sehingga mengandung

¹⁷⁸ Afandi, *Majma’ Al-Anhar*. Juz 2 H. 529

¹⁷⁹ Al-Zayla’ī, *Tabyin Al-Haqaiq*. Juz 6 H. 28

¹⁸⁰ Al-Syalbi, *Tabyin Al-Haqaiq Wa Hasyiyah Al-Syalbi* (Kairo: Al-Mathba’ah Al-Kubro Al-Amiriyah, 1990). Juz 6 H. 28

penafsiran lain).¹⁸¹ Berikut adalah penjelasan terkait klaisifikasi dari hukum makruh;

- 1) Makruh *Tahrīm*. Yakni suatu hukum yang mendekati taraf haram, oleh karenanya ada juga yang menyebutnya dengan istilah *haram dzanni*. Hanya saja, ketika terminologi makruh dimutlakkan, maka yang dimaksud dengannya adalah Makruh *Tahrīm*.
- 2) Makruh *Tanzīh*. Yakni lebih baik ditinggalkan. Terminologi ini sinonim dengan istilah *khilāf al-aulā*.¹⁸²

2. Madzhab Maliki

Berikut adalah beberapa kasus yang bersinggungan dengan konsep *i'ānah alā al-ma'siyāt* (menolong orang lain dalam masalah kemaksiatan) dalam Madzhab Maliki;

- 1) Diharamkan menjual lahan yang akan dibangun rumah ibadah non muslim atau menjual komoditas yang akan dijadikan sesembahan oleh non muslim atau tempat maksiat.¹⁸³ Demikian pula bekerja pada non muslim, jika pekerjaannya berupa sesuatu yang dilarang syariat.¹⁸⁴ Akan tetapi ada juga yang mengatakan demikian ini makruh,¹⁸⁵ namun Imam Malik sendiri melarang hal demikian.¹⁸⁶

¹⁸¹ Badruddin Muhammad Al-Zarkasyi, *Al-Bahr Al-Muhit Fi Ushul Al-Fiqh* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2000). Juz 1 H. 239

¹⁸² Ibnu Al-Sa'ati, *Majma' Al-Bahrayn Wa Multaqa Al-Nayyirayn Fi Al-Fiqh Al-Hanafi* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2005). H. 24

¹⁸³ 'Ulaisy, *Minah Al-Jalil*. Juz 4 H. 443

¹⁸⁴ Ibnu Jazi Al-Kalbi Al-Gharnathi, *Al-Qawanin Al-Fiqhiyyah* (Maktabah Syamilah Al-Haditsah, n.d.), <https://shamela.ws/book/6193>. H. 117

¹⁸⁵ Ibnu Rusyd Al-Jad, *Al-Bayan Wa Al-Tahsil* (Beirut: Dar Al-Gharb Al-Islami, 1988). Juz 18 H. 613

¹⁸⁶ Imam Malik, *Al-Mudawwanah* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2020). Juz 3 H. 435

- 2) Diharamkan menjual anggur pada orang yang akan menjadikannya sebagai minuman keras,¹⁸⁷ dan menjual senjata pada orang yang akan memerangi kaum Muslimin.¹⁸⁸
- 3) Diharamkan meminjamkan hewan kepada orang yang akan menggunakannya untuk membahayakan orang lain.¹⁸⁹ Oleh karenanya, tidak boleh meminjamkan sesuatu pada orang lain yang akan menggunakannya pada hal-hal yang dilarang.¹⁹⁰
- 4) Diharamkan mengajarkan ilmu pada seseorang yang niatnya salah, seperti yang bersangkutan bertujuan memiliki ilmu untuk diriya'kan atau merasa lebih baik dari orang lain. Pandangan ini juga diusung oleh Al-Ghazālī (prolog di kitab *bidāyat al-hidāyah*).¹⁹¹
- 5) Suami yang men-*dzhār* (menyerupakan istrinya dengan ibunya) istrinya dan belum membayar *kafārat* (tebusan), maka istri diwajibkan menjauhi suaminya (menghindari terjadinya hal-hal yang hanya bisa dilakukan suami istri). Jika tidak, maka istri berdosa, karena dianggap melakukan *i'ānah alā al-ma'ṣiyāt* (menolong orang lain dalam masalah kemaksiatan).¹⁹²

Namun terdapat pengecualian dari kasus yang dianggap sebagai *i'ānah alā al-ma'ṣiyāt* (menolong orang lain dalam masalah kemaksiatan), yaitu dalam konteks bertentangan dengan kewajiban. Contohnya adalah Ibnu Rusyd Al-Jad memberikan permisalan dalam kasus seorang anak yang beragama Islam

¹⁸⁷ Al-Ru'ini, *Mawahib Al-Jalil*. Juz 4 H. 253

¹⁸⁸ Al-Gharnathi, *Al-Taj Wa Al-Iklil*. Juz 6 H. 183

¹⁸⁹ Abu Al-Abbas Al-Qarafi, *Al-Dzakhirah* (Beirut: Dar Al-Gharb Al-Islami, 1994). Juz 6 H. 200

¹⁹⁰ Al-Lakhmi, *Al-Tabshirah*. Juz 13 H. 6016

¹⁹¹ Al-Qarafi, *Al-Dzakhirah*. Juz 1 H. 52

¹⁹² Ahmad Al-Dardir, *Al-Syarh Al-Kabir* (Beirut: Dar Al-Fikr, n.d.). Juz 2 H. 445

diperintahkan orang tuanya yang beragama non muslim, di mana yang bersangkutan tidak mampu berangkat ke rumah ibadahnya (seperti karena sudah tua atau tuna netra). Maka anak tersebut wajib mengantarkannya, sebab kewajiban berbakti kepada orang tua ini tidak ada kaitannya dengan spiritualnya, yakni fasik atau musyrik sekalipun tetap wajib dipenuhi.¹⁹³

Bahkan Al-Nafrāwī berpandangan bahwa ketika seorang anak dimintai uang untuk perayaan keagamanya, tetap wajib dipenuhi. Kecuali jika orang tuanya minta uang untuk operasional rumah ibadahnya (iuran, renovasi, kebersihan dll) atau angpau untuk elit agamanya (pastor, rahib, biksu dll), maka tidak wajib memberikannya.¹⁹⁴

Dengan demikian bisa dipahami bahwa dengan menggunakan skema teori *Ilhāq Al-Masāil bi Nazāirihā* (Analogi hukum), bisa ditarik kesimpulan bahwa Madzhab Maliki menghukumi Haram dalam kasus memberikan izin pendirian rumah ibadah non muslim. Sebab yang demikian ini dianggap sebagai tindakan *i'ānah alā al-ma'siyāt* (menolong orang lain dalam masalah kemaksiatan).

Berikut adalah skema nalar hukumnya;

Tabel 11 Penerapan Teori Ilhāq dalam Madzhab Maliki

<i>Mulhāq</i> (kasus yang akan dianalogikan hukumnya)	<i>Mulhāq bih</i> (kasus yang dijadikan sebagai padanan hukum)	<i>Wajh al-ilhāq</i> (sisi keserupaan substansi)	Implikasi Hukum
Menyewakan atau menjual lahannya untuk dijadikan rumah ibadah Non Muslim dan kasus lain yang telah disebutkan di atas	Pemberian izin pendirian rumah ibadah Non Muslim	Fasilitator dalam keberagaman non muslim atau kemaksiatan	Tidak boleh

¹⁹³ Al-Jad, *Al-Bayan Wa Al-Tahsil*. Juz 4 H. 205

¹⁹⁴ Syihabuddin Al-Nafrāwī, *Al-Fawakih Al-Dawani* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1995). Juz 2 H. 290

Namun jika menggunakan logika hukum yang digunakan oleh Ibnu Rusyd Al-Jad dan Al-Nafrāwī, bahwa sebuah kasus yang bersinggungan dengan konsep *i'ānah alā al-ma'ṣiyāt* (menolong orang lain dalam masalah kemaksiatan) ini bisa dikalahkan dengan sebuah kewajiban. Maka kasus pemberian izin pendirian rumah ibadah non muslim bisa juga dianalogikan dengan kasus mengantarkan orang tua yang beragama non muslim untuk beribadah, dengan mempertimbangkan aspek kewajiban yang sama.

Yakni jika dalam kasus mengantarkan orang tua adalah kewajiban untuk taat kepadanya, sedangkan dalam konteks memberikan perzinan pendirian ini adalah bagian dari menaati amanat konstitusi dan pemerintah yang menjamin kebebasan beragama. Di mana mengikuti perintah dari pemerintah ini wajib dilakukan jika berdasar pada kemaslahatan, dan dalam konteks ini adalah menjaga stabilitas negara.¹⁹⁵

3. Madzhab Syafi'i

Berikut adalah beberapa kasus yang bersinggungan dengan konsep *i'ānah alā al-ma'ṣiyāt* (menolong orang lain dalam masalah kemaksiatan) dalam Madzhab Syafi'i;

- 1) Diharamkan menunjukkan jalan pada non muslim yang bertanya lokasi rumah ibadahnya, haram bagi seorang muslim untuk memberitahunya.¹⁹⁶
- 2) Haram bekerja pada non muslim untuk membangun rumah ibadahnya.¹⁹⁷

¹⁹⁵ Ibnu Rusyd Al-Jad, *Al-Muqaddimat Al-Mumahhidat* (Beirut: Dar Al-Gharb Al-Islami, 1988). Juz 2 H. 254

¹⁹⁶ Ibnu Hajar Al-Haitami, *Al-Fatawa Al-Fiqhiyyah Al-Kubro* (Al-Maktabah Al-Islamiyyah, n.d.), <https://shamela.ws/book/21628>. Juz 4 H. 248

- 3) Diharamkan mewakafkan sesuatu untuk pembangunan rumah ibadah non muslim atau kepentingannya seperti renovasi, karena yang demikian adalah suatu kemaksiatan.¹⁹⁸
- 4) Jika orang yang bermadzhab Syafi'i menjual sesuatu kepada orang lain yang misalnya menurut madzhab yang dianutnya itu sesuatu yang haram, maka penjual yang bermadzhab Syafi'i ini dosa.¹⁹⁹ Atau misalnya ada orang Maliki bertransaksi secara *Mu'āthah* (transaksi tanpa adanya sighat atau redaksi serah terima) dengan orang yang bermadzhab Syafi'i, maka orang Maliki tadi berdosa karena andil dalam kemaksiatannya orang syafi'i tadi, di mana dalam madzhabnya itu diharamkan.²⁰⁰
- 5) Haram mendatangi acara yang diselenggarakan oleh orang yang terindikasi bahwa mayoritas hartanya berstatus haram, akan tetapi hanya dihukumi makruh dalam konteks sebatas praduga saja.²⁰¹
- 6) Menjual hewan untuk diadu, sutra pada orang yang tidak boleh menggunakannya, anggur pada orang yang diduga akan menjadikannya minuman keras, dan menjual makanan pada non muslim atau orang muslim yang tidak berpuasa di siang ramadhan (tanpa ada udzur yang syar'i),²⁰² dan menjual senjata pada orang yang akan menggunakannya pada kemaksiatan.²⁰³

¹⁹⁷ Al-Qulyubi, *Hasyiyah Al-Qulyubi*.Juz 3 H. 71

¹⁹⁸ Al-Mahalli, *Kanz Al-Raghibin*. Juz 3 H. 101

¹⁹⁹ Jamal Sulaiman Al-Ujaili, *Futuhat Al-Wahhab Bi Taudih Syarh Manhaj Al-Thullab* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2020). Juz 3 H. 9

²⁰⁰ Al-Rasyidi, *Hasyiyah Al-Rasyidi Ala Al-Nihayah*. Juz 3 H. 465

²⁰¹ Al-Bujairimi, *Tuhfat Al-Habib Ala Syarh Al-Khatib*. Juz 3 H. 255

²⁰² Zainuddin Al-Malibari, *Fath Al-Mu'in* (Riyadh: Dar Ibnu Hazm, 2009). H. 326

²⁰³ Muhammad bin Umar Al-bantani, *Nihayat Al-Zain Fi Irsyad Al-Mubtadi'in* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2019). H. 229

- 7) Menjual sesuatu yang akan dijadikan sarana penyembahan non muslim atau dijadikan sebagai bahan alutsista. Semua transaksi ini dihukumi haram jika ada dugaan kuat bahwa akan dioperasikan untuk kemaksiatan, tapi status transaksinya tetap sah. Adapun jika sebatas dugaan yang tak berdasar, maka makruh. Selain itu, haram juga menghutangi orang yang akan menggunakannya dalam kemaksiatan.²⁰⁴

Dengan demikian bisa dipahami bahwa dengan menggunakan skema teori *Ilhāq Al-Masāil bi Nazāirihā* (Analogi hukum), bisa ditarik kesimpulan bahwa Madzhab Syafi'i menghukumi tidak boleh (haram) dalam kasus memberikan izin pendirian rumah ibadah non muslim. Sebab yang demikian ini dianggap sebagai tindakan *i'ānah alā al-ma'siyāt* (menolong orang lain dalam masalah kemaksiatan). Berikut adalah skema nalar hukumnya;

Tabel 12 Penerapan Teori Ilhāq dalam Madzhab Syafi'i

<i>Mulhāq</i> (kasus yang akan dianalogikan hukumnya)	<i>Mulhāq bih</i> (kasus yang dijadikan sebagai padanan hukum)	<i>Wajh al-ilhāq</i> (sisi keserupaan substansi)	Implikasi Hukum
Bekerja untuk membangun rumah ibadah Non Muslim dan kasus lain yang telah disebutkan di atas	Pemberian izin pendirian rumah ibadah Non Muslim	Fasilitator dalam keberagaman non muslim atau kemaksiatan	Tidak boleh

Hanya saja terdapat catatan penting dari 'Izzuddin bin Abdis Salām, bahwa terkadang diperbolehkan untuk *i'ānah alā al-ma'siyāt* (menolong orang lain dalam masalah kemaksiatan). Bukan dalam rangka menolong seseorang untuk berbuat kemaksiatan, melainkan fokus pada dampak kemaslahatan yang lebih

²⁰⁴ Al-Bakri, *I'ānah Al-Thalibin Fi Hall Alfadz Fath Al-Mu'in*. Juz 3 H. 29 Juz 3 H. 100

besar. Sehingga diperbolehkan untuk membantu kemaksiatan jika yang demikian ini menjadi perantara untuk menggapai maslahat yang agung.²⁰⁵

Meski secara sekilas terlihat membantu terjadinya dosa, kefasikan dan kemaksiatan, tapi hal demikian merupakan upaya untuk terhindar dari suatu mafsadah. Maka bentuk membantu terjadinya dosa, permusuhan, kefasikan dan kemaksiatan adalah hanya sebatas platform bukan suatu tujuan.²⁰⁶

Dalam kasus yang diangkat oleh peneliti, kemaslahatannya adalah menjaga stabilitas negara. Terlebih ‘Izzudin juga menekankan bahwasanya seorang warga negara diwajibkan untuk membantu para *Qādhī* (penegak hukum) dan pemimpin atas tugas yang telah diwajibkan atas mereka. Meliputi tugas untuk memberikan pengarahan, menolak kerusakan, menjaga negara, merekrut pasukan keamanan, serta mencegah para perusak dan penghianat bangsa.²⁰⁷

4. Madzhab Hambali

Berikut adalah beberapa kasus yang bersinggungan dengan konsep *i’ānah alā al-ma’ṣiyāt* (menolong orang lain dalam masalah kemaksiatan) dalam Madzhab Hambali;

- 1) Diharamkan menyewakan lahan atau bangunan yang akan dijadikan sebagai rumah ibadah non muslim,²⁰⁸ atau akan difungsikan sebagai tempat maksiat seperti kedai minuman keras atau perjudian.²⁰⁹
- 2) Diharamkan mewakafkan sesuatu untuk penulisan kitab Taurat dan Injil atau mewakafkan sesuatu untuk kemaksiatan seperti dijadikan

²⁰⁵ Salam, *Qawaid Al-Ahkam Fi Mashalih Al-Anam*. Juz 1 H. 8^v

²⁰⁶ Salam. Juz 1 H. 29

²⁰⁷ Salam. Juz 1 H. 134

²⁰⁸ Al-Rahibani, *Mathalib Uli Al-Nuha Fi Syarh Ghayat Al-Muntaha*. Juz 3 H. 606

²⁰⁹ Al-Bahuti, *Daqaiq Uli Al-Nuha*. Juz 2 H. 250

rumah ibadah non muslim atau diberikan kepada orang yang dikenal terbiasa melakukan maksiat.²¹⁰

- 3) Diharamkan memberikan zakat pada orang pailit yang menghabiskan uangnya untuk kemaksiatan (uangnya dibuat untuk zina, judi, minum-minuman keras dll), sebelum yang bersangkutan bertaubat.²¹¹
- 4) Diharamkan menjual senjata pada orang yang diduga akan menggunakannya untuk tindak kriminal.²¹²
- 5) Diharamkan memberikan jasa tulis untuk penulisan perkataan dan syair yang diharamkan, pernyataan yang bid'ah dll.²¹³

Dengan demikian bisa dipahami bahwa dengan menggunakan skema teori *Ilhāq Al-Masāil bi Nazāirihā* (Analogi hukum), bisa ditarik kesimpulan bahwa Madzhab Hambali menghukumi tidak boleh (haram) dalam kasus memberikan izin pendirian rumah ibadah non muslim. Sebab yang demikian ini dianggap sebagai tindakan *i'ānah alā al-ma'ṣiyāt* (menolong orang lain dalam masalah kemaksiatan). Berikut adalah skema nalar hukumnya;

Tabel 13 Penerapan Teori Ilhāq dalam Madzhab Hambali

<i>Mulhāq</i> (kasus yang akan dianalogikan hukumnya)	<i>Mulhāq bih</i> (kasus yang dijadikan sebagai padanan hukum)	<i>Wajh al-ilhāq</i> (sisi keserupaan substansi)	Implikasi Hukum
Menyewakan atau menjual lahannya untuk dijadikan rumah ibadah Non Muslim	Pemberian izin pendirian rumah ibadah Non Muslim	Fasilitator dalam keberagaman non muslim atau kemaksiatan	Tidak boleh

²¹⁰ Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, *Al-Kafi Fi Fiqh Al-Imam Ahmad* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2020). Juz 2 H. 251

²¹¹ Al-Maqdisi, *Al-Mughni*. Juz 6 H. 480

²¹² Muflih, *Al-Mubdi' Fi Syarh Al-Muqni'*. Juz 4 H. 416

²¹³ Al-Bahuti, *Kasyyaf Al-Qanna' an Matn Al-Iqna'*. Juz 3 H. 559

D. Tinjauan Dalil Atas Kasus *i'ānah alā al-ma'siyāt*

Berangkat dari pembahasan di atas, maka kasus pemberian izin dari seorang Muslim untuk pendirian rumah ibadah non muslim dengan menggunakan teori *Ilhāq Al-Masā'il bi Nazāirihā* (Analogi hukum) yang berpijak pada aspek *i'ānah alā al-ma'siyāt* (menolong orang lain dalam masalah kemaksiatan) dalam pandangan 4 madzhab. Hukumnya diklasifikasikan sebagai berikut;

Tabel 14 Pandangan 4 Madzhab Atas Fokus Penelitian Kedua

No.	Madzhab	Implikasi Hukum pada kasus
1.	Hanafi	Boleh, karena tidak dianggap sebagai tindakan <i>i'ānah alā al-ma'siyāt</i> (menolong orang lain dalam masalah kemaksiatan). Sebab tidak menjadi pemicu langsung dan faktor utama.
2.	Maliki	Tidak boleh, karena dianggap sebagai tindakan <i>i'ānah alā al-ma'siyāt</i> (menolong orang lain dalam masalah kemaksiatan). Namun jika menginduk pada logika hukum yang dibangun oleh Ibnu Rusyd Al-Jad dan Al-Nafrawi, yang memprioritaskan kewajiban dari pada demikian, maka boleh juga.
3.	Syafi'i	Tidak boleh, karena dianggap sebagai tindakan <i>i'ānah alā al-ma'siyāt</i> (menolong orang lain dalam masalah kemaksiatan)
4.	Hambali	Tidak boleh, karena dianggap sebagai tindakan <i>i'ānah alā al-ma'siyāt</i> (menolong orang lain dalam masalah kemaksiatan)

Namun perlu diketahui, bahwasanya 4 madzhab sepakat terkait keharaman menolong orang lain dalam kemaksiatan. Berdasarkan firman Allah Swt dalam QS. Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi;

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Janganlah kalian tolong menolong dalam kemaksiatan”.²¹⁴

Hanya saja terdapat perbedaan atas pembacaan mereka pada sesuatu yang dianggap sebagai menolong kemaksiatan. Setidaknya bisa dipetakan menjadi 2, di mana pandangan madzhab Hanafi berbeda dengan 3 madzhab lainnya dalam

²¹⁴ Ibnu Hazm Al-Andalusi, *Al-Muhalla Bi Al-Atsar* (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2016). Juz 12 H. 377

parameter konsep *i'ānah alā al-ma'ṣiyāt* (menolong orang lain dalam masalah kemaksiatan). Oleh karenanya terjadi perbedaan antara Madzhab Hanafi dengan 3 madzhab lainnya.²¹⁵

Hal demikian diamini oleh Wahbah Al-Zuhailī yang menyatakan bahwasanya sikap 4 madzhab ini terbagi 2 (sebagaimana pola di atas) dalam menyikapi hadis tentang pelaknatan pelaku Riba dan khamar. Di mana siapapun yang menjadi fasilitator dalam dua kemaksiatan tadi juga dianggap berdosa, alasannya adalah karena menolong orang lain untuk melakukan maksiat. Harusnya yang terbersit dalam pikiran tentunya yang berdosa adalah hanya yang memakan riba dan khamar, namun ternyata Rasulullah Saw melaknat siapapun yang menolong kemaksiatan tadi.²¹⁶

Adapun sikap madzhab Hanafi yang berbeda dengan 3 madzhab lainnya. Bahwa fasilitator dalam dua kemaksiatan tadi yang dilaknat, seperti pihak yang memproduksi, menjual, membawakan, menuangkan khamr dan saksi riba, pencatatnya dll. Ini tidak bisa dihukumi sebagai orang yang berdosa juga karena menolong orang lain untuk berbuat maksiat, sebab maksiat tersebut hanya berdasar pada pilihan pelaku sendiri. Sehingga tidak ada kaitannya dengan para fasilitator, terlebih anotasi Abū Ḥanīfah sendiri berbeda dengan yang lainnya. Yakni fasilitator yang dikenai laknat dalam maksiat riba dan khamr adalah pihak yang memiliki tujuan untuk kemaksiatan, jika tidak demikian maka tidak dilaknat.²¹⁷

²¹⁵ Wizaratul Awqaf was Syu'unul Islamiyyah, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah* (Kuwait: Wazaratul Awqaf was Syu'unul Islamiyyah, 2002). Juz 9 H. 208

²¹⁶ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh* (Damaskus: Dar Al-Fikr Al-Mu'ashir, 2015). Juz 7 H. 5518

²¹⁷ Al-Zuhaili. Juz 4 H. 2668

Pandangannya Wahbah Al-Zuhailī ini telah dibahas oleh ulama' Ahnaf, misalnya adalah Ibnu 'Ābidīn, Al-Zayla'ī dan Abdur Rahman Afandī. Imam Abū Ḥanīfah memang memetakan kasus yang bisa dianggap sebagai menolong kemaksiatan atau tidak, tergantung pada sikap yang bersangkutan ini menjadi faktor penentu terlaksananya kemaksiatan (sehingga berimplikasi pada status menolong kemaksiatan seperti mengantarkan non muslim ke rumah ibadahnya) atau malah masih membutuhkan usaha dari pelaku (seperti melayani orang yang minum khamr, di mana ini tidak dianggap dengan sikap menolong kemaksiatan).²¹⁸

Hal ini berbeda dengan dua *Ashāb*-nya, yaitu Abū Yūsuf dan Muḥammad Al-Syaibānī. Dalam kasus menjadi fasilitator riba dan Khamr, keduanya menganggap bahwa sikap demikian adalah menolong kemaksiatan.²¹⁹ Perbedaan ini muncul dari nalar hukum yang dibangun, yakni Abu Hanifah menggunakan *qiyās*, sedangkan kedua *Ashāb*-nya menggunakan metode *istiḥsān*.²²⁰

Oleh karenanya bisa ditarik kesimpulan bahwasanya 4 madzhab terbagi menjadi dua, antara Madzhab Hanafi dan 3 lainnya. Kalangan mayoritas berpendapat bahwa siapapun yang menjadi faktor penolong atau fasilitator orang lain untuk berbuat kemaksiatan, maka yang bersangkutan dihukumi juga sebagai pelaku maksiat. Sedangkan menurut Hanafi, tidak demikian. Ditinjau terlebih dahulu, apakah menjadi faktor penentu terjadinya kemaksiatan dan diniati sebagai

²¹⁸ Afandi, *Majma' Al-Anhar*. Juz 2 H. 529

²¹⁹ 'Abidin, *Radd Al-Muhtar Ala Al-Durr Al-Mukhtar*. Juz 4 H. 268, Juz 6 H. 391

²²⁰ Al-Zayla'i, *Tabyin Al-Haqaiq*. Juz 6 H. 29

menolong kemaksiatan atau tidak. Kecuali Abū Yūsuf dan Muḥammad Al-Syaibānī, keduanya berpandangan sama seperti golongan mayoritas.²²¹

Dengan demikian bisa dipetakan bahwa setiap transaksi yang ada unsur *i'ānah alā al-ma'siyāt* (menolong orang lain dalam masalah kemaksiatan) dihukumi haram menurut mayoritas (Hambali, Maliki dan Syafi'i), berbeda dengan Madzhab Hanafi (tergantung komoditasnya, jika memang fisiknya adalah sebuah kemungkarannya dihukumi makruh *tahrīm*, sedang jika tidak demikian maka ada yang mengatakan makruh *tanzīh* dan tidak makruh).²²²5

Hanya saja terdapat catatan bahwa dalam kasus yang sifatnya transaksional, meski terdapat unsur *i'ānah alā al-ma'siyāt* (menolong orang lain dalam masalah kemaksiatan) tetap dihukumi sah. Karena tidak ada kaitannya dengan syarat dan rukun dalam sebuah transaksi. Demikian menurut golongan mayoritas, namun Madzhab Hambali menstatusinya sebagai transaksi yang tidak sah.²²³ Alasannya adalah karena suatu hal yang diharamkan atau bersifat kemaksiatan ini tidak bisa dikomersialkan, sehingga mentransaksikannya tidak dihukumi sah.²²⁴

Tabel 15 Pandangan 4 Madzhab atas kasus *i'ānah alā al-ma'siyāt* dalam konteks transaksional

No.	Madzhab	Implikasi Hukum
1.	Hanafi	Hukumnya diperinci. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Dalam konteks jual beli, jika materinya merupakan sebuah kemungkarannya, maka dihukumi makruh <i>tahrīm</i>. Jika tidak, maka dihukumi makruh <i>tanzīh</i>, namun dalam pendapat lain dikatakan tidak makruh. ➤ Sedangkan dalam konteks akad sewa jasa, menurut Abū Ḥanīfah boleh, sedang menurut Abū Yūsuf dan Muḥammad Al-Syaibānī adalah makruh <i>tahrīm</i>.

²²¹ Utsman Muhammad Abdul Qadir and Ali Abdullah, *Al-I'ānah Ala Al-Itsmi Wa Al-Udwan: Haqiqatuha, Hukmuha, Wa Dhabthuha Fi Al-Fiqh Al-Islami* (Universitas Al-Qashim, 2019), https://www.researchgate.net/publication/344015503_alaant_ly_alathm_waldwan_hqyqtha_hkma_dwabt_mnha_fy_alfqh_alaslmy. H. 4349

²²² Islamiyyah, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*. Juz 9 H. 211

²²³ Islamiyyah. Juz 9 H. 213

²²⁴ Muflih, *Al-Mubdi' Fi Syarh Al-Muqni'*. Juz 4 H. 24

		Namun meski diperinci sedemikian rupa, transaksinya dihukumi sah. Alasannya bahwa yang demikian adalah faktor eskternal, sehingga tidak berpengaruh pada keabsahan transaksinya.
2.	Maliki & Syafi'i	Dihukumi haram, karena dianggap sebagai tindakan <i>i'ānah alā al-ma'siyāt</i> (menolong orang lain dalam masalah kemaksiatan). Namun transaksinya tetap dihukumi sah, sebab yang demikian merupakan faktor eskternal sehingga tidak berpengaruh pada keabsahan transaksinya.
3.	Hambali	Dihukumi haram, karena dianggap sebagai tindakan <i>i'ānah alā al-ma'siyāt</i> (menolong orang lain dalam masalah kemaksiatan) dan transaksinya tetap dihukumi tidak sah. Alasannya adalah karena sesuatu yang haram itu tidak bisa dikomersialkan, sehingga batal jika mentransaksikannya.

Silang pandang antara kedua kubu di atas, bisa ditarik dalam spektrum *ushūlī*.

Bahwa madzhab Hanafi menggunakan metode *Ilhāqī* (turunan dari konsep *qiyās*), sedangkan 3 madzhab lainnya beristidlal dengan *nash* al-Qur'an (Al-Maidah ayat 2). Ketika terjadi pertentangan demikian, maka yang diunggulkan (*tarjīh*) adalah produk hukum yang dicetuskan dari istidlal ke *nash*. Sebab *nash* merupakan pondasi dasar dari teori *qiyās*, terlebih *Ilhāq* sendiri adalah turunan darinya.²²⁵

Hanya saja, peneliti lebih condong kepada logika yang dibangun oleh Madzhab Hanafi, bahwa memang harus ada pemetaan atau klasifikasi dalam konteks perbuatan yang bersinggungan dengan *i'ānah alā al-ma'siyāt* (menolong orang lain dalam masalah kemaksiatan). Sebab jika tidak demikian, maka umat akan sering terjerumus dalam kemaksiatan. Misalnya kasus *i'ānah alā al-ma'siyāt* (menolong orang lain dalam masalah kemaksiatan) dihukumi haram secara mutlak, niscaya tidak akan ada yang selamat dari dosa.²²⁶

Bayangkan saja, segala lini hampir bersinggungan dengan maksiat. Misalnya menjahit baju yang secara desainnya menampakkan aurat, menjual atau

²²⁵ Muhammad Al-Zuhaili, *Al-Wajiz Fi Ushul Al-Fiqh Al-Islami* (Damaskus: Dar Al-Khair, 2006). Juz 2. H. 447

²²⁶ Muhammad, *Khulashah Al-Kalam Fi Masalah Al-I'ānah Ala Al-Haram Fi Al-Madzhab Al-Hanafi*. H. 10

memberikan baju tersebut, menjual atau menyewakan rumah pada orang yang akan menggunakannya dalam kemaksiatan dan lain-lain.

Apalagi dalam konteks pejabat yang muslim, di mana tentunya yang bersangkutan pasti sering bersinggungan dengan non muslim dan seringnya adalah pada hal-hal yang dilarang oleh agamanya. Misalnya adalah memberikan izin atas usaha-usaha yang diharamkan syariat, memfasilitasi hari besar mereka, dan sebagainya. Oleh karenanya perlu adanya pemetaan terhadap kasus *i'ānah alā al-ma'ṣiyāt* (menolong orang lain dalam masalah kemaksiatan) yang diharamkan atau tidak, agar terhindar dari dosa.

Andaipun distatusi sebagai *i'ānah alā al-ma'ṣiyāt* (menolong orang lain dalam masalah kemaksiatan), memberikan izin dalam pendirian rumah ibadah non muslim di Indonesia tidak terfokus pada unsur tersebut. Melainkan menjadi salah satu upaya untuk menciptakan harmoni antar umat beragama. Bahwa memberikan izin tadi hanya sebatas sarana saja, tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas negara agar tidak terjadi kekacauan yang mana ini merupakan aspek yang sangat sensitif bagi warga negara.

Selain itu, peneliti juga mempertimbangkan konteks kenegaraan di Indonesia yang sangat multikultural. Terlebih lagi kebebasan beragama merupakan salah satu amanat konstitusi, sehingga setiap warga negara harus berupaya merealisasikannya.

Pola pikir ini juga menjadi legitimasi dalam konteks seorang muslim yang diminta untuk menjaga rumah ibadah non muslim dalam hari besarnya, di mana riskan terjadi serangan.²²⁷

²²⁷ Rabithah Khirrij Ma'had Lirboyo, *Fiqh Al-Muwathanah* (Kediri: Lirboyo Press, 2021). Juz 1 H. 107-108

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, berikut adalah kesimpulan yang didapat;

1. Formulasi angka sebagai salah satu persyaratan pendirian rumah ibadah bagi non muslim ini tidak dikenal. Ulama' madzhab mengesampingkan formulasi angka, melainkan mempertimbangkan pada aspek status kenegaraannya. Yakni jika daerah tersebut milik orang Islam, maka dilarang mendirikan rumah ibadah. Di antaranya adalah daerah yang didirikan oleh orang Islam seperti bashrah, kufah, baghdad, wasit (Irak), dan daerah yang ditaklukkan melalui peperangan seperti Fustat (Mesir), Isfahan (Iran), Syam (suriah dan yordania), negara-negara Afrika. Sedangkan jika daerah tersebut ditaklukkan melalui rekonsiliasi dan disepakatinya klausul kebebasan beragama seperti Yerusalem, maka non muslim diperbolehkan mendirikan rumah.
2. Menurut Madzhab Hanafi, seorang Muslim boleh memberikan izin pendirian rumah ibadah non muslim. Sebab yang demikian ini tidak bisa dianggap sebagai *i'ānah alā al-ma'siyāt* (menolong orang lain dalam masalah kemaksiatan), karena bukan menjadi pemicu langsung dan juga bukan faktor utama. Sedangkan menurut 3 Madzhab lainnya (Maliki, Syafi'i dan Hambali) adalah haram, karena dianggap sebagai tindakan *i'ānah alā al-ma'siyāt*. Kecuali jika mengikuti pendapatnya 'Izzuddin bin Abdis Salām dalam Madzhab Syafi'i dan Ibnu Rusyd Al-Jad atau Al-

Nafrāwī dalam Madzhab Maliki. Perbedaan antar dua kubu ini muncul karena perbedaan dalam mengidentifikasi kasus *i'ānah alā al-ma'ṣiyāt* yang diharamkan, mayoritas memutlakkannya sedangkan madzhab Hanafi mengklasifikasikannya menjadi pemicu tidak langsung dan langsung. Silang pendapat ini ditengarai adanya perbedaan dalam pencetusan hukum, yakni madzhab Hanafi menggunakan metode *Ilhāqī* (turunan dari konsep *qiyās*), sedangkan 3 madzhab lainnya beristidlal dengan *nash* al-Qur'an (Al-Maidah ayat 2). Ketika terjadi pertentangan demikian, maka yang diunggulkan adalah produk hukum yang dicetuskan dari istidlal dengan *nash*. Sebab *nash* merupakan pondasi dasar dari teori *qiyās*, terlebih *Ilhāq* sendiri adalah turunan darinya.

B. Saran

Memandang bahwa konstitusi mengamanatkan adanya kebebasan beragama, seyogyanya mempermudah pendirian rumah ibadah non muslim jika telah memenuhi syarat. Sebab di negeri yang multikultural seperti Indonesia ini, tidak boleh egois apalagi sindrom mayoritanisme. Sehingga mempersulit pendirian rumah ibadah non muslim, terlebih kasus ini kerap dijadikan ajang balasan bagi mayoritas. Yakni siapa yang minoritas di suatu daerah, maka yang bersangkutan akan dipersulit keberagamaannya.

Berdasarkan fakta tersebut, maka peneliti mengambil posisi dengan mengikuti madzhab Hanafi. Alasannya adalah nalar hukum yang rinci, yakni adanya pemetaan terkait sebuah kasus untuk distatusi sebagai *i'ānah alā al-ma'ṣiyāt* (menolong orang lain dalam masalah kemaksiatan) sehingga nanti berimplikasi hukum haram. Selain itu, peneliti juga mempertimbangkan konteks

kenegaraan di Indonesia yang sangat multikultural. Terlebih lagi kebebasan beragama merupakan salah satu amanat konstitusi, sehingga setiap warga negara harus berupaya merealisasikannya.

Peneliti menyadari bahwasanya penelitian ini belum paripurna, hal ini disebabkan adanya keterbatasan. Di antaranya adalah peneliti belum menyentuh ranah metodologis hukum, sehingga peneliti merekomendasikan pada penelitian selanjutnya untuk mengkaji kasus *i'ānah alā al-ma'ṣiyāt* melalui kaedah fikih atau langsung ke teks-teks keagamaan.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Abidin, Ibnu. *Radd Al-Muhtar Ala Al-Durr Al-Mukhtar*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1992.
- 'Ulaisy, Muhammad. *Minah Al-Jalil*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1984.
- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. syakir Media Press, 2021.
- Afandi, Abdur Rahman. *Majma' Al-Anhar*. Beirut: Dar Ihya' Turats Al-Arabi, n.d.
- Agama, Menteri, and Menteri Dalam Negeri. *Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2006*, 2006.
- Al-Aini, Badruddin Mahmud. *Al-Binayah Syarh Al-Hidayah*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2000.
- Al-Andalusi, Ibnu Hazm. *Al-Muhalla Bi Al-Atsar*. Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2016.
- Al-Anshari, Zakariyya. *Asna Al-Mathalib Fi Syarh Raudh Al-Thalib*. Beirut: dar Al-kitab Al-Islami, n.d.
- . *Fath Al-Wahhab*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1994.
- Al-Atthar, Hasan. *Hasyiyah Al-Atthār Alā Syarh Al-Jalal Al-Mahallī Ala Jam' Al-Jawāmi'*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1999.
- Al-Ba'li, Ahmad. *Al-Raudh Al-Nadi*. Riyadh: Al-Muassasah Al-Sa'idiyyah, n.d.
- Al-Babirithi, Akmaluddin. *Al-Inayah Syarh Al-Hidayah*. Beirut: Dar Al-Fikr, n.d.
- Al-Bahuti, Manshur bin Yunus. *Al-Raudh Al-Murabbi' Syarah Zad Al-Mustaqni'*. Beirut: Muassasah Al-Risalah, n.d.
- . *Daqaiq Uli Al-Nuha*. Irbid: Alam Al-Kutub, 1993.
- . *Kasyaf Al-Qanna' an Matn Al-Iqna'*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2015.
- Al-Bakri, Abu Bakar Syatha'. *I'annah Al-Thalibin Fi Hall Alfadz Fath Al-Mu'in*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2015.
- Al-Bannani, Muhammad. *Al-Fath Al-Rabbani Fima Dzahala 'anhu Al-Zurqani*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2012.
- Al-bantani, Muhammad bin Umar. *Nihayat Al-Zain Fi Irsyad Al-Mubtadi'in*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2019.
- Al-Barr, Ibnu Abdi. *Al-Kafi Fi Fiqh Ahl Al-Madinah*. Riyadh: Maktabah Al-Riyadh Al-Haditsah, 1980.
- Al-Bujairimi, Sulaiman. *Tuhfat Al-Habib Ala Syarh Al-Khatib*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1995.
- Al-Bulkhi, Nidzam Al-Din. *Al-Fatawa Al-Hindiyyah*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2020.
- Al-Dardir, Ahmad. *Al-Syarh Al-Kabir*. Beirut: Dar Al-Fikr, n.d.
- . *Aqrab Al-Masalik Li Madzhab Al-Imam Malik*. Kairo: Dar Al-Ma'arif, n.d.
- Al-Fadani, Muhammad Yasin bin Isa. *Hasyiyah Al-Fawaid Al-Janiyyah Ala Al-*

- Mawahib Al-Saniyyah*. Beirut: Dar Al-Basyair Al-Islamiyyah, 1996.
- Al-Gharnathi, Ibnu Jazi Al-Kalbi. *Al-Qawanin Al-Fiqhiyyah*. Maktabah Syamilah Al-Haditsah, n.d. <https://shamela.ws/book/6193>.
- Al-Gharnathi, Muhammad bin Yusuf. *Al-Taj Wa Al-Iklil*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2020.
- Al-Haitami, Ibnu Hajar. *Al-Fatawa Al-Fiqhiyyah Al-Kubro*. Al-Maktabah Al-Islamiyyah, n.d. <https://shamela.ws/book/21628>.
- . *Tuhfat Al-Muhtaj Fi Syarh Al-Minhaj*. Beirut: Dar Ihya' Turats Al-Arabi, 1983.
- Al-Harrani, Ibnu Taimiyyah. *Masalah Fi Al-Kanais*. Riyadh: Maktabah Al-'Ubaikan, n.d.
- Al-Hashkafi, 'Alauddin Muhammad. *Al-Durr Al-Mukhtar*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2002.
- Al-Himam, Ibnu. *Fath Al-Qadir*. Beirut: Dar Al-Fikr, n.d.
- Al-Jad, Ibnu Rusyd. *Al-Bayan Wa Al-Tahsil*. Beirut: Dar Al-Gharb Al-Islami, 1988.
- . *Al-Muqaddimat Al-Mumahhidat*. Beirut: Dar Al-Gharb Al-Islami, 1988.
- AL-Jarhazi, Abdullah bin Sulaiman. *Al-Mawahib Al-Saniyyah Ala Faraid Al-Bahiyah*. Beirut: Dar Al-Basyair Al-Islamiyyah, 1996.
- Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim. *Ahkam Ahl Al-Dzimmah*. Al-Damam: Ramadi, 1997.
- Al-Kamali, Hamd Yahya, and Ismail Kadzim Al-Isawi. *Qa'idah Al-I'annah Ala Al-Haram*. Sharjah: Majalah Universitas Sharjahol., 2020.
- Al-Kasani, 'Alauddin. *Badai' Al-Shanai' Fi Tartib Al-Syara'i'*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2019.
- Al-Khadimi, Muhammad. *Bariqah Mahmudiyyah Fi Syarh Tariqat Muhammadiyyah Wa Syariat Nabawiyyah Fi Sirat Ahmadiyyah*. Aleppo: Mathba'ah Al-Halbi, n.d.
- Al-Kharsy, Muhammad bin Abdullah. *Syarh Mukhtashar Khalil*. Beirut: Dar Al-Fikr, n.d.
- Al-Kindi, Abu Umar bin Yusuf. *Kitab Al-Wulāt Wa Kitab Al-Qudhāt*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2003.
- Al-Kurdi, Sulaiman. *Al-Fawaid Al-Madaniyyah*. Damaskus: Dar Nur Al-Shabah, 2011.
- Al-Lakhmi, Abul Hasan. *Al-Tabshirah*. Qatar: Wizarat Al-Auqaf wa Al-Syu'un Al-Islamiyyah, 2011.
- Al-Mahalli, Jalaluddin. *Kanz Al-Raghibin*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1995.
- Al-Malibari, Zainuddin. *Fath Al-Mu'in*. Riyadh: Dar Ibnu Hazm, 2009.
- Al-Maqdisi, Ibnu Qudamah. *Al-Kafi Fi Fiqh Al-Imam Ahmad*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2020.
- . *Al-Mughni*. Kairo: Maktabah Al-Qahirah, 1969.
- Al-Mardawi, 'Alauddin Ali. *Al-Inshaf Fi Ma'rifat Al-Rajih Min Al-Khilaf*. Kairo: Hajr li Al-Thiba'ah, 1995.

- Al-Misri, Ibnu Nujaim Zainuddin. *Al-Bahr Al-Raiq Syarh Kanz Al-Daqaiq*. Beirut: Dar Al-kitab Al-Islami, n.d.
- Al-Nafrawi, Syihabuddin. *Al-Fawakih Al-Dawani*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1995.
- Al-Nahlawi, Khalil. *Al-Durar Al-Mubahah Fi Al-Hadzr Wa Al-Ibahah*. Maktabah Syamilah Al-Dzahbiyyah, n.d.
- Al-Nasafi, Abul Barakat. *Kanz Al-Daqaiq*. Beirut: Dar Al-Basyair Al-Islamiyyah, 2011.
- Al-Nawawi, Muhyiddin Yahya. *Minhaj Al-Thalibin Wa Umdat Al-Muftin*. Jeddah: Dar Al-Minhaj, 2021.
- Al-Qarafi, Abu Al-Abbas. *Al-Dzakhirah*. Beirut: Dar Al-Gharb Al-Islami, 1994.
- . *Al-Furūq*. Beirut: Alam Al-Kutub, n.d.
- Al-Qulyubi, Ahmad Salamah. *Hasyiyah Al-Qulyubi*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1995.
- Al-Rahibani, Musthofa bin Sa'ad. *Mathalib Uli Al-Nuha Fi Syarh Ghayat Al-Muntaha*. Beirut: Al-Maktab Al-Islami, 1994.
- Al-Ramli, Syamsuddin. *Nihayat Al-Muhtaj Ila Syarh Al-Minhaj*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1984.
- Al-Rasyidi, Ahmad bin Abdur Razzaq. *Hasyiyah Al-Rasyidi Ala Al-Nihayah*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1984.
- Al-Ru'ini, Muhammad. *Mawahib Al-Jalil*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1992.
- Al-Sa'ati, Ibnu. *Majma' Al-Bahrayn Wa Multaqa Al-Nayyirayn Fi Al-Fiqh Al-Hanaifi*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2005.
- Al-Sarakhsi, Muhammad bin Ahmad. *Al-Mabsuth*. Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1997.
- Al-Shawi, Abul Abbas Ahmad. *Bulghat Al-Salik Li Aqrab Al-Masalik*. Beirut: Dar Al-Ma'arif, n.d.
- Al-Suyuthi, Jalaluddin. *Al-Asybah Wa Al-Nadzair*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1993.
- Al-Syalbi. *Tabyin Al-Haqaiq Wa Hasyiyah Al-Syalbi*. Kairo: Al-Mathba'ah Al-Kubro Al-Amiriyyah, 1990.
- Al-Syarwani, Abdul Hamid. *Hawasyi Syarwani Ala Tuhfat Al-Muhtaj*. Beirut: Dar Ihya' Turats Al-Arabi, 1983.
- Al-Syibramalisi, Nuruddin Ali. *Hasyiyah Al-Syibramalisi Ala Al-Nihayat*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1984.
- Al-Syirbini, Syamsuddin Al-Khatib. *Mughni Al-Muhtaj Ila Ma'rifat Ma'ani Alfadz Al-Minhaj*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2020.
- Al-Thabari, Abu Ja'far jarir. *Tarikh Al-Umām Wa Al-Mulūk*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1997.
- Al-Ubbadi, Ibnu Qasim. *Hawasyi Al-Ubbadi Ala Tuhfat Al-Muhtaj*. Beirut: Dar Ihya' Turats Al-Arabi, 1983.
- Al-Ujaili, Jamal Sulaiman. *Futuhah Al-Wahhab Bi Taudih Syarh Manhaj Al-Thullab*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2020.
- Al-Utsmani, Muhammad Taqi. *Buhuts Wa Qadhaya Fiqhiyyah Mu'ashirah*. Damaskus: Dar Al-Qalam, 2003.

- Al-Zarkasyi, Badruddin Muhammad. *Al-Bahr Al-Muhit Fi Ushul Al-Fiqh*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2000.
- Al-Zayla'i, Fakhrudin. *Tabyin Al-Haqaiq*. Kairo: Al-Mathba'ah Al-Kubro Al-Amiriyyah, 1990.
- Al-Zuhaili, Muhammad. *Al-Wajiz Fi Ushul Al-Fiqh Al-Islami*. Damaskus: Dar Al-Khair, 2006.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*. Damaskus: Dar Al-Fikr Al-Mu'ashir, 2015.
- Al-Zurqani, Abdul Baqi. *Syarh Al-Zurqani Ala Mukhtashar Khalil*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2012.
- Ali, Muhammad Ibrahim Ahmad, and Abdul Aziz Ali. *Al-Madzhab Inda Al-Hanafiyyah Al-Malikiyyah Al-Syafi'iyah Al-Hanabilah*. Kuwait: Al-Wa'y Al-Islami, 2012.
- Alwi, Muhammad. "Ketika Tuhan Dikungkung Dalam Rumah Ibadah." IBTimes.ID, 2023. <https://ibtimes.id/ketika-tuhan-dikungkung-dalam-rumah-ibadah/>.
- Amindoni, Ayomi. "Kisah Umat Kristen Di Aceh Singkil Yang Terpaksa Beribadah Di Bawah Tenda: 'Anak Cucu Kita Janganlah Mengalami Apa Yang Kami Alami.'" *BBC Indonesia*, 2019. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50456294>.
- Aminuddin, Luthfi Hadi. *Dari Qawli Hingga Manhaji (Dinamika Metode Penetapan Fatwa Hukum Islam Di Nahdlatul Ulama)*. Surabaya: PW LTN NU Jawa Timur, 2022.
- Anshor, Ahmad Muhtadi. *Bahth Al-Masail Nahdlatul Ulama'*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Ardiansyah. "Legalitas Pendirian Rumah Ibadat Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006" 16, no. 1 (2016): 165–82.
- Arifinsyah, Arifinsyah, and Ahmad Sofian. "Regulation on Worship House Establishment and Implication towards Minority Relation of Religious People Majority in Indonesia." *International Journal of Social Sciences* 4, no. 1 (2021): 106–13. <https://doi.org/10.31295/ijss.v4n1.1396>.
- Azam, Abdullah Yusuf. *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*. Maktabah Syamilah Al-Dzahbiyyah, n.d. <https://ketabonline.com/ar/books/7868>.
- Bashori, Abdul Hakim. *Fungsi Sosial Rumah Ibadah Dari Berbagai Agama*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Beragama Departemen Agama RI, 2004.
- Black, Ann, Hossein Esmaeili, and Nadirsyah Hosen. *Modern Perspectives On Islamic Law*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2013.
- Christanty, Yuni Ayu, and Maya Mustika Kartika Sari. "Wacana Toleransi Beragama Pada Unggahan Akun Tiktok @Dasadlatifofficial," n.d., 645–60.
- Crouch, Melissa. "Implementing the Regulation on Places of Worship in Indonesia : New Problems , Local Politics and Court Action Implementing

- the Regulation on Places of Worship in Indonesia : New Problems , Local Politics and Court Action.” *Asian Studies Review* 34, no. May 2013 (2010): 37–41. <https://doi.org/10.1080/10357823.2010.527921>.
- . “REGULATING PLACES OF WORSHIP IN INDONESIA : UPHOLDING FREEDOM OF RELIGION FOR RELIGIOUS MINORITIES ?” *Singapore Journal of Legal Studies* +, no. July (2007): 96–116. <https://www.jstor.org/stable/24869039>.
- “Definisi Legalitas,” n.d. <https://kbbi.web.id/legalitas>.
- “Design Guidance Places of Worship,” n.d. https://housing.govmu.org/Documents/PlanningPolicy/PPG_3_Design_Guidance_Places_of_Worship.pdf.
- Egypt, Government Of. “٢٠٢٣” “قانون بناء الكنائس”
<https://www.sis.gov.eg/Story/248856/القانون-بناء-الكنائس?lang=ar#:~:text=تنص>
 يراعى أن من صحن وقاعة معمودية ومنارة المادة ٢%٣
- Fathonah, Daud K, and Mohammad Ridlwan Hambali. “The Methods Of Istinbath Nahdlatul Ulama (Nu): A Study On Fatwa Strategy In The Bahts Al-Masail Tradition In Indonesia.” *Millennial : Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 2 (2022): 1–22. <https://jurnal.alhamidiyah.ac.id/index.php/Millennial/article/view/182/172>.
- Firdaus, Riko, Abdul Halim, Zaki Mubarak, and Jawa Tengah. “Penyelesaian Konflik Pendirian Rumah Ibadah : Studi Kasus Konflik Gereja Methodist Kota Jambi” 4, no. 1 (2023): 433–46. <https://doi.org/10.18592/jiiu.v22i1.9416>.
- Hafil, Muhammad. “Bukan Hanya Gereja, Masjid Di Muslim Minoritas Juga Susah Dibangun,” 2022. <https://news.republika.co.id/berita/ri7qmv318/bukan-hanya-gereja-masjid-di-muslim-minoritas-juga-susah-dibangun>.
- Halim, Abdul. “Pola Konflik Agama Di Wilayah Plural : Studi Kasus Pendirian Rumah Ibadah Di Kota Jambi” 19, no. 1 (n.d.): 85–109.
- Hamzah, Amir. *Penelitian Berbasis Proyek Metode Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D Kajian Teoritik Dan Contoh-Contoh Penerapannya*. Malang: Literasi Nusantara, 2019.
- Hermawan, Iwan. “Metodologi Penelitian Pendidikan (Kualitatif, Kuantitatif Dan Mixed Method) - IWAN HERMAWAN, S.Ag.,M.Pd.I - Google Buku.” *Hidayatul Quran*, 2019.
- . *Teknik Menulis Karya Ilmiah Berbasis Aplikasi Dan Metodologi*. Kuningan: Hidayatul Qur’an, 2019.
- Hikmawati, Fenti. *Metodologi Penelitian*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020.
- Hosen, Ibrahim, and Nadirsyah Hosen. *Ngaji Fikih*. Sleman: PT Bentang Pustaka, 2020.
- Hutabarat, Binsar Antoni. “Evaluasi Terhadap Peraturan Bersama Menteri Tahun

- 2006 Tentang Pendirian Rumah Ibadah.” *Societas Dei: Jurnal Agama Dan Masyarakat* 4, no. 1 (2017): 8. <https://doi.org/10.33550/sd.v4i1.41>.
- Ishaq, Kholil bin. *Mukhtashar Khalil*. Kairo: Dar Al-Hadis, 2005.
- Islamiyyah, Wizaratul Awqaf was Syu’unul. *Al-Mausu’ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*. Kuwait: Wazaratul Awqaf was Syu’unul Islamiyyah, 2002.
- Ismardi. “Pendirian Rumah Ibadat Menurut Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 8 Dan 9 Tahun 2006.” *Toleransi: Media Ilmiah Umat Beragama*, 2011.
- “Jalan Buntu Mendirikan Gereja Di Kabupaten Bandung,” 2023. <https://bandungbergerak.id/article/detail/158766/jalan-buntu-mendirikan-gereja-di-kabupaten-bandung>.
- Jamal, Sulaiman. *Futuhah Al-Wahhab Bi Taudih Syarh Manhaj Al-Thullab*. Beirut: Dar Al-Fikr, n.d.
- Jum’ah, Nuruddin Ali. *Al-Bayan Li Ma Yusghil Al-Adzhan*. Kairo: Dar Al-Muqattham, 2009.
- Kiftiyah, Anifatul, and Tri Sutrisno. “ALIGNING PANCASILA VALUES IN THE REGULATION FOR.” *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan* 08, no. 39 (2023).
- “Kontroversi Pendirian Rumah Ibadah Non Muslim,” n.d. <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/26/02450071/kontroversi-pendirian-rumah-ibadah-di-indonesia?page=all>.
- Lirboyo, Rabithah Khirrij Ma’had. *Fiqh Al-Muwathanah*. Kediri: Lirboyo Press, 2021.
- Malik, Imam. *Al-Mudawwanah*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2020.
- Mamun, Sukron. “Bahtsul Masa’il Nu; Antara Ijtihad Dan Ikhtiyat Sukron Ma’mun,” n.d., 63–86.
- “Mauritius,” n.d. <https://www.kemlu.go.id/antananarivo/id/read/mauritius/4036/etc-menu>.
- Mazzah, Burhanuddin Mahmud. *Al-Muhit Al-Burhani*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, n.d.
- Muchtar, Adinda Tenriangke, Arifianto Purbolaksono, Christina Clarissa Intania, and Felia Primaresti. *Evaluation of the Requirements for the Establishment of Houses of Worship in the Joint Regulation of Minister of Religious Affairs and Minister of Home Affairs Number 9 and 8 of 2006 for the Right to Freedom of Religion and Belief in Indonesia*. Jakarta Pusat: The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research, 2024.
- Muflih, Ibnu. *Al-Mubdi’ Fi Syarh Al-Muqni’*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1997.
- Muhammad, Husein. *Menuju Fiqh Baru*. Yogyakarta: Ircisod, 2020.
- Muhammad, Sholah. *Khulashah Al-Kalam Fi Masalah Al-I’alah Ala Al-Haram Fi Al-Madzhab Al-Hanafi*. Amman: Markaz Anwar Al-Ulama’ Li Al-Dirasat, 2020.

- Mustaming, and Rohana. "Jaminan Kebebasan Beragama Menurut Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam" 4, no. 2 (2020).
- Musthofa, Zulfa. *Al-Fatwa Wa Ma La Yanbaghi Li Al-Mutafaqqihi Jahluhu*. Jakarta Selatan: Mayang Publishing, 2021.
- Muzadi, Abdul Muchit. *NU Dan Fiqh Konstektual*. Yogyakarta: LKPS, 1994.
- Nujaim, Sirajuddin Ibnu. *Al-Nahr Al-Faiq Syarh Kanz Al-Daqaiq*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2018.
- PBNU. *Ahkam Al-Fuqaha' Fi Muqarrat Mu'tamarat Nahdlat Al-Ulama'*. Surabaya: Khalista, 2011.
- "Pembangunan Gereja Di Sindang Jaya Tangerang Ditolak, Warga: Demi Keharmonisan." Poskota.co, 2023. <https://poskota.co.id/2023/09/14/pembangunan-gereja-di-sindang-jaya-tangerang-ditolak-warga-demi-keharmonisan>.
- "Penyederhanaan Syarat Pendirian Rumah Ibadah: Penghapusan Rekomendasi Fkub Mesti Diikuti Langkah Progresif Lain." Setara Institute, 2023. <https://setara-institute.org/penyederhanaan-syarat-pendirian-rumah-ibadah-penghapusan-rekomendasi-fkub-mesti-diikuti-langkah-progresif-lain/>.
- "PERATURAN GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM NOMOR 25 TAHUN 2007." Dinas Syariat Islam Aceh, 2007. https://dsi.acehprov.go.id/media/2023.07/peraturan_gubernur_nanggroe_aceh_darussalam_nomor_25_tahun_2007_tentang_pedoman_pendirian_rumah_ibadah1.pdf.
- Pinandito, Rizky Adi. "Implementasi Prinsip Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan Di Indonesia (Studi Kasus: Tanggung Jawab Negara Dalam Konflik Sampang, Madura)." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 4, no. 1 (2017): 91. <https://doi.org/10.26532/jph.v4i1.1649>.
- Purwoko, Budi, and Abdi Mirzaqon. "Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori Dan Praktik Konseling Expressive Writing Library Research Of The Basic Theory And Practice Of Expressive Writing Counseling." *BK Unesa*, 2018.
- Putu Ni Adella, Tasya, and Dewa Gede Rudy. "Legalitas Perdagangan Program Komputer Melalui Jejaring Sosial Media Online" 11, no. 4 (2022).
- Qadir, Utsman Muhammad Abdul, and Ali Abdullah. *Al-I'annah Ala Al-Itsmi Wa Al-Udwan: Haqiqatuha, Hukmuha, Wa Dhabthuha Fi Al-Fiqh Al-Islami*. Universitas Al-Qashim, 2019. https://www.researchgate.net/publication/344015503_alaant_ly_alathm_waldwan_hqyqtha_hkmha_dwabt_mnha_fy_alfqh_alaslamy.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2014.
- Rifani, Riza. "Konsep Ilhaq Al-Masail Bi Nazhairiha Dan Metode Penerapannya Pada Kasus Kontemporer" 8742 (2023).
- Salam, Izzuddin bin Abdis. *Qawaid Al-Ahkam Fi Mashalih Al-Anam*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1991.

- “Setara Institute: 50 Rumah Ibadah Diganggu Sepanjang 2022, Jawa Timur Paling Intoleran.” *suaraindo.co*, 2023. <https://www.suaraindo.id/2023/02/setara-institute-50-rumah-ibadah-diganggu-sepanjang-2022-jawa-timur-paling-intoleran/>.
- “Soal Penolakan Pembangunan Gereja Di Nusukan, Gibran: Memang Belum Lengkap Izinnya.” *Republika.Co*, 2023. <https://news.republika.co.id/berita/rwhtjh436/soal-penolakan-pembangunan-gereja-di-nusukan-gibran-memang-belum-lengkap-izinnya>.
- Suharmi, Arikunto. “Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.” *Jakarta: Rineka Cipta*, 2012.
- Suhufi, Muhammad. “Fatwa Dan Aktualisasi Hukum Islam Di Indonesia” 8 (2010): 55–68.
- Sulistiyo, Budi, Anis Mashdurohatun, and Sri Endah Wahyuningsih. “Legal Reconstruction of the Requirement for the Establishment of the House of Worship Based on Justice Values.” *Scholars International Journal of Law, Crime and Justice* 7956 (2023): 27–34. <https://doi.org/10.36348/sijlcj.2023.v06i01.005>.
- Sunarno, Ali, Firman, Asep Ikbal, and Lala Indrawati. “Upaya Meminimalisir Kasus Intoleransi Dalam Pendirian Tempat Ibadah Demi Terciptanya Kohesi Sosial Pada Masyarakat Multikultural Di Kalimantan Tengah” 3 (2023): 93–100.
- Suryawati, Nany, and Martika Dini Syaputri. “Intoleransi Dalam Pembangunan Rumah Ibadah Berdasarkan Hak Konstitusional Warga Negara.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 3 (2022): 433–46. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i3.433-446>.
- Syaripudin, Ahmad, and Zulfikar Alim Said. “Wages For Work To Build A Non-Moslim House Of Worship In A Muslim Majority Environment In The Perspective Of Islamic Law” 8, no. 2 (2022): 235–48. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.2.183.2>.
- Syirbini, Khatib. *Iqna’ Fi Hall Alfadz Abi Syuja’*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2019.
- Timur, LBM PWNU Jawa. *Panduan Bahtsul Masail PWNU Jatim*. Surabaya: PWNU Jawa Timur, n.d.
- Tobroni, Faiq. *Local-Sharia Regulations and Religious Expression in Aceh: Criticism of the Qanun about Establishing Places of Worship*. Vol. 55, 2021.
- UAE, Legislation. “قانون اتحادي في شأن تنظيم دور العبادة لغير المسلمين.” دولة الإمارات العربية المتحدة, ٢٠٢٣. <https://uaelegislation.gov.ae/ar/legislations/1963>.
- Umairah, Ahmad Al-Barlisi. *Hasyiyah Umairah*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1995.
- Umar, Ibnu Abi. *Al-Syarh Al-Kabir Ala Al-Muqni’*. Kairo: Hajr li Al-Thiba’ah, 1995.
- UUD Negara Republik Indonesia 1945*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2020.

- Wafi, Abdul. *Reformasi Bermadzhab Dalam NU*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2022.
- “Wanti-Wanti Jokowi Ke Kepala Daerah Soal Pendirian Tempat Ibadah,” 2023. <https://news.detik.com/berita/d-6521137/wanti-wanti-jokowi-ke-kepala-daerah-soal-pendirian-tempat-ibadah>.
- Wicaksana, Pradnya. “Cilegon Menolak Pembangunan Gereja, Pakar HAM UNAIR Berikan Catatan.” UNAIR, 2022. <https://unair.ac.id/cilegon-menolak-pembangunan-gereja-pakar-ham-unair-berikan-catatan/#:~:text=Hal ini dikarenakan bahwa upaya,pembangunan Gereja HKBP di wilayahnya>.
- Wijayanto, Wahyudi Sri. “Resolusi Konflik Pembangunan Gereja Baptis Indonesia Di Tlogosari Semarang.” *Jurnal Abdiel: Khazanah Pemikiran Teologi, Pendidikan Agama Kristen Dan Musik Gereja* 5, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.37368/ja.v5i1.235>.
- Yudianita, Feby. “Tinjauan Yuridis Terhadap Aliran Kepercayaan Dihubungkan Dengan Pasal 29 Ayat 2 UUD 1945” 2 (2015): 1–14.
- Zahro, Ahmad. *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il, 1926-1999*. Yogyakarta: LKIS, 2004.

LAMPIRAN DATA

No.	Data	Transkrip Data
1.	Keterangan renovasi Gereja atas arahan elit agama	<p style="text-align: center;">كتاب الولاة وكتاب القضاة للكندي (١٠٠)</p> <p>مُوسَى بْنُ عَيْسَى بْنِ مُوسَى الْعَبَّاسِيِّ: ثُمَّ وَلِيَهَا مُوسَى بْنُ عَيْسَى بْنِ مُوسَى بْنِ مُحَمَّدٍ مِنْ قَبْلِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ هَارُونَ الرَّشِيدِ عَلَى صَلَاتِهَا فَجَعَلَ عَلَى شَرْطِهِ أَخَاهُ إِسْمَاعِيلَ بْنَ عَيْسَى، فَسَخِطَ ذَلِكَ، فَعَزَلَهُ وَوَلَّى عَسَّامَةَ بْنَ عَمْرٍو، ثُمَّ أَذِنَ مُوسَى بْنُ عَيْسَى لِلنَّصَارَى فِي بُنْيَانِ الْكِنَائِسِ الَّتِي هَدَمَهَا عَلِيُّ بْنُ سُلَيْمَانَ، فُبُنِيَتْ كُلُّهَا بِمَشُورَةِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، وَعَبَدَ اللَّهُ مِنْ لَهْيَعَةَ، وَقَالَا: هُوَ مِنْ عِمَارَةِ الْبِلَادِ. وَاحْتِجًّا أَنْ عَامَةَ الْكِنَائِسِ الَّتِي يَمَصِّرُ- لَمْ تُبْنَ إِلَّا فِي الْإِسْلَامِ فِي زَمَنِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ. ثُمَّ صُرِفَ مُوسَى عَنْهَا يَوْمَ السَّبْتِ لِأَرْبَعِ عَشْرَةَ لَيْلَةً خَلَّتْ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ وَمِائَةً، فَكَانَتْ وَلا يَتَهُ عَلَيْهَا سَنَةٌ وَخَمْسَةٌ أَشْهُرًا وَنَصْفًا.</p>
2.	Teks lengkap perjanjian Elia	<p style="text-align: center;">تاريخ الرسل والملوك - تاريخ الطبري (٤٤٩/٢)</p> <p>وعن خالد وعبادة قالوا صالح عمر أهل إيلياء بالجابية وكتب لهم فيها الصلح لكل كورة كتابا واحدا ما خلا أهل إيلياء بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أعطى عبدالله عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصلبانهم وسقيمها وبريئتها وسائر ملتها أنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينتقص منها ولا من حيزها ولا من صليبهم ولا من شيء من أموالهم ولا يكرهون على دينهم ولا يضار أحد منهم ولا يسكن بإيلياء معهم أحد من اليهود وعلى أهل إيلياء أن يعطوا الجزية كما يعطي أهل المدائن وعليهم أن يخرجوا منها الروم واللصوت فمن خرج منهم فإنه آمن على نفسه وماله حتى يبلغوا مأمنهم ومن أقام منهم فهو آمن وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية ومن أحب من أهل إيلياء أن يسير بنفسه وماله مع الروم ويخلى بيعهم وصلبهم فإنهم آمنون على أنفسهم وعلى بيعهم وصلبهم حتى يبلغوا مأمنهم ومن كان بها من أهل الأرض قبل مقتل فلان فمن شاء منهم قعدوا عليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية ومن شاء سار مع الروم ومن شاء رجع إلى أهله فإنه لا يؤخذ منهم شيء حتى يحصد حصادهم وعلى ما في هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين إذا أعطوا الذي عليهم من الجزية شهد على ذلك خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعبدالرحمن بن عوف ومعاوية بن أبي سفيان وكتب وحضر سنة خمس عشرة</p>
3.	Legitimasi dan Legislasi <i>Ilhāq</i>	<p style="text-align: center;">حاشية العطار على جمع الجوامع (٤٠٣/٢)</p> <p>وان لم يعرف للمجتهد قول في مسألة لكن يعرف له قول في نظيرها فهو أي قوله في نظيرها قوله المخرج فيها على الأصح أي خرجة الأصحاب فيها إلحاقا لها بنظيره.</p> <p style="text-align: center;">الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ٦)</p> <p>فَصَلِّ اعْلَمْ أَنَّ فَنَّ الْأَشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ فَنَّ عَظِيمٍ، بِهِ يُطَّلَعُ عَلَى حَقَائِقِ الْفِقْهِ وَمَدَارِكِهِ، وَمَا أَخَذَهُ وَأَسْرَارَهُ، وَيُتَمَهَّرُ فِي فَهْمِهِ وَأَسْتِحْضَارِهِ، وَيُقْتَدَرُ عَلَى الْإِلْحَاقِ وَالتَّخْرِيجِ، وَمَعْرِفَةِ أَحْكَامِ الْمَسَائِلِ الَّتِي لَيْسَتْ بِمَسْطُورَةٍ، وَالْحَوَادِثِ وَالْوُقَائِعِ الَّتِي لَا تَنْقُضِي عَلَى مَرِّ الزَّمَانِ، وَلِهَذَا قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: الْفِقْهُ مَعْرِفَةُ النَّظَائِرِ. وَقَدْ وَجَدْتُ لِذَلِكَ أَصْلًا مِنْ كَلَامِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ... إِلَى أَنْ قَالَ... حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ الْهَدَلِيِّ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ: أَمَا بَعْدُ: فَإِنَّ الْقَضَاءَ فَرِيضَةٌ مُحْكَمَةٌ وَسُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ فَافْهَمْ إِذَا أُدْلِيَ إِلَيْكَ فَإِنَّهُ لَا يَنْفَعُ تَكَلُّمُ بَعْضٍ لَمْ يَنْفَعِ لَهْ، لَا يَمْتَنِعُكَ قَضَاءٌ قَضَيْتَهُ، رَاجَعْتَ فِيهِ نَفْسَكَ، وَهَدَيْتَ فِيهِ لِرَشِيدِكَ، أَنْ تَرَاجِعَ الْحَقَّ، فَإِنَّ الْحَقَّ قَدِيمٌ، وَمُرَاجَعَةُ الْحَقِّ خَيْرٌ مِنَ التَّمَادِي فِي</p>

		<p>الباطل، الفهم الفهم فيما يختلج في صدرك، مما لم يبلغك في الكتاب والسنة، عرف الأمثال والأشياء ثم قس الأمور عندك، فاعمد إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق، فيما ترى. "هذه قطعة من كتابه، وهي صريحة في الأمر بتتبع النظائر وحفظها، ليقاس عليها ما ليس بمنقول.</p> <p>المواهب السنية على الفرائد البهية للجرهزي (٦٨/١)</p> <p>قال السيوطي رحمه الله تعالى: أعلم أن من الأشباه والنظائر فن عظيم، به يطلع على حقائق الفقه ومداركه ومأخذه وأسراره ويتميز في فهمه واستحضاره ويقدر على الإلحاق والتخريج ومعرفة أحكام المسائل التي ليست بمسطوره، والحوادث والوقائع التي لا تنقضي على ممر الأزمان. ولهذا قال بعض أصحابنا: الفقه معرفة النظائر. وقد أخرج الدارقطني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى الأشعري: أما بعد، فاعرف الأشباه والأمثال ثم قس الأمور عندك فاعمد إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق.</p> <p>حاشية الفوائد الحنية على المواهب السنية للفادني (٦٨/١)</p> <p>قوله فاعرف الأشباه والنظائر قال الدارقطني: حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان النعماني، حدثنا عبد الله بن عبد الصمد بن أبي خداش ثنا عيسى بن يونس، ثنا عبد الله بن أبي حميد عن أبي المليح الهذلي، قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري: أما بعد، فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة، فافهمه إذا أدنى إليك، فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له. لا يمنعك قضاء قضيته، راجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن تراجع الحق؛ فإن الحق قديم ومراجعة الحق خير من التماذي في الباطل. الفهم الفهم فيما يختلج في صدرك مما لم يبلغك في الكتاب والسنة. اعرف الأمثال والأشباه ثم قس الخ. قال الإمام السيوطي في الأصل: هي صريحة في الأمر بتتبع النظائر وحفظها، ليقاس عليها ما ليس بمنقول. قوله (فاعمد إلى أحبها): أي اقصد إلى أحب الأمور الخ. وفيه إشارة إلى أن من النظائر ما يخالف نظائره في الحكم لمدرك خاص به، وهي الفن المسمى بالفروق، أي الذي يفرق فيه بين النظائر المتحدة صورة المختلفة حكما وعلة. قوله (بالحق): قال في الأصل: وفيه إشارة إلى أن المتجهد إنما يكلف بما ظنه صواباً، وليس عليه أن يدرك الحق في نفس الأمر، ولا أن يصل إلى اليقين، وإلى أن المجتهد لا يقلد غيره اهـ</p> <p>الفتوى وما لا ينبغي للمتفقه جهله (ص. ٢٠٠)</p> <p>ومما يدخل تحت ضوء الاستنباط القياسي ما سماه علماء جمعية نهضة العلماء "الإلحاق المسائل بالنظائر أو تخريج الفروع على الفروع أو على الأصول وهو استنباط الأحكام الشرعية العملية من نص المجتهد سواء كان بطريق المنطوق أو المفهوم لكن فرق العلماء بينهما بأن القياس أصل من الأحكام الأربعة المتفق عليها لدى الجمهور الذي لا يستند إليه إلا المجتهد المطلق في فتاويه واجتهاده الفقهية بخلاف الإلحاق أو التخريج فإنه قياس في الهيئة فحسب، ويختص به الفقيه العالم في مذهب إمام من أئمة المجتهد المطلق للوصول إلى الحكم الشرعي في الحوادث التي لا نص فيها من الكتاب والسنة وأخذ الفقيه من أقوال أئمة المجتهدين أو قواعد مذهبهم وأصولهم في فهم الشريعة ومقاصدها. فالتخريج أو الإلحاق يشبه القياس من حيث هو إلحاق فرع غير منصوص عليه، ويختلف عن القياس بأن الأصل الملحق به هنا نص الإمام المجتهد وقواعده لا نصوص الكتاب والسنة كما في القياس، إذ المخرج لا يبلغ مرتبة الإجتهد المطلق ليتمكن عن الإستقلال بإلحاق الفروع المستحدثة بالأصول المنصوص عليها في الشريعة. ويفارق الإلحاق أو التخريج للقياس أيضاً بأن في القياس لا بد من علة جامعة بين حكم الأصل والفرع أو المقيس والمقيس عليه، بخلاف التخريج أو الإلحاق فإنه لا يشترط وجود علة جامعة وإنما يشترط أن لا يجد بين المسألتين فارقا فيوجد</p>
4.	<p><i>Ilhāq dalam pandangan NU</i></p>	

		<p>هذا النوع أعني الإلحاق أو التخريج في كتب الفقهاء المذهبية وإن شئت أن تقول: تخريج الفروع من الفروع هو استنباط الحكم الشرعي العملي (الفقهي) من نص كلام المجتهد، فتجدهم يقولون: وفي المسألة قول كذا وكذا تخريجاً أو إلحاقاً على منصوص مالك أو الشافعي أو أحمد.</p>
5.	<p>Teks lengkap dari Al-Qarafi terkait larangan untuk memaksakan keterangan klasik yang tidak sesuai konteks</p>	<p>الفروق - أنوار البروق في أنواع الفروق (١١/١٩١) فَمَهْمَا تَجَدَّدَ فِي الْعُرْفِ اعْتِبَرَهُ، وَمَهْمَا سَقَطَتْ أَسْقَطَهُ، وَلَا تَجْمُدُ عَلَى الْمَسْطُورِ فِي الْكُتُبِ طَوْلَ عُمَرِكَ، بَلْ إِذَا جَاءَكَ رَجُلٌ مِنْ غَيْرِ إِقْلِيمِكَ يَسْتَفْتِيكَ لَا تُجِرَّهُ عَلَى عُرْفِ بَلَدِكَ وَأَسْأَلُهُ عَنْ عُرْفِ بَلَدِهِ وَأَفْتِهِ بِهِ دُونَ عُرْفِ بَلَدِكَ وَالْمُقَرَّرِ فِي كُتُبِكَ. فَهَذَا هُوَ الْحَقُّ الْوَاضِحُ، وَالْجُمُودُ عَلَى الْمُنْقُولَاتِ أَبَدًا ضَلَالٌ فِي الدِّينِ وَجَهْلٌ بِمَقَاصِدِ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَالسَّلَفِ الْمَاضِينَ. فَمَهْمَا تَجَدَّدَ فِي الْعُرْفِ اعْتِبَرَهُ، وَمَهْمَا سَقَطَتْ أَسْقَطَهُ، وَلَا تَجْمُدُ عَلَى الْمَسْطُورِ فِي الْكُتُبِ طَوْلَ عُمَرِكَ، بَلْ إِذَا جَاءَكَ رَجُلٌ مِنْ غَيْرِ إِقْلِيمِكَ يَسْتَفْتِيكَ لَا تُجِرَّهُ عَلَى عُرْفِ بَلَدِكَ وَأَسْأَلُهُ عَنْ عُرْفِ بَلَدِهِ وَأَفْتِهِ بِهِ دُونَ عُرْفِ بَلَدِكَ وَالْمُقَرَّرِ فِي كُتُبِكَ. فَهَذَا هُوَ الْحَقُّ الْوَاضِحُ، وَالْجُمُودُ عَلَى الْمُنْقُولَاتِ أَبَدًا ضَلَالٌ فِي الدِّينِ وَجَهْلٌ بِمَقَاصِدِ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَالسَّلَفِ الْمَاضِينَ.</p>
6.	<p>Pembacaan Wahbah Al-Zuhaili atas opini Madzhab Hanafi yang memetakan kasus menolong kemaksiatan.</p>	<p>الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (١٤/٢٢٦٨) رابعاً - الإجارة للكنيسة أو حمل خمر الذي: يجوز للشخص عند أبي حنيفة أن يؤجر نفسه أو سيارته أو دابته بأجر لتعمير كنيسة، أو حمل خمر ذي، لا لعصرها؛ لأنه لا معصية في الفعل عينه، لأن عقد الإجارة على الحمل ليس بمعصية ولا سبب لها، وإنما تحصل المعصية باختيار الشارب، وقد يكون حملها للإراقة أو التخليل. أما عصرها بقصد الخمرية كمعاصر الخمر في بلادنا أو في أمريكا مثلاً من مسلم فيحرم؛ لأن المعصية في الفعل عينه. وأجاز أبو حنيفة أيضاً إجارة بيت لاتخاذ كنيسة أو لبيع الخمر فيه في بلاد غالب أهلها أهل الذمة؛ لأن الإجارة تقع على منفعة البيت، ولهذا تجب الأجرة بمجرد التسليم، ولا معصية فيه، وإنما المعصية بفعل المستأجر، وهو مختار فيه. ولا تجوز تلك الإجارة في بلاد غالب أهلها الإسلام؛ لأن أهل الذمة لا يملكون من اتخاذ الكنائس وإظهار بيع الخمر ونحو ذلك في الأصح. وقال صاحبان والأئمة الثلاثة: لا ينسب كل تلك الإجازات، وهي مكروهة؛ لأنها إعانة على المعصية، ولأنه عليه الصلاة والسلام لعن في الخمر عشرة، وعد منها «حاملها». واعتبر أبو حنيفة حنيفة الحديث محمولاً على الحمل المقرون بقصد المعصية. وعلى كل حال فرأي أبي حنيفة قياس. ورأي صاحبين استحسان. وهو المعول عليه في كثير من الفتاوى.</p> <p>الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي - المجلد ٧ - الصفحة ٥٥١٨ - روى أصحاب السنن الأربعة والإمام أحمد عن ابن مسعود: أن النبي صلى الله عليه وسلم «لعن أكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه». ولفظ النسائي: «أكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه إذا علموا ذلك، ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة» فهؤلاء أربعة لعنوا في أكل الربا. وروى أبو داود والحاكم عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لعن الله الخمر، وشاربها، وساقبها، وبائعها، ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وأكل ثمنها» فهؤلاء عشرة لعنوا في الخمر وتناولها. والمتبادر إلى الذهن ألا يكون ملعوناً إلا أكل الربا وشارب الخمر دون من ذكر معهما، ولكن الشرع حرم فعل ثلاثة آخرين في الربا، وتسعة آخرين في الخمر؛ لأنهم كانوا سبباً في المعصية، وعوناً على اقتراف الحرام، فيكون المنتسب والمعين أو المساعد، له حكم الفاعل تماماً. وبناء عليه يكون تاجر المخدرات والمهرب والناقل وكل من ساعد في تعاطيها آثماً أثماً عظيماً ومرتكباً حراماً ومنكراً شديداً.</p>

7.	Reportase pandangan 4 Madzhab atas transaksi yang mengandung unsur <i>i'ānah alā al-ma'siyāt</i> (menolong orang lain dalam masalah kemaksiatan)	<p>الموسوعة الفقهية الكويتية (٢١١ / ٩)</p> <p>ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ كُلَّ مَا يُقْصَدُ بِهِ الْحَرَامُ، وَكُلُّ تَصَرُّفٍ يُفْضِي إِلَى مَعْصِيَةٍ فَهُوَ مُحَرَّمٌ، فَيَمْتَنِعُ بَيْعُ كُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ أَنَّ الْمُشْتَرِيَّ قَصَدَ بِهِ أَمْرًا لَا يَجُوزُ...ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّهُ: لَا يُكْرَهُ بَيْعُ مَا لَمْ تَقُمْ الْمَعْصِيَةُ بِهِ، كَبَيْعِ الْكَبْشِ النَّطُوحِ، وَالْحَمَامَةِ الطَّيَّارَةِ، وَالْحَشَبِ مِمَّنْ يَتَّخِذُ مِنْهُ الْمَعَارِفَ. بِخِلَافِ بَيْعِ السَّلَاحِ مِنْ أَهْلِ الْفِتْنَةِ؛ لِأَنَّ الْمَعْصِيَةَ تَقُومُ بِعَيْنِهِ، وَهِيَ الْإِعَانَةُ عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، وَإِنَّهُ مِنْهِيٌّ عَنْهُ. بِخِلَافِ بَيْعِ مَا يَتَّخِذُ مِنْهُ السَّلَاحُ كَالْحَدِيدِ، لِأَنَّهُ لَيْسَ مُعَدًّا لِلْقِتَالِ، فَلَا يَتَحَقَّقُ مَعْنَى الْإِعَانَةِ. وَذَهَبَ الصَّاحِبَانِ مِنَ الْخُنْفِيَّةِ، إِلَى أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ، لِأَنَّهُ إِعَانَةٌ عَلَى الْمَعْصِيَةِ، فَهُوَ مَكْرُوهٌ عِنْدَهُمَا، خِلَافًا لِلْإِمَامِ، وَلَيْسَ بِحَرَامٍ، خِلَافًا لِمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْجُمْهُورُ.</p>
8.	Teori <i>tarjih</i> atas silang pandang produk hukum yang dicetuskan oleh <i>nash</i> dan <i>Ilhāq</i>	<p>الوجيز في أصول الفقه الإسلامي (٤٤٧ / ٢)</p> <p>القسم الثالث: الترجيح بين نص وقياس: إذا وجد تعارض بين نص منقول في الكتاب والسنة، وقياس، فيرجح النص المنقول الخاص الذي دل على المطلوب بنطقه؛ لأن النص أصل بالنسبة للقياس، ومقدمات النص للاستنباط والاستدلال أقل من مقدمات القياس، فيكون أقل خللاً. وإذا لم يدل النص المنقول بنطقه على المطلوب، فتكون دلالاته ظنية وعلى درجات، فقد يكون الظن الحاصل منه أقوى من الظن الحاصل من القياس، أو مساوياً له، أو أضعف منه، ويكون الترجيح بحسب ما يقع للمجتهد، فيرجح الظن الأقوى.</p> <p>شرح الكوكب المنير لابن النجار الحنبلي (٧٤٤ / ٤)</p> <p>وَحَيْثُ انْتَهَى الْكَلَامُ عَلَى الدَّلِيلَيْنِ الْمُنْقُولَيْنِ وَالْمَعْقُولَيْنِ شَرَعَ فِي ذِكْرِ التَّرْجِيحِ فِيمَا إِذَا كَانَ أَحَدُ الدَّلِيلَيْنِ مَنْقُولًا وَالْآخَرُ مَعْقُولًا، فَقَالَ "الْمُنْقُولُ وَالْقِيَاسُ". فَإِذَا وُجِدَ تَعَارُضٌ بَيْنَ الْمُنْقُولِ وَالْقِيَاسِ وَالْمُرَادُ بِالْمُنْقُولِ: الْكِتَابُ، وَالسُّنَّةُ. فَإِنَّهُ "يُرْجَحُ" مَنْقُولٌ "خَاصٌّ دَلٌّ" عَلَى الْمَطْلُوبِ "بِنُطْقِهِ" لِأَنَّ الْمُنْقُولَ أَصْلٌ بِالنَّسْبَةِ إِلَى الْقِيَاسِ؛ وَلِأَنَّ مَقْدَمَاتِهِ أَقْلُ مِنْ مَقْدَمَاتِ الْقِيَاسِ. فَيَكُونُ أَقْلَ خِلَافًا. "وَالْإِلَّا" أَي: وَإِنْ لَمْ يَدَلَّ عَلَى الْمَطْلُوبِ بِنُطْقِهِ، مَعَ كَوْنِ الْمُنْقُولِ خَاصًّا، فَلَهُ دَرَجَاتٌ، لِأَنَّ الظَّنَّ الْحَاصِلَ مِنَ الْمُنْقُولِ الَّذِي دَلَّ عَلَى الْمَطْلُوبِ لَا يَمْتَنِقُوهُ: قَدْ يَكُونُ أَقْوَى مِنَ الظَّنِّ الْحَاصِلِ مِنَ الْقِيَاسِ، وَقَدْ يَكُونُ مُسَاوِيًا لَهُ، وَقَدْ يَكُونُ أضعفَ مِنْهُ، وَإِلَى ذَلِكَ أَشِيرَ بِقَوْلِهِ "فَمِنْهُ ضَعِيفٌ، وَقَوِيٌّ، وَمُتَوَسِّطٌ، فَ" يَكُونُ "التَّرْجِيحُ فِيهِ بِحَسَبِ مَا يَقَعُ لِلنَّاطِقِ" فَيُعْتَبَرُ الظَّنُّ الْحَاصِلُ مِنَ الْمُنْقُولِ، وَالظَّنُّ الْحَاصِلُ مِنَ الْقِيَاسِ، وَيُؤَخَّرُ بِأَقْوَى الظَّنَّيْنِ.</p>

 Madzhab Hanafi

No.	Data	Transkrip Data
1.	Kasus yang bersinggungan dengan konsep <i>i'ānah alā al-ma'siyāt</i> (menolong orang lain dalam masalah kemaksiatan)	<p>مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (٥٢٩ / ٢)</p> <p>(وَلَا تُكْرَهُ إِجَارَةُ بَيْتٍ بِالسَّوَادِ) أَي بِالْقَرْيَةِ (لِيَتَّخِذَ بَيْتٌ نَارًا أَوْ كَنِيْسَةً أَوْ بَيْعَةً أَوْ بَيْعًا) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ لِيَتَّخِذَ أَي لِيُبَاعَ (فِيهِ الْحُمْرُ) عِنْدَ الْإِمَامِ؛ لِأَنَّ الْإِجَارَةَ وَارِدَةٌ عَلَى مَنْفَعَةِ الْبَيْتِ وَلَا مَعْصِيَةَ فِيهِ وَإِنَّمَا مَعْصِيَتُهُ بِفِعْلِ الْمُسْتَأْجِرِ وَهُوَ فِعْلُ الْفَاعِلِ الْمُخْتَارِ فَقَطَعَ نِسْبَتَهُ مِنْهُ كَبَيْعِ الْجَارِيَةِ لِمَنْ لَا يَسْتَبْرِئُهَا أَوْ يَأْتِيهَا مِنْ دُبْرِهَا أَوْ بَيْعِ الْغُلَامِ مِنَ اللُّوطِيِّ كَمَا فِي التَّيْبِينِ وَعَبْرِهِ وَهَذَا صَرِيحٌ فِي جَوَازِ بَيْعِ الْغُلَامِ مِنَ اللُّوطِيِّ وَالْمُنْقُولِ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْمُعْتَبَرَاتِ أَنَّهُ يُكْرَهُ (وَعِنْدَهُمَا يُكْرَهُ) أَنْ يُؤَجَّرَ بَيْتًا لِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّهُ إِعَانَةٌ عَلَى الْمَعْصِيَةِ وَبِهِ قَالَتِ الْأَئِمَّةُ الْعَالِمَاتُ قَالُوا إِنَّ مَا ذَكَرَهُ الْإِمَامُ مُحْتَضٌ بِسَوَادِ الْكُوفَةِ؛ لِأَنَّ أَغْلَبَ أَهْلِهَا ذَمُّهُ وَأَمَّا فِي سَوَادِنَا فَأَعْلَامُ الْإِسْلَامِ ظَاهِرَةٌ فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مِنْ إِجَارَةِ الْبَيْتِ لِيَتَّخِذَهُ مَعْبَدًا وَمَفْسَدًا فِي الْأَصْحَحِّ كَمَا لَا</p>

يُمْكِنُونَ فِي الْأَمْصَارِ لِعَدَمِ الْإِذْنِ مِنَ الْحُكَّامِ فِيمَا تَغْلِبُ فِيهِ شَعَائِرُ الْإِسْلَامِ وَعَنْ هَذَا قَالَ (وَيُكْرَهُ فِي الْمِصْرِ إِجْمَاعًا وَكَذَا فِي سِوَايَ غَالِبِيهِ أَهْلَ الْإِسْلَامِ) لِمَا مَرَّ أَنَّ شَعَائِرَ الْإِسْلَامِ ظَاهِرَةٌ. (وَمَنْ حَمَلَ لِذِيٍّ حُمْرًا بِأَجْرٍ طَابَ لَهُ) عِنْدَ الْإِمَامِ (وَعِنْدَهُمَا يُكْرَهُ) لَهُ ذَلِكَ لِوُجُودِ الْإِعَانَةِ عَلَى الْمَعْصِيَةِ وَقَدْ صَحَّ أَنَّ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «لَعَنَ فِي الْحُمْرِ عَشْرًا وَعَدَّ مِنْهَا حَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَ إِلَيْهَا» وَلَهُ أَنَّ الْمَعْصِيَةَ فِي شُرَيْهَا لَا فِي حَمْلِهَا مَعَ الْحَمْلِ يُحْمَلُ عَلَى الْإِرَاقَةِ أَوْ التَّخْلِيلِ وَالْحَدِيثُ مُحْمُولٌ عَلَى الْحَمْلِ الْمُفْرُونَ بِقَصْدِ الْمَعْصِيَةِ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ إِذَا أُجْرَ دَابَّةٌ لِيُنْقَلَ عَلَيْهَا الْحُمْرُ أَوْ أُجْرَ نَفْسَهُ لِيَرَعَى الْخِتَازِيرَ وَلَا بِأَسْ بِنَيْعِ الزُّنَّارِ مِنَ التَّصَارِي وَالْقَلْنَسُوءَةِ مِنْ الْمَجُوسِيِّ وَلَوْ أَنَّ إِسْكَافًا أَمْرَهُ إِنْسَانٌ أَنْ يَتَّخِذَ لَهُ حُمْفًا عَلَى زِيِّ الْمَجُوسِيِّ أَوْ الْفَسَقَةِ أَوْ خِيَاطَا أَمْرَهُ إِنْسَانٌ أَنْ يَحِيطَ لَهُ تَوْبًا عَلَى زِيِّ الْفُسَاقِ يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ.

المبسوط للسرخسي (٩٦/٤)

(قَالَ) وَلَا يَنْبَغِي لِلْحَلَالِ أَنْ يُعَيَّنَ الْمُحْرَمَ عَلَى قَتْلِ الصَّيْدِ لِأَنَّ فِعْلَ الْمُحْرَمِ مَعْصِيَةٌ، وَالْإِعَانَةُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ مَعْصِيَةٌ فَقَدْ سَمَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمَعِينِ شَرِيكًا، وَلَا أَنَّ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ أَنْ يَأْمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُ عَنِ التَّعَرُّضِ لِلصَّيْدِ فَإِذَا اشْتَعَلَ بِالْإِعَانَةِ فَقَدْ أَتَى بِضِدِّ مَا هُوَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ فَكَانَ عَاصِبًا فِيهِ، وَلَكِنْ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ سِوَى الْإِسْتِغْفَارِ لِأَنَّ الْإِضْطِْيَاقَ لَيْسَ بِحَرَامٍ عَلَيْهِ إِنَّمَا الْمُحْرَمُ عَلَيْهِ الْإِعَانَةُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ، وَذَلِكَ مُوجِبٌ لِلتَّوْبَةِ.

تبين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (٢٨/٦)

قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: (وَجَازَ بَيْعُ الْعَصِيرِ مِنْ حَمَارٍ؛ لِأَنَّ الْمَعْصِيَةَ لَا تَقُومُ بَعَيْنِهِ بَلْ بَعْدَ تَغْيِيرِهِ بِخِلَافِ بَيْعِ السَّلَاحِ مِنْ أَهْلِ الْفِتْنَةِ؛ لِأَنَّ الْمَعْصِيَةَ تَقُومُ بَعَيْنِهِ فَيَكُونُ إِعَانَةً لَهُمْ، وَتَسْبِيحًا، وَقَدْ نُهِيتَا عَنِ التَّعَاوُنِ عَلَى الْعُدْوَانِ وَالْمَعْصِيَةِ؛ وَلِأَنَّ الْعَصِيرَ يُصْلِحُ الْأَشْيَاءَ كُلَّهَا جَائِزٌ شَرْعًا فَيَكُونُ الْفَسَادُ إِلَى اخْتِيَارِهِ. قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: (وَأَجَارَةُ بَيْتٍ لِيَتَّخِذَهُ بَيْتَ نَارٍ أَوْ يُبَاعَهُ أَوْ كَيْبَسَهُ أَوْ يُبَاعَ فِيهِ حُمْرٌ بِالسَّوَادِ) أَيُّ جَازَ إِجَارَةَ الْبَيْتِ لِيَتَّخِذَهُ مَعْبَدًا لِلْكَفَّارِ وَالْمُرَادُ بِبَيْتِ النَّارِ مَعْبَدُ الْمَجُوسِ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، وَقَالَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُكْرَهُ لِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ إِعَانَةٌ عَلَى الْمَعْصِيَةِ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) [المائدة: ٢٤]، وَلَهُ أَنَّ الْإِجَارَةَ عَلَى مَنْفَعَةِ الْبَيْتِ وَلِهَذَا يَجِبُ الْأَجْرُ بِمَجْرَدِ التَّسْلِيمِ، وَلَا مَعْصِيَةَ فِيهِ، وَإِنَّمَا الْمَعْصِيَةُ بِفِعْلِ الْمُسْتَأْجِرِ، وَهُوَ مُخْتَارٌ فِيهِ لِقَطْعِ نَسَبِيَّتِهِ عَنْهُ فَصَارَ كَبَيْعِ الْجَارِيَةِ لِمَنْ لَا يَسْتَبْرِئُهَا أَوْ يَأْتِيهَا مِنْ دُبْرِهَا أَوْ بَيْعِ الْغَلَامِ مِنْ لُوطِيٍّ وَالتَّلِيلِ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَوْ أُجْرَ لِلشُّكْنَى جَازًا، وَهُوَ لَا بَدَّ لَهُ فِيهِ مِنْ عِبَادَتِهِ، وَإِنَّمَا قَيْدُهُ بِالسَّوَادِ؛ لِأَنَّهُمْ لَا يُمْكِنُونَ مِنْ إِحْدَاتِ الْمَعْبَدِ، وَإِظْهَارِ بَيْعِ الْحُمُورِ وَالْحِتَازِيرِ فِي الْأَمْصَارِ لِظُهُورِ شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ فِيهَا فَلَا يُعَارَضُ بِإِظْهَارِ شَعَائِرِ الْكُفْرِ بِخِلَافِ السَّوَادِ قَالُوا هَذَا فِي سِوَايَ الْكُوفَةِ؛ لِأَنَّ غَالِبَ أَهْلِهَا أَهْلُ دِمَّةٍ، وَأَمَّا فِي سِوَايَ غَيْرِهَا فِيهِ شَعَائِرُ الْإِسْلَامِ ظَاهِرَةٌ فَلَا يُمْكِنُونَ فِيهَا فِي الْأَصَحِّ. قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: (وَحَمَلَ حُمْرٌ لِذِيٍّ بِأَجْرٍ) أَيُّ جَازَ ذَلِكَ أَيْضًا، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، وَقَالَ هُوَ مَكْرُوهٌ؛ لِأَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - لَعَنَ فِي الْحُمْرِ عَشْرَةَ، وَعَدَّ مِنْهَا حَامِلَهَا، وَلَهُ أَنَّ الْإِجَارَةَ عَلَى الْحَمْلِ، وَهُوَ لَيْسَ بِمَعْصِيَةٍ، وَلَا تَسْبُبٌ لَهَا، وَإِنَّمَا تَحْصُلُ الْمَعْصِيَةُ بِفِعْلِ قَاعِلِي مُخْتَارٍ، وَلَيْسَ الشُّرْبُ مِنْ ضَرُورَاتِ الْحَمْلِ؛ لِأَنَّ حَمْلَهَا قَدْ يَكُونُ لِلْإِرَاقَةِ أَوْ التَّخْلِيلِ فَصَارَ كَمَا لَوْ اسْتَأْجَرَهُ لِعَصْرِ الْعَنْبِ أَوْ قَطْفِهِ، وَالْحَدِيثُ مُحْمُولٌ عَلَى الْحَمْلِ الْمُفْرُونَ بِقَصْدِ الْمَعْصِيَةِ، وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ إِذَا أُجْرَ دَابَّةٌ لِيُنْقَلَ عَلَيْهَا الْحُمْرُ أَوْ أُجْرَ نَفْسَهُ لِيَرَعَى لَهُ الْخِتَازِيرَ فَإِنَّهُ يَطِيبُ لَهُ الْأَجْرُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، وَعِنْدَهُمَا يُكْرَهُ، وَفِي الْمَحِيطِ لَا يُكْرَهُ بَيْعُ الزُّنَّارِ مِنَ التَّصَارِي وَالْقَلْنَسُوءَةِ مِنَ الْمَجُوسِيِّ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ إِذْ لَأَلْهُمَا وَبَيْعِ الْمُكْعَبِ الْمُفَضَّضِ لِلرِّجَالِ أَنْ يَشْتَرِيَهُ لِيَلْبَسَهُ يُكْرَهُ؛ لِأَنَّهُ إِعَانَةٌ لَهُ عَلَى لُبْسِ الْحَرَامِ، وَلَوْ أَنَّ إِسْكَافًا أَمْرَهُ إِنْسَانٌ أَنْ

يَتَّخِذُ لَهُ حُفًّا عَلَى زَيْي الْمَجُوسِ أَوْ الْفَسَقَةِ أَوْ حَيَاظًا أَمَرَهُ إِتْسَانٌ أَنْ يَحْيِظَ لَهُ تَوْبًا عَلَى زَيْي
الْفَسَاقِ يَكْرَهُ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ لَهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ هَذَا تَسْبِيبٌ فِي التَّشَبُّهِ بِالْمَجُوسِ وَالْفَسَقَةِ.

حاشية الشلبي على تبين الحقائق شرح كنز الدقائق (٢٩/٦)

(قَوْلُهُ: وَقَالَ هُوَ مَكْرُوهٌ) قَالَ فَخَرُ الْإِسْلَامُ قَوْلُ أَبِي حَنِيْفَةَ قِيَّاسٌ، وَقَوْلُهُمَا اسْتِحْسَانٌ. اهـ غَايَةٌ،
وَكَتَبَ مَا نَصَّهُ؛ لِأَنَّهُ إِعَانَةٌ عَلَى الْمَعْصِيَةِ فَيُكْرَهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}
[المائدة: ٢]. اهـ غَايَةٌ (قَوْلُهُ: وَعَدَّ مِنْهَا حَامِلَهَا)، وَإِنَّمَا لُعِنَ الْحَامِلُ لِإِعَانَتِهِ عَلَى الْمَعْصِيَةِ. اهـ
غَايَةٌ (قَوْلُهُ: الْمُفْرُوقُ بِقَصْدِ الْمَعْصِيَةِ) أَيُّ، وَهُوَ شُرْبُ الْخَمْرِ، وَلَا كَلَامَ لَنَا فِيهِ فَإِنَّ ذَلِكَ مَكْرُوهٌ.
اهـ غَايَةٌ.

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (٢٣/٨)

وَلَوْ اسْتَأْجَرَهُ لِيُنْفِلَ الْمَيْتَ الْمُشْرِكَ إِلَى الْمَقْبَرَةِ يَجُوزُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَفِي الْمُضَمَّرَاتِ الْغِنَاءُ
حَرَامٌ فِي جَمِيعِ الْأَدْيَانِ، وَكَذَا إِذَا أَوْصَى بِمَا هُوَ مَعْصِيَةٌ عِنْدَنَا، وَعِنْدَ أَهْلِ الْكِتَابِ لَا يَجُوزُ وَذَكَرَ
مِنْهَا الْوَصِيَّةَ لِلْمُعْتَبِينَ وَالْمُعْتَبَاتِ، وَقَالَ ظَهِيرُ الدِّينِ مَنْ قَالَ لِمُقْرَبِي زَمَانًا أَحْسَنْتَ عِنْدَ
قِرَائَتِهِ يَكْفُرُ، وَفِي الْكُفْرَى رَجُلٌ يَجْمَعُ الْمَالَ وَهُوَ كَانَ مُطْرِبًا مُعْتَبًا هَلْ يُبَاحُ لَهُ ذَلِكَ إِنْ كَانَ مِنْ
غَيْرِ شَرْطِ يُبَاحُ لَهُ وَإِنْ كَانَ بِالشَّرْطِ يَرُدُّهُ عَلَى أَصْحَابِهِ وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ يَتَصَدَّقُ بِهِ، وَفِي الْعَتَابِيَّةِ،
وَأَمَّا الْمَعْصِيَةُ فَتُحَرِّمُ أَنْ يَسْتَأْجَرَ نَاجِحَةً أَوْ مُعْتَبَةً أَوْ لِتُعْلِمَ الْغِنَاءَ وَفِي فَتَاوَى أَهْلِ سَمَرْقَنْدٍ اسْتَأْجَرَ
رَجُلًا لِيُنَجِّحَ لَهُ مِرْمَارًا أَوْ ظَنْبُورًا أَوْ بَرَبِطًا فَفَعَلَ يَطِيبُ لَهُ الْأَجْرُ إِلَّا أَنَّهُ يَأْتُمُّ فِي الْإِعَانَةِ عَلَى
الْمَعْصِيَةِ، وَلَوْ اسْتَأْجَرَ الْمُسْلِمَ لِيُنَبِّئَ لَهُ بَيْعَةً أَوْ كَنِيْسَةً جَازَ وَيَطِيبُ لَهُ الْأَجْرُ، وَلَوْ اسْتَأْجَرْتَهُ
امْرَأَةً لِيَكْتُبَ لَهَا قِرْآنًا أَوْ غَيْرَهُ جَازَ وَيَطِيبُ لَهُ الْأَجْرُ إِذَا بَيَّنَّ الشَّرْطَ وَهُوَ إِعْدَادُ الْخُطِّ وَقَدْرُهُ،
وَلَوْ اسْتَأْجَرَ مُسْلِمًا لِيَحْمِلَ لَهُ خَمْرًا وَلَمْ يَقُلْ لِأَشْرَبِهِ جَازَتْ الْإِجَارَةُ عَلَى قَوْلِ الْإِمَامِ خَلِيفًا لَهَا
وَفِي الْمُحِيطِ السَّارِقُ أَوْ الْعَاصِبُ لَوْ اسْتَأْجَرَ رَجُلًا يَحْمِلُ الْمَغْضُوبَ أَوْ الْمَسْرُوقَ لَمْ يَجْرُ؛ لِأَنَّ
نَقَلَ مَالِ الْعَبْرِ مَعْصِيَةٌ اهـ.

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (٣٩١/٦)

(و) جَازَ (بَيْعَ عَصِيرٍ) عِنَبٍ (مِمَّنْ) يُعْلَمُ أَنَّهُ (يَتَّخِذُهُ خَمْرًا) لِأَنَّ الْمَعْصِيَةَ لَا تَقُومُ بِعَيْنِهِ بَلْ
بَعْدَ تَغْيِيرِهِ وَقِيلَ يُكْرَهُ لِإِعَانَتِهِ عَلَى الْمَعْصِيَةِ وَتَقْلُ الْمُصَنَّفُ عَنِ السَّرَاجِ وَالْمُسْكِلاتِ أَنَّ قَوْلَهُ
مِمَّنْ أَيُّ مِنْ كَافِرٍ أَمَّا بَيْعُهُ مِنَ الْمُسْلِمِ فَيُكْرَهُ وَمَثَلُهُ فِي الْجَوْهَرَةِ وَالْبِقَائِيِّ وَغَيْرِهِمَا زَادَ
الْقَهْطَانِيُّ مَعْرِيًّا لِلْخَانِيَّةِ أَنَّهُ يُكْرَهُ بِالِاتِّفَاقِ. (بِخِلَافِ بَيْعِ أَمْرَدٍ مِمَّنْ يَلُوطُ بِهِ وَيَبِيعُ سِلَاحَ
مِنْ أَهْلِ الْفِتْنَةِ) لِأَنَّ الْمَعْصِيَةَ تَقُومُ بِعَيْنِهِ ثُمَّ الْكَرَاهَةُ فِي مَسْأَلَةِ الْأَمْرَدِ مَصْرَحٌ بِهَا فِي بَيُوعِ
الْخَانِيَّةِ وَغَيْرِهَا وَاعْتَمَدَهُ الْمُصَنَّفُ عَلَى خِلَافِ مَا فِي الرَّبَلِيِّ وَالْعَيْنِيِّ وَإِنْ أَقْرَهُ الْمُصَنَّفُ فِي
بَابِ الْبَغَاةِ: قُلْتُ: وَقَدْ مَنَّا تَمَّةً مَعْرِيًّا لِلنَّهْرِ أَنْ مَا قَامَتْ الْمَعْصِيَةُ بِعَيْنِهِ يُكْرَهُ بَيْعُهُ تَحْرِيمًا وَإِلَّا
فَتَنْزِيهًا. فَلْيُحْفَظْ تَوْفِيقًا. (و) جَازَ تَغْيِيرُ كَنِيْسَةٍ وَ (حَمْلُ خَمْرٍ ذَمِّيٍّ) بِنَفْسِهِ أَوْ دَابَّتِهِ (بِأَجْرِ). لَا
عَضْرُهَا لِقِيَامِ الْمَعْصِيَةِ بِعَيْنِهِ.

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٣٦٢/٥)

وقال في «القدوري»: في النصرية تحت مسلم لا تنصب في بيته صليبا، وتصلي في بيته حيث
شاءت، ومن سأل من أهل الذمة مسلما عن طريق البيعة فلا ينبغي له أن يدل عليه؛ لأنه
أعانه على المعصية، ولا بأس بالذهاب إلى ضيافة أهل الذمة؛ لأنه نوع بر، وإذا أجز المسلم
نفسه من ذي لعصر له فيتخذ خمرا فهو مكروه، ولو أجز نفسه ليعمل في الكنيسة ويعمرها
فلا بأس به؛ إذ ليس في نفس العمل معصية.

حاشية الطحطاوي على الدر المختار ج ١١ ص ١٥٥

قوله (وجاز بيع عصير) كما جاز بيع الجارية المغنية، والكبش النطوح، والحمامة الطيارة،

		<p>والديك المقاتل؛ لأنه ليس عينها منكرا، وإنما المنكر في استعماله المحظور. وفي البرهان ومنع الشافعي ومالك لقوله تعالى: «وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ» [المائدة: ٢] ولنا قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة: ٢٧٥] انتهى. قوله: أي: من كافر فيه أنه لا يظهر إلا على قول من قال: إن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، والأصح خطابهم، وعليه فيكون إعانة على المعصية، فلا فرق حينئذ بين المسلم، والكافر في بيع العصير منهما، فتدبر. وفي القهستاني: وفيه إشارة إلى أنه لو لم يعلم أنه يتخذ الخمر لم يكرهه بلا خلاف، وإلى أن يبيع العنب، والكرم منه لم يكرهه بلا خلاف، كما في المحيط، لكن في بيع الخزانة أن يبيع العنب على الخلاف، انتهى. قوله: (مَعْرِبًا لِلنَّهْرِ) قال فيه من باب البغاة، وما في بيوع الخانية: من أنه يكره بيع الأمر من فاسق يعلم أنه يعصي- به مشكل، والذي جزم به الشارح في الحظر والإباحة: أنه لا يكره بيع جارية ممن يأتيها في دبرها، أو بيع غلام من لوطي، وهو الموافق لما مر. وعندني أن ما في الخانية محمول على كراهة التنزيه وهو الذي تظمن إليه النفوس؛ إذ لا يشكل أنه، وإن لم يكن معينا، أنه متسبب في الإعانة، ولم أرى من تعرض لهذا. انتهى.</p> <p>الدرر المباحة في الحظر والإباحة - المجلد ١ - الصفحة ٧٦ - جامع الكتب الإسلامية</p> <p>لو أجز نفسه ليعمل في الكنيسة، ويعمرها، لا بأس به، لأنه لا معصية في عين العمل، ولو أجز نفسه ليرعى له الخنازير، يطيب له الأجر عند الإمام، وعندهما يكره.</p>
2.	Pemetaan atas kasus yang bersinggungan dengan sesuatu yang dianggap kemaksiatan	<p>الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (٤/٢٦٨)</p> <p>(وَيُكْرَهُ) تَحْرِيمًا (بَيْعُ السَّلَاحِ مِنْ أَهْلِ الْفِتْنَةِ إِنْ عَلِمَ) لِأَنَّهُ إِعَانَةٌ عَلَى الْمَعْصِيَةِ (وَيُبَيْعُ مَا يَتَّخِذُ مِنْهُ كَالْحَدِيدِ) وَنَحْوَهُ يُكْرَهُ لِأَهْلِ الْحَرْبِ (لَا) لِأَهْلِ الْبَغْيِ لِعَدَمِ تَفَرُّغِهِمْ لِعَمَلِهِ سِلَاحًا لِقُرْبِ زَوَالِهِمْ، بِخِلَافِ أَهْلِ الْحَرْبِ زَيْلِيًّا.</p> <p>مُظَلَّبٌ فِي كِرَاهَةِ بَيْعِ مَا تَقُومُ الْمَعْصِيَةُ بَعِيْنِهِ (قَوْلُهُ: تَحْرِيمًا) بَحْثٌ لِصَاحِبِ الْبَحْرِ حَيْثُ قَالَ: وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ الْكِرَاهَةَ تَحْرِيمِيَّةٌ لِتَعْلِيلِهِمْ بِالْإِعَانَةِ عَلَى الْمَعْصِيَةِ ط (قَوْلُهُ: مِنْ أَهْلِ الْفِتْنَةِ) شَمِلَ الْبَغَاةَ وَقَطَعَ الطَّرِيقَ وَاللُّصُوفَ حَجْرًا (قَوْلُهُ: إِنْ عَلِمَ) أَيُّ إِنْ عَلِمَ الْبَائِعُ أَنَّ الْمُشْتَرِيَّ مِنْهُمْ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ إِعَانَةٌ عَلَى الْمَعْصِيَةِ)؛ لِأَنَّهُ يُقَاتِلُ بَعِيْنِهِ، بِخِلَافِ مَا لَا يُقَاتِلُ بِهِ إِلَّا بِصَنْعَةٍ تَحْدُثُ فِيهِ كَالْحَدِيدِ، وَنَظِيرُهُ كِرَاهَةُ بَيْعِ الْمَعَارِفِ؛ لِأَنَّ الْمَعْصِيَةَ تُقَامُ بِهَا عَيْنُهَا، وَلَا يُكْرَهُ بَيْعُ الْحَشَبِ الْمُتَّخِذَةِ هِيَ مِنْهُ، وَعَلَى هَذَا بَيْعُ الْحَمْرِ لَا يَصِحُّ وَيَصِحُّ بَيْعُ الْعَنْبِ. وَالْقُرْبُ فِي ذَلِكَ كَلَّمَهُ مَا ذَكَرْنَا فَتَحَّ وَمثله في البحر عن البدائع، وكذا في الزيلعي لكنه قال بعده وكذا لا يُكْرَهُ بَيْعُ الْجَارِيَةِ الْمُغْنِيَّةِ وَالْكَبْشِ النَّطُوحِ وَالتِّدْيِ الْمَقَاتِلِ وَالْحَمَامَةَ الطَّيَّارَةَ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ عَيْنُهَا مُنْكَرًا وَإِنَّمَا الْمُنْكَرُ فِي اسْتِعْمَالِهَا الْمَحْظُورِ. اهـ قُلْتُ: لَكِنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ تُقَامُ الْمَعْصِيَةُ بَعِيْنِهَا لَكِنَّ لَيْسَتْ هِيَ الْمَقْصُودَ الْأَصْلِيَّ مِنْهَا، فَإِنَّ عَيْنَ الْجَارِيَةِ لِلْخِدْمَةِ مَثَلًا وَالْعِنَاءَ عَارِضٌ فَلَمْ تَكُنْ عَيْنَ التُّكْرِ، بِخِلَافِ السَّلَاحِ فَإِنَّ الْمَقْصُودَ الْأَصْلِيَّ مِنْهُ هُوَ الْمَحَارَبَةُ بِهِ فَكَانَ عَيْنُهُ مُنْكَرًا إِذَا بَيْعَ لِأَهْلِ الْفِتْنَةِ، فَصَارَ الْمُرَادُ بِمَا تُقَامُ الْمَعْصِيَةُ بِهِ مَا كَانَ عَيْنُهُ مُنْكَرًا بَلَا عَمَلٍ صَنْعَةٍ فِيهِ، فَخَرَجَ نَحْوُ الْجَارِيَةِ الْمُغْنِيَّةِ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ عَيْنَ الْمُنْكَرِ، وَنَحْوُ الْحَدِيدِ وَالْعَصِيرِ؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ يُعْمَلُ مِنْهُ عَيْنَ الْمُنْكَرِ لَكِنَّهُ بِصَنْعَةٍ تَحْدُثُ فَلَمْ يَكُنْ عَيْنُهُ، وَبِهَذَا ظَهَرَ أَنَّ بَيْعَ الْأَمْرَدِ مِمَّنْ يَلُوطُ بِهِ مِثْلَ الْجَارِيَةِ الْمُغْنِيَّةِ فَلَيْسَ مِمَّا تَقُومُ الْمَعْصِيَةُ بَعِيْنِهِ، خِلَافًا لِمَا ذَكَرَهُ الْأَمْسَقِيُّ وَالشَّارِحُ فِي بَابِ الْحَطْرِ وَالْإِبَاحَةِ، وَيَأْتِي تَمَامُهُ قَرِيبًا (قَوْلُهُ: يُكْرَهُ لِأَهْلِ الْحَرْبِ) مُقْتَضَى مَا نَقَلْنَاهُ عَنْ الْفَتْحِ عَدَمَ الْكِرَاهَةِ، إِلَّا أَنْ يُقَالَ: الْمَنْفِيُّ كِرَاهَةُ التَّحْرِيمِ وَالْمُثَبِّتُ كِرَاهَةُ التَّنْزِيهِ؛ لِأَنَّ الْحَدِيدَ وَإِنْ لَمْ تُقَمْ الْمَعْصِيَةُ بَعِيْنِهِ لَكِنَّ إِذَا كَانَ بَيْعُهُ مِمَّنْ يَعْمَلُهُ سِلَاحًا كَانَ فِيهِ نَوْعٌ إِعَانَةٍ تَأْمَلُ (قَوْلُهُ: نَهْرٌ) عِبَارَتُهُ: وَعُرِفَ بِهَذَا أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ بَيْعُ مَا لَمْ تُقَمْ الْمَعْصِيَةُ بِهِ كَبَيْعِ الْجَارِيَةِ الْمُغْنِيَّةِ وَالْكَبْشِ النَّطُوحِ وَالْحَمَامَةَ الطَّيَّارَةَ وَالْعَصِيرَ وَالْحَشَبَ الَّذِي يَتَّخِذُ مِنْهُ</p>

العازف، وما في بيع الحائية من أنه يكره بيع الأمرد من فاسق يعلم أنه يعصي به مشكلاً. والذي جزم به في الحظر والإباحة أنه لا يكره بيع جارية ممن يأنيها في دبرها أو يبيع الغلام من لوطي وهو الموقف لما مر. وعندي أن ما في الحائية محمول على كراهة التزويه والمنهي هو كراهة التحريم، وعلى هذا فيكره في الكل تنزيهاً، وهو الذي إليه تظمن النفس؛ لأنه تسبب في الإغاة، ولم أر من تعرض لهذا، والله تعالى الموفق اهـ

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (٦/٣٩١)

(و) جاز بيع عصير عنبٍ ممن يعلم أنه يتخذ حمرًا لأن المعصية لا تقوم بعينه بل بعد تغيره وقيل يكره لإعانتة على المعصية ونقل المصنف عن السراج والمشكلات أن قوله ممن أي من كافر أما بيعه من المسلم فيكره ومثله في الجوهرة والباقي وغيرهما زاد الفهستاني معرباً للحائية أنه يكره بالإتفاق. (بخلاف بيع أمرد ممن يلوظ به ويبيع سلاح من أهل الفتنه) لأن المعصية تقوم بعينه ثم الكراهة في مسألة الأمرد مصرح بها في بيع الحائية وغيرها واعتداه المصنف على خلاف ما في الزيلعي والعيني وإن أقره المصنف في باب البعاهة؛ قلت: وقد منّا ثمة معرباً للنهر أن ما قامت المعصية بعينه يكره بيعه تحريماً وإلا فتزويهاً. فليحفظ توفيقاً. (و) جاز تعبير كنيسته و (حمل حمر ذمي) بنفسه أو ذابته (باجر). لا عصرها لقيام المعصية بعينه. (و) جاز إجازة بيت سواد الكوفة أي قراها (لا يغيرها على الأصح) وأما الأمصار وقرى غير الكوفة فلا يمكن لظهور شعار الإسلام فيها وخص سواد الكوفة، لأن غالب أهلها أهل الذمة (ليتخذ بيت نار أو كنيسته أو بيعة أو يباع فيه الخنزير) وقالوا لا ينبغي ذلك لأنه إغاة على المعصية وبه قالت الثلاثة زيلعي.

(قوله وجاز) أي عنده لا عندهما بيع عصير عنب أي معصوه المستخرج منه فلا يكره بيع العنب والكرم منه بلا خلاف، كما في المحيط لكن في بيع الخزانة أن يبيع العنب على الخلاف فهستاني (قوله ممن يعلم) فيه إشارة إلى أنه لو لم يعلم لم يكره بلا خلاف فهستاني (قوله لا تقوم بعينه الخ) يؤخذ منه أن المراد بما لا تقوم المعصية بعينه ما يحدث له بعد البيع وصف آخر يكون فيه قيام المعصية وأن ما تقوم المعصية بعينه ما توجد فيه على وصفه الموجود حالة البيع كالأمرد والسلاح ويأتي تمام الكلام عليه (قوله أما بيعه من المسلم فيكره) لأنه إغاة على المعصية فهستاني عن الجواهر. أقول: وهو خلاف إطلاق المتون وتعليل الشروح بما مر وقال ط: وفيه أنه لا يظهر إلا على قول من قال إن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة والأصح خطابهم وعليه فيكون إغاة على المعصية، فلا فرق بين المسلم والكافر في بيع العصير منهما فتدبراه ولا يرد هذا على الإطلاق والتعليل المنار. (قوله على خلاف ما في الزيلعي والعيني) ومثله في التهاية والكفاية عن إجازات الإمام السرخسي. (قوله معرباً للنهر) قال فيه من باب البعاهة وعلم من هذا أنه لا يكره بيع ما لم تقم المعصية به كبيع الجارية المعنوية والكبش التطوح والحمامة الطيارة والعصير والحشب ممن يتخذ منه العازف، وأما في بيع الحائية من أنه يكره بيع الأمرد من فاسق يعلم أنه يعصي به مشكلاً. والذي جزم به الزيلعي في الحظر والإباحة أنه لا يكره بيع جارية ممن يأنيها في دبرها أو يبيع غلام من لوطي، وهو الموقف لما مر وعندي أن ما في الحائية محمول على كراهة التزويه، وهو الذي تظمن إليه النفوس إذ لا يشك أنه وإن لم يكن معيناً أنه متسبب في الإغاة ولم أر من تعرض لهذا اهـ وفي حاشية الشلي على المحيط اشترى المسلم الفاسق عبداً أمرد وكان ممن يعتاد إثبات الأمرد بغيره على بيعه (قوله فليحفظ توفيقاً) بأن يحمل ما في الحائية من إثبات الكراهة على التزويه، وما في الزيلعي وغيره من نفيها على التحريم، فلا مخالفة وأقول

هَذَا التَّوْفِيقُ غَيْرُ ظَاهِرٍ لِأَنَّهُ قَدَّمَ أَنَّ الْأَمْرَ مِمَّا تَقُومُ الْمُعْصِيَةُ بِعَيْنِهِ وَعَلَى مُفْتَضَى مَا ذَكَرَهُ هُنَا يَتَعَيَّنُ أَنَّ تَكْوُنَ الْكِرَاهَةَ فِيهِ لِلتَّحْرِيمِ فَلَا يَصِحُّ حَمْلُ كَلَامِ الرَّبْلِيِّ وَعَدْرِهِ عَلَى التَّنْزِيهِ، وَإِنَّمَا مَبْنَى كَلَامِ الرَّبْلِيِّ وَعَدْرِهِ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ لَيْسَ مِمَّا تَقُومُ الْمُعْصِيَةُ بِعَيْنِهِ كَمَا يَظْهَرُ مِنْ عِبَارَتِهِ قَرِيبًا عِنْدَ قَوْلِهِ وَجَارَ إِجَارَهُ بَيَّنَّتْ. (قَوْلُهُ وَجَارَ تَعْمِيرُ كَيْبَسَةَ) قَالَ فِي الْحَاثِيَةِ: وَلَوْ أُجِرَ نَفْسُهُ لِيَعْمَلَ فِي الْكَيْبَسَةِ وَيُعْمَرَهَا لَا بَأْسَ بِهِ لِأَنَّهُ لَا مُعْصِيَةَ فِي عَيْنِ الْعَمَلِ (قَوْلُهُ وَحَمَلَ حَمْرَ دِجِّي) قَالَ الرَّبْلِيُّ: وَهَذَا عِنْدَهُ وَقَالَ هُوَ مَكْرُوهٌ " لِأَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «لَعَنَ فِي الْحُمْرِ عَشْرَةَ وَعَدَّ مِنْهَا حَامِلَهَا» وَلَهُ أَنَّ الْإِجَارَةَ عَلَى الْحَمْلِ وَهُوَ لَيْسَ بِمُعْصِيَةٍ، وَلَا سَبَبَ لَهَا وَإِنَّمَا تَحْضُلُ الْمُعْصِيَةُ بِفِعْلِ فَاعِلٍ مُخْتَارٍ، وَلَيْسَ الشَّرْبُ مِنْ ضَرُورَاتِ الْحَمْلِ، لِأَنَّ حَمْلَهَا قَدْ يَكُونُ لِلْإِرَاقَةِ أَوْ لِلتَّحْلِيلِ، فَصَارَ كَمَا إِذَا اسْتَأْجَرَهُ لِعَضْرِ الْعَنْبِ أَوْ قَطْعِهِ وَالْحَدِيثُ مُحْمُولٌ عَلَى الْحَمْلِ الْمُفْرُوقِ بِقَصْدِ الْمُعْصِيَةِ اه رَادَ فِي التَّهَابَةِ وَهَذَا قِيَاسٌ وَقَوْلُهُمَا اسْتِحْسَانٌ، ثُمَّ قَالَ الرَّبْلِيُّ: وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ لَوْ أُجِرَ دَابَّةٌ لِيُنْقَلُ عَلَيْهَا الْحُمْرُ أَوْ أُجِرَ نَفْسُهُ لِيَرْعَى لَهُ الْخَنَازِيرَ يَطِيبُ لَهُ الْأَجْرُ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا يُكْرَهُ. وَفِي الْمَحِيطِ لَا يُكْرَهُ بَيْعُ الرِّزَانِيرِ مِنَ النَّصْرَانِيِّ وَالْقَلْبَسُورَةِ مِنَ الْمُجُوسِيِّ، لِأَنَّ ذَلِكَ إِذْ لَأَلَّ لِهَمَّا وَيَبِيعُ الْمَكْعَبَ الْمُفَضِّضَ لِلرَّجُلِ إِنْ لِيَلْبَسَهُ يُكْرَهُ، لِأَنَّهُ إِعَانَةٌ عَلَى لُبْسِ الْحَرَامِ وَإِنْ كَانَ إِسْكَافًا أَمْرُهُ إِنْسَانٌ أَنْ يَتَّخِذَ لَهُ حُفًّا عَلَى زِيِّ الْمَجُوسِ أَوْ الْفَسَقَةِ أَوْ خَبَاطًا أَمْرُهُ أَنْ يَتَّخِذَ لَهُ تَوْبًا عَلَى زِيِّ الْفَسَاقِ يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ لِأَنَّهُ سَبَبُ التَّشْبِهِ بِالْمَجُوسِ وَالْفَسَقَةِ اه (قَوْلُهُ لَا عَضْرَهَا لِقِيَامِ الْمُعْصِيَةِ بِعَيْنِهِ) فِيهِ مُنَافَاةٌ ظَاهِرَةٌ لِقَوْلِهِ سَابِقًا لِأَنَّ الْمُعْصِيَةَ لَا تَقُومُ بِعَيْنِهِ ط وَهُوَ مُنَافٍ أَيْضًا لِمَا قَدَّمَاهُ عَنِ الرَّبْلِيِّ مِنْ جَوَازِ اسْتِئْجَارِهِ لِعَضْرِ الْعَنْبِ أَوْ قَطْعِهِ، وَلَعَلَّ الْمُرَادَ هُنَا عَضْرُ الْعَنْبِ عَلَى قَصْدِ الْحُمْرِيَّةِ فَإِنَّ عَيْنَ هَذَا الْفِعْلِ مُعْصِيَةٌ بِهِذَا الْقَصْدِ، وَلِذَا أَعَادَ الصَّبِيرَ عَلَى الْحُمْرِ مَعَ أَنَّ الْعَضْرَ لِلْعَنْبِ حَقِيقَةٌ فَلَا يَبْنِي مَا مَرَّ مِنْ جَوَازِ بَيْعِ الْعَصِيرِ وَاسْتِئْجَارِهِ عَلَى عَضْرِ الْعَنْبِ هَذَا مَا ظَهَرَ لِي فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ وَجَارَ إِجَارَهُ نَبِيَّتِ الْخ) هَذَا عِنْدَهُ أَيْضًا لِأَنَّ الْإِجَارَةَ عَلَى مَنَفَعَةِ النَّبِيَّتِ، وَلِهَذَا يَجِبُ الْأَجْرُ بِمُجَرَّدِ التَّسْلِيمِ، وَلَا مُعْصِيَةَ فِيهِ وَإِنَّمَا الْمُعْصِيَةُ بِفِعْلِ الْمُسْتَأْجِرِ وَهُوَ مُخْتَارٌ فَيَنْقَطِعُ نِسْبَتُهُ عَنْهُ، فَصَارَ كَبَيْعِ الْجَارِيَةِ مِمَّنْ لَا يَسْتَبْرِئُهَا أَوْ يَأْتِيهَا مِنْ ذُبْرِ وَيَبِيعُ الْعُلَامَ مِنْ لُوطِيٍّ وَالذَّلِيلَ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَوْ أُجِرَ لِلسُّكْنَى جَارَ وَهُوَ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ عِبَادَتِهِ فِيهِ اه رَبْلِيُّ وَعَيْنِيٍّ وَمِثْلُهُ فِي التَّهَابَةِ وَالْكَفَايَةِ، قَالَ فِي الْمَنِيحِ: وَهُوَ صَرِيحٌ فِي جَوَازِ بَيْعِ الْعُلَامِ مِنَ اللُّوطِيِّ، وَالْمُنْتَقُولُ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْفَتَاوَى أَنَّهُ يُكْرَهُ وَهُوَ الَّذِي عَوْلْنَا عَلَيْهِ فِي الْمُخْتَصَرِ اه أقول: هُوَ صَرِيحٌ أَيْضًا فِي أَنَّهُ لَيْسَ مِمَّا تَقُومُ الْمُعْصِيَةُ بِعَيْنِهِ، وَلِذَا كَانَ مَا فِي الْفَتَاوَى مُشْكِلًا كَمَا مَرَّ عَنِ التَّهْرِ إِذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْعُلَامِ وَبَيْنَ النَّبِيَّتِ وَالْعَصِيرِ " فَكَانَ يَنْبَغِي لِلْمُصَنِّفِ التَّعْوِيلَ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الشَّرَاحُ فَإِنَّهُ مُقَدَّمٌ عَلَى مَا فِي الْفَتَاوَى. نَعَمْ عَلَى هَذَا التَّعْلِيلِ الَّذِي ذَكَرَهُ الرَّبْلِيُّ يُشْكَلُ الْفَرْقُ بَيْنَ مَا تَقُومُ الْمُعْصِيَةُ بِعَيْنِهِ وَبَيْنَ مَا لَا تَقُومُ بِعَيْنِهِ، فَإِنَّ الْمُعْصِيَةَ فِي السَّلَاحِ وَالْمُكْعَبِ الْمُفَضِّضِ وَنَحْوِهِ إِنَّمَا هِيَ بِفِعْلِ الشَّارِي فَلْيَتَأَمَّلْ فِي وَجْهِ الْفَرْقِ فَإِنَّهُ لَمْ يَظْهَرْ لِي وَلَمْ أَرَّ مَنْ نَبَّهَ عَلَيْهِ. نَعَمْ يَظْهَرُ الْفَرْقُ عَلَى مَا قَدَّمَهُ الشَّرَاحُ تَبَعًا لِغَيْرِهِ مِنْ التَّعْلِيلِ، لِجَوَازِ بَيْعِ الْعَصِيرِ بِأَنَّهُ لَا تَقُومُ الْمُعْصِيَةُ بِعَيْنِهِ، بَلْ بَعْدَ تَغْيِيرِهِ فَهُوَ كَبَيْعِ الْحَدِيدِ مِنْ أَهْلِ الْفِئْتَةِ، لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ يُعْمَلُ مِنْهُ السَّلَاحُ لَكِنْ بَعْدَ تَغْيِيرِهِ أَيْضًا إِلَى صِفَةِ أُخْرَى. وَعَلَيْهِ يَظْهَرُ كَوْنُ الْأَمْرِ مِمَّا تَقُومُ الْمُعْصِيَةُ بِعَيْنِهِ كَمَا قَدَّمَاهُ فَلْيَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَأَمَّا الْأَمْصَارُ) الْأَنْسَبُ فِي التَّعْبِيرِ كَالْأَمْصَارِ الْخَطِّ (قَوْلُهُ فَلَا يُمَكِّنُونَ) أَيُّ مِنَ التَّخَاذِ الْبَيْعِ وَالْكَتَائِسِ وَإِظْهَارِ بَيْعِ الْحُمُورِ وَنَحْوِ ذَلِكَ (قَوْلُهُ أَوْ كَيْبَسَةَ أَوْ بَيْعَةَ) الْأَوَّلُ مَعْبُدُ الْيَهُودِ وَالثَّانِي مَعْبُدُ النَّصَارَى ذَكَرَهُ فِي الصَّحَاحِ وَمَنْ ظَنَّ عَكْسَ هَذَا فَقَدْ سَهَا هَدَابُنْ كَمَا لَكِنْ تَطَلَّقَ الْكَيْبَسَةُ عَلَى الثَّانِي أَيْضًا كَمَا يُعْلَمُ مِنَ الْقَامُوسِ وَالْمُعْرَبِ وَالْبَيْعَةُ بِالْكَسْرِ جَمْعُهُ بَيْعٌ كَعَبٍ.

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (٨/ ٢٣١)

وَفِي التَّارِيخِيَّةِ: وَلَوْ أَجْرَ الْمُسْلِمُ نَفْسَهُ لِيَجْعَلَ فِي الْكَنِيسَةِ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَفِي الذَّخِيرَةِ إِذَا دَخَلَ يَهُودِيٌّ الْحَتَّامَ هَلْ يُبَاحُ لِلْحَادِمِ الْمُسْلِمِ أَنْ يُخْدُمَهُ قَالَ: إِنْ خَدَمَهُ طَمَعًا فِي فُلُوسِهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَإِنْ خَدَمَهُ تَعْظِيمًا لَهُ يُنْظَرُ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ لِيُبَيِّلَ قَلْبَهُ إِلَى الْإِسْلَامِ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَإِنْ فَعَلَهُ تَعْظِيمًا لَهُ كَرِهَ ذَلِكَ وَعَلَى هَذَا إِذَا دَخَلَ ذِيٌّ عَلَى مُسْلِمٍ فَقَامَ لَهُ طَمَعًا فِي إِسْلَامِهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَإِنْ قَامَ لَهُ تَعْظِيمًا لَهُ كَرِهَ لَهُ ذَلِكَ.

بَحْثٌ فِي قَضَايَا فَهْمِيَّةٍ مُعَاَصِرَةٍ (ص: ٣٦٠)

إن الإعانة على المعصية، وإن كانت حراما، ولكن لها ضوابط ذكرها الفقهاء، وليس هذا موضع بسطها، ولوالدي العلامة المفتي محمد شفيع رحمه الله تعالى في ذلك رسالة مستقلة جمع فيها النصوص الفقهية الواردة في مسألة الإعانة، ثم توصل إلى تنقيح الضابط فيها بما يلي: (إن الإعانة على المعصية حرام مطلقا بنص القرآن، أعني قوله تعالى: {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} [المائدة: ٢]. وقوله تعالى: {فلن أكون ظهيرا للمجرمين} [الفصل: ١٧]. ولكن الإعانة حقيقة هي ما قامت المعصية بعين فعل المعين، ولا يتحقق إلا بنية الإعانة أو التصريح بها، أو تعيينها في استعمال هذا الشيء، بحيث لا يحتمل غير المعصية، وما لم تقم المعصية بعينه لم يكن من الإعانة حقيقة، بل من التسبب. ومن أطلق عليه لفظ الإعانة فقد تجوز، لكونه صورة إعانة، كما مر من السير الكبير. ثم السبب إن كان سببا محركا وداعيا إلى المعصية، فالتسبب فيه حرام، كالإعانة على المعصية بنص القرآن كقوله تعالى: {ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله} [الأنعام: ١٠٨] وقوله تعالى: {فلا تخضعن بالقول} [الأحزاب: ٣٢] وقوله تعالى: {ولا تبرجن} [الأحزاب: ٣٣]. وإن لم يكن محركا وداعيا، بل موصلا محضاً، وهو مع ذلك سبب قريب بحيث لا يحتاج في إقامة المعصية به إلى إحداث صنعة من الفاعل، كبيع السلاح من أهل الفتنة، وبيع العصير ممن يتخذه خمرا، وبيع الأورد ممن يعصي به، وإجارة البيت ممن يبيع فيه الخمر، أو يتخذها كنيسة أو بيت نار وأمثالها، فكله مكروه تحريما، بشرط أن يعلم به البائع والأجر من دون تصريح به باللسان، فإنه إن لم يعلم كان معذورا، وإن علم وصرح كان داخلا في الإعانة المحرمة. وإن كان سببا بعيدا، بحيث لا يفضي إلى المعصية على حالته الموجودة، بل يحتاج إلى إحداث صنعة فيه، كبيع الحديد من أهل الفتنة وأمثالها، فتكره تنزيها) . وقد تحدث رحمه الله تعالى عن هذه المسألة في مقالة أردية له بأوضح مما ههنا، واليكم ترجمته مع تلخيص من عندي: (إن أخذنا التسبب بمعناه العام، فلن يبقى عمل مباح على وجه الأرض. فإن زراعة الحبوب الغذائية والثمار يسبب النفع لأعداء الله، وكذلك من ينسج الغياب، فإنه يهيئ لباسا للبر والفاجر، وربما يستعمله الفاجر في فجوره ... فلا بد إذن من الفرق بين السبب القريب والبعيد. فالسبب البعيد لا حرمة فيه. أما السبب القريب، فهو أيضا على قسمين: القسم الأول ما كان باعثا للإثم بمعنى كونه محركا له، بحيث لولا هذا السبب، لما صدرت المعصية. وإن إحداث مثل هذا السبب حرام كارتكاب المعصية سواء بسواء، وإن هذا القسم من السبب قال فيه الشاطبي في الموافقات: إن إيقاع السبب إيقاع للمسبب ... وبما أن إحداث مثل هذا السبب في حكم ارتكاب المعصية بالذات، فتنسب المعصية إلى المسبب، ولا تنقطع هذه النسبة عنه بتدخل فعل فاعل مختار. والقسم الثاني من السبب القريب، ما ليس بمحرك للمعصية في نفسه، بل تصدر المعصية بفعل فاعل مختار، مثل بيع ممن يتخذه خمرا، أو إجارة النار لمن يتعبد فيها للأصنام، فإن هذا البيع أو الإجارة وإن كان سببا قريبا للمعصية، ولكنه ليس جالبا أو محركا للمعصية في نفسه ... وحكم هذا النوع من السبب القريب أن البائع أو المؤجر إن قصد بذلك إعانة المشتري أو المستأجر على معصيته، فهو حرام قطعا. أما إذا لم ينو بذلك المعصية، فله حالتان: الحالة الأولى أنه لا يعلم

		<p>أن المشتري يتخذ من العصير خمرا. وفي هذه الحالة يجوز البيع بلا كراهة. أما إذا علم أنه يتخذ خمرا، فإن البيع مكروه... فإن كان المبيع يستعمل للمعصية بعينه، من غير احتياج إلى تغيره، فالكراهة تحريرية، وإلا فهي تنزيهية).</p> <p>خلاصة الكلام في مسألة الإعانة على الحرام في المذهب الحنفي (ص. ٦٧)</p> <p>الخانمة: اتضح من المسائل المذكورة أن ضابط الإعانة على الحرام على مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه، هو: أن ما قامت المعصية بعينه فمكروه كبيع الخمر والمزاميز. ومعنى بعينه: أن عينه منكراً لا تقبل إلا الفعل المحظور. وأن ما لم تقم المعصية بعينه فغير مكروه، ويطيب أجره، ومعنى ذلك أن عينه ليست منكراً، بأن المقصود الأصلي منها ليس المعصية، وإنما هي أمر عارض يحصل بفعل فاعل مختار فتقطع نسبه عن البائع أو غيره. أما في الأعمال فيكفي فيما لم تقم المعصية بعينه أن يتوسط فعل فاعل مختار، كما في رعي الخنازير وتعمير الكنيسة، والله ولي التوفيق.</p>
3.	<p>Klasifikasi Status Kenegaraan & Implikasinya</p>	<p>فتح القدير للكمال ابن الهمام (٥٨/٦)</p> <p>قِيلَ أَمْصَارُ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةٌ: أَحَدُهَا مَا مَصَّرَهُ الْمُسْلِمُونَ كَالْكُوفَةِ وَالْبَصْرَةَ وَبَغْدَادَ وَوَاسِطَ، فَلَا يَجُوزُ فِيهَا إِحْدَاثُ بَيْعَةٍ وَلَا كَيْبَسَةٍ وَلَا مُحْتَمَجٍ لِصَلَاتِهِمْ وَلَا صَوْمَعَةٍ بِإِجْمَاعِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَلَا يُمَكِّنُونَ فِيهِ مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَالتَّحَاذِ الْخَنَازِيرِ وَصَرْبِ التَّافُوسِ. وَثَانِيهَا مَا فَتَحَهُ الْمُسْلِمُونَ عَنُودَ فَلَا يَجُوزُ فِيهَا إِحْدَاثُ شَيْءٍ بِالإِجْمَاعِ، وَمَا كَانَ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ هَلْ يَجِبُ هَدْمُهُ؟ فَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ فِي قَوْلِ وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ: يَجِبُ. وَعِنْدَنَا جَعَلْنَاهُمْ ذِمَّةً أَمْرُهُمْ أَنْ يَجْعَلُوا كَنَائِسَهُمْ مَسَاكِينَ، وَيُمنَعُ مِنْ صَلَاتِهِمْ فِيهَا وَلَكِنْ لَا تُهْدَمُ، وَهُوَ قَوْلُ لِلشَّافِعِيِّ وَرِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ: لِأَنَّ الصَّحَابَةَ فَتَحُوا كَثِيرًا مِنَ الْبِلَادِ عَنُودَ، وَلَمْ يَهْدِمُوا كَيْبَسَةً، وَلَا دَيْرًا، وَلَمْ يُنْقَلْ ذَلِكَ قَطُّ. وَثَالِثُهَا مَا فُتِحَ صَلْحًا، فَإِنْ صَلَحَتْ عَلَى أَنَّ الْأَرْضَ لَهُمْ وَالْحَرَجَ لَنَا جَازَ إِحْدَاثُهُمْ، وَإِنْ صَلَحَتْ عَلَى أَنَّ النَّارَ لَنَا وَيُؤَدُّونَ الْحِزْبَةَ فَالْحُكْمُ فِي الْكَنَائِسِ عَلَى مَا يُوَقِّعُ عَلَيْهِ الصُّلْحُ، فَإِنْ صَلَحَتْ عَلَى شَرْطِ تَمْكِينِ الْإِحْدَاثِ لَا يَمْنَعُهُمْ، إِلَّا أَنَّ الْأَوَّلَ أَنْ لَا يَصْلَحَهُمْ إِلَّا عَلَى مَا وَقَعَ عَلَيْهِ صَلْحُ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مِنْ عَدَمِ إِحْدَاثِ شَيْءٍ مِنْهَا، وَإِنْ وَقَعَ الصُّلْحُ مُظْلَقًا لَا يَجُوزُ الْإِحْدَاثُ وَلَا يُعْرَضُ لِلْقَدِيمَةِ وَيُمنَعُونَ مِنْ صَرْبِ التَّافُوسِ وَشُرْبِ الْخَمْرِ وَالتَّحَاذِ الْخَنَازِيرِ بِالإِجْمَاعِ انْتَهَى.</p> <p>الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (٢٠٣/٤)</p> <p>[تَنْبِيهٌ] فِي الْفَتْحِ: قِيلَ الْأَمْصَارُ ثَلَاثَةٌ مَا مَصَّرَهُ الْمُسْلِمُونَ، كَالْكُوفَةِ وَالْبَصْرَةَ وَبَغْدَادَ وَوَاسِطَ، وَلَا يَجُوزُ فِيهِ إِحْدَاثُ ذَلِكَ إِجْمَاعًا وَمَا فَتَحَهُ الْمُسْلِمُونَ عَنُودَ فَهُوَ كَذَلِكَ، وَمَا فَتَحَهُ صَلْحًا فَإِنْ وَقَعَ عَلَى أَنَّ الْأَرْضَ لَهُمْ جَازَ الْإِحْدَاثُ وَإِلَّا فَلَا إِذَا شَرَطُوا الْإِحْدَاثَ أَهْمُ لِحْصَا وَعَلَيْهِ فَقَوْلُهُ: وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُحْدِثُوا مُقَبَّدًا بِمَا إِذَا لَمْ يَقَعِ الصُّلْحُ عَلَى أَنَّ الْأَرْضَ لَهُمْ أَوْ عَلَى الْإِحْدَاثِ، لَكِنَّ ظَاهِرَ الرِّوَايَةِ أَنَّهُ لَا اسْتِثْنَاءَ فِيهِ كَمَا فِي الْبَحْرِ وَالتَّهْر. قُلْتُ: لَكِنْ إِذَا صَلَحَتْ عَلَى أَنَّ الْأَرْضَ لَهُمْ فَلَهُمْ الْإِحْدَاثُ إِلَّا إِذَا صَارَ مِصْرًا لِلْمُسْلِمِينَ بَعْدَ فَإِنَّهُمْ يُمنَعُونَ مِنَ الْإِحْدَاثِ بَعْدَ ذَلِكَ، ثُمَّ لَوْ تَحَوَّلَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ ذَلِكَ الْمِصْرِ إِلَّا نَفَرًا يَسِيرًا فَلَهُمْ الْإِحْدَاثُ أَيْضًا، فَلَوْ رَجَعَ الْمُسْلِمُونَ إِلَيْهِ لَمْ يَهْدِمُوا مَا أُحْدِثَ قَبْلَ عَوْدِهِمْ كَمَا فِي شَرْحِ السَّيْرِ الْكَبِيرِ، وَكَذَا قَوْلُهُ وَمَا فُتِحَ عَنُودَ فَهُوَ كَذَلِكَ لَيْسَ عَلَى إِظْلَافِهِ أَيْضًا بَلْ هُوَ فِيمَا قَسِمَ بَيْنَ الْعَانِيَيْنِ أَوْ صَارَ مِصْرًا لِلْمُسْلِمِينَ، فَقَدْ صَرَّحَ فِي شَرْحِ السَّيْرِ بِأَنَّهُ لَوْ ظَهَرَ عَلَى أَرْضِهِمْ وَجَعَلْنَاهُمْ ذِمَّةً لَا يُمنَعُونَ مِنْ إِحْدَاثِ كَيْبَسَةٍ لِأَنَّ الْمَنَعَ مُحْتَضٌ بِأَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ الَّتِي تُقَامُ فِيهَا الْجُمُعُ وَالْحُدُودُ، فَلَوْ صَارَتْ مِصْرًا لِلْمُسْلِمِينَ مُنْعُوا مِنَ الْإِحْدَاثِ، وَلَا تُتْرَكُ لَهُمْ الْكَنَائِسُ الْقَدِيمَةُ أَيْضًا كَمَا لَوْ قَسَمَهَا بَيْنَ الْعَانِيَيْنِ لَكِنْ لَا تُهْدَمُ، بَلْ يُجْعَلُهَا مَسَاكِينَ لَهُمْ لِأَنَّهَا مَمْلُوكَةٌ لَهُمْ، بِخِلَافِ مَا صَلَحَتْهُمُ</p>

		<p>عَلَيْهَا قَبْلَ الظُّهُورِ عَلَيْهِمْ، فَإِنَّهُ يَتْرُكُ لَهُمُ الْقَدِيمَةَ وَيَمْتَنِعُهُمْ مِنَ الْإِحْدَاثِ بَعْدَمَا صَارَتْ مِنْ أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ اهْمَلْخَصًا.</p> <p>مَظْلَبٌ لَوْ اخْتَلَفْنَا مَعَهُمْ فِي أَنَّهَا صُلْحِيَّةٌ أَوْ عَنَوِيَّةٌ فَإِنْ وَجَدْنَا أَنْتَرُ وَإِلَّا تَرُكْتُ بِأَيْدِيهِمْ. [تَمِيمَةُ] لَوْ كَانَتْ لَهُمْ كَنِيْسَةٌ فِي مِصْرٍ قَادَعُوا أَنَا صَالِحَانَهُمْ عَلَى أَرْضِهِمْ، وَقَالَ الْمُسْلِمُونَ: بَلْ فُتِحَتْ عَنَوَةٌ وَأَزَادَ مِنْهُمْ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهَا وَجَهَلِ الْحَالُ لِيُطَوَّلَ الْعَهْدُ سَأَلَ الْإِمَامُ الْفُقَهَاءَ، وَأَصْحَابَ الْأَخْبَارِ فَإِنْ وَجَدْنَا أَنْتَرًا عَمِلَ بِهِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَوْ اخْتَلَفَتْ الْأَثَارُ جَعَلَهَا أَرْضَ صُلْحٍ، وَجَعَلَ الْقَوْلَ فِيهَا لِأَهْلِهَا، لِأَنَّهَا فِي أَيْدِيهِمْ وَهُمْ مَتَمَسِّكُونَ بِالْأَصْلِ وَتَمَامُهُ فِي شَرْحِ السِّيَرِ.</p> <p>البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (١٢٢/٥)</p> <p>وَالْحَاصِلُ أَنَّهُمْ يُمْتَنِعُونَ مِنَ الْإِحْدَاثِ مُطْلَقًا إِلَّا إِذَا وَقَعَ الصُّلْحُ عَلَى الْإِحْدَاثِ أَوْ عَلَى أَنَّ الْأَرْضَ لَهُمْ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ وَلَا اسْتِثْنَاءَ فِي ظَاهِرِ الرَّوَايَةِ وَأَشَارَ إِلَى أَنَّهُمْ يُمْتَنِعُونَ مِنْ إِحْدَاثِ بَيْتِ النَّارِ بِالْأَوْلَى وَالصُّومَعَةَ كَالْكَنِيْسَةِ لِأَنَّهَا تُبْتَقَى لِلتَّخْلِيفِ لِلْعِبَادَةِ بِخِلَافِ مَوْضِعِ الصَّلَاةِ فِي الْبَيْتِ لِأَنَّهُ تَبِعَ لِلسُّكْنَى وَالصُّومَعَةَ بَيْتٌ مُبْنِيٌّ بِرَأْسِ طَوِيلٍ لِيَتَعَبَّدَ فِيهَا بِالْإِنْقِطَاعِ عَنِ النَّاسِ.</p>
4.	<p>Alasan yang diusung Madzhab Hanafi dalam implikasi di atas</p>	<p>المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٣٥٩/٢)</p> <p>ولا يتركون حتى يحدوثا كنيسة أو بيعة، وبيت نار في مصر من أمصار المسلمين، قال عليه السلام: «لا كنيسة ولا بيعة في الإسلام»؛ ولأن في إحداث البيع والكنائس في الأمصار إعلان دين الكفر، ونحن إنما أعطيناهم الذمة بشرط أن لا يعلنوا ما كان في دينهم ولا يمنعون من إحداث الكنائس في القرى في ظاهر الرواية، وروى الحسن عن أبي حنيفة: أنهم يمنعون من إحداث الكنائس في القرى، كما يمنعون من ذلك في الأمصار، وهكذا ذكر محمد في كتاب «العشر والحراج»؛ لأن في إحداث الكنائس إعلان دين الكفر، وقد منعوا عن إعلان دين الكفر في القرى كما يمنعون عنه في الأمصار، ألا ترى أنهم يمنعون من إظهار الخمر والخنازير ومنع الربا في القرى كما يمنعون عن ذلك في الأمصار؟ فكذا يمنعون عن إحداث الكنائس في القرى كما يمنعون عن ذلك في الأمصار. وظاهر رواية أصحابنا: أن إحداث الكنيسة والبيعة مباح بعينه؛ لأنه بناء وعمارة، والبناء والعمارة مباح في الإسلام، ولهذا لو وجد مثل ذلك من المسلمين كان مباحاً، وإنما تحريمه لأجل قصدهم هذا البناء المعصية، وكان حراماً لغيره، فلكونه حراماً لغيره منعوا عن إحداثها في الأمصار، ولكونه مباحاً لعينه لم يمنعوا عن إحداثها في القرى توفيراً على الشبهين حظهما، بخلاف بيع الخمر والخنزير؛ لأنه حرام ومعصية لعينه، وهم منعوا عن إظهار المعاصي في دار الإسلام، فأما إذا كانت الكنيسة قديمة، ففي القرى تترك القديمة بلا خلاف، وفي الأمصار كذلك يترك القديمة على رواية الإجماع، وعمامة الكتب، وعلى رواية كتاب العشر- لا يترك القديمة، ورواية كتاب العشر أخذ الحسن، وعلى هذا إذا كان لهم كنيسة في قرية، فبنى أهلها فيها أبنية كثيرة، وصارت من جملة الأمصار أمروا بهدم الكنيسة على رواية كتاب العشر، وعلى عمارة الروايات لا يؤمرون بذلك، وهكذا إذا كانت لهم كنيسة بقر من مصر، فبنو حولها أبنية حتى اتصل ذلك الموضع بالمصر، وصار كمحلة من محال مصر، أمرهم الإمام بهدم الكنيسة على رواية كتاب العشر، وعلى رواية كتاب العشر، وعلى عمارة الروايات لا يؤمرون بذلك، ورواية كتاب العشر- أخذ الحسن بن زياد، والصحيح ما ذكر في عمارة الروايات بدليل ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «أيا أرض صر به العرب، فليس لأحد من أهل الذمة أن يبنوا فيها بيعة، ولا كنيسة ولا بيت نار وأن يبيعوا فيها حمراً أو أن يضربوا فيه بناقوس، وما كان قبل ذلك، فحق على المسلمين أن يوفوا لهم»؛ ولأنه جرى التوارث فيه من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، تترك الكنائس في الأمصار من غير تكبير منكر، وتوارث الناس من غير</p>

	<p>نكير منكر حجة شرعاً. ثم هذه الرواية فيما إذا ظهر الإمام عليهم من غير صلح، فأما إذا وقع الصلح بينهم، وبين الإمام قبل ظهور الإمام، فإن الكنائس تترك على حالها في الروايات كلها، مصر والقرى في ذلك سواء، ثم إذا كانت الكنائس قديمة حتى لم يكن للإمام هدمها ونقضها على عامة الروايات. إذا انهدمت كنيسة كان لهم بناؤها؛ لأن هذا ليس بإحداث، بل هو إعادة الأول، وكأنه الأول، فلا يمنعون عنه إلا إذا أرادوا أن يبنوا أوسع من الأول، فحينئذٍ يمنعون من الزيادة؛ لأن في حق الزيادة إحدائاً.</p>
--	---

 Madzhab Maliki

No.	Data	Transkrip Data
1.	Kasus yang bersinggungan dengan konsep <i>i'ānah alā al-ma'siyāt</i> (menolong orang lain dalam masalah kemaksiatan)	<p style="text-align: center;">مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (٢٥٣/٤)</p> <p><u>وَكَيْدًا يَحْرُمُ بَيْعُ الْحُرِّيَّيْنِ آلَةَ الْحَرْبِ مِنْ سِلَاحٍ أَوْ كِرَاعٍ أَوْ سُورِجٍ أَوْ غَيْرِهَا مِمَّنْ يَتَقَوَّوْنَ بِهِ فِي الْحَرْبِ مِنْ نَحَائِيسٍ، وَخُرْتَيْ، وَغَيْرِهِ اهـ. قَالَ أَبُو الْحَسَنِ: قَوْلُهُ، وَخُرْتَيْ وَغَيْرِهِ هُوَ بَقَاءُ مَثَلَتِهِ الْمَتَاعُ الْمُخْتَلِطِ الشَّيْخُ بَعِي نَفْسَهُ أَثَاثَ الْحَيَاءِ، وَاللَّهُ السَّفَرِ وَمَاعُونُهُ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: فَإِنْ بَيْعَ مِنْهُمْ ذَلِكَ بَيْعَ عَلَيْهِمْ عَلَى قِيَّاسِ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْمُسْلِمِ، وَالْمُصْحَفِ اهـ. وَأَمَّا بَيْعُ الطَّعَامِ فَقَالَ ابْنُ يُونُسَ عَنْ ابْنِ حَبِيبٍ يَجُوزُ فِي الْهُدْنَةِ، وَأَمَّا فِي غَيْرِ الْهُدْنَةِ فَلَا قَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ، وَكَذَا يَحْرُمُ بَيْعُ الدَّارِ، وَكَرَاؤُهَا لِمَنْ يَتَّخِذُهَا كَنِيْسَةً أَوْ بَيْتَ نَارٍ وَكَذَا لِمَنْ يَجْعَلُ فِيهَا الْخَمْرَ وَقَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ، وَكَذَا بَيْعُ الْخَشِيَّةِ لِمَنْ يَعْمَلُهَا صَلِيْبًا، وَذَكَرَ الْقُرْطُبِيُّ وَالْأَبِيُّ فِي أَوَائِلِ شَرْحِ مُسْلِمٍ فِي مَنْعِ بَيْعِ الْعَنْبِ لِمَنْ يَعْصُرُهَا تَحْمَرًا قَوْلَيْنِ قَالَ الْأَبِيُّ: وَالْمَذْهَبُ فِي هَذَا سَدُّ الدَّرَائِعِ كَمَا يَحْرُمُ بَيْعُ السِّلَاحِ لِمَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يُرِيدُ قَطْعَ الطَّرِيقِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَوْ إِثَارَةَ الْفِتْنَةِ بَيْتُهُمْ قَالَهُ فِي أَوَّلِ سَمَاعِ ابْنِ الْقَاسِمِ مِنْ كِتَابِ الْمُحَارِبِينَ وَالْمُرْتَدِّينَ، وَفِي رِسْمِ الْبُيُوعِ الْأَوَّلِ مِنْ سَمَاعِ أَشْهَبَ مِنْ كِتَابِ التَّجَارَةِ إِلَى أَرْضِ الْحَرْبِ، وَفِي مَسَائِلِ الْمَدِيْنَانِ، وَالتَّقْلِيْسِ مِنَ الْبُرْزُلِيِّ عَنْ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ سَأَلَ عَنْ بَيْعِ الْمَمْلُوكَةِ مِنْ قَوْمٍ عَاصِيْنَ يَتَسَاحَمُونَ فِي الْفَسَادِ وَعَدَمِ الْعِيْرَةِ، وَهُمْ آكِلُونَ لِلْحَرَامِ وَتُطْعَمُونَ مِنْهَا فَأَجَابَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ عَلَى مَذْهَبِ مَالِكٍ اهـ بَ وَكَذَلِكَ يُشْتَرَطُ فِي جَوَازِ الْبَيْعِ إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ الْمُشْتَرِيَّ قَصَدَ بِالشَّرَاءِ أَمْرًا لَا يَجُوزُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.</u></p> <p style="text-align: center;">مالك بن أنس، المدونة، ٣/٤٣٥</p> <p>[بَابُ فِي إِجَارَةِ الْكَنِيْسَةِ] قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ أَجْرَتْ دَارِي مِمَّنْ يَتَّخِذُهَا كَنِيْسَةً أَوْ بَيْتَ نَارٍ وَأَنَا فِي مِصْرَ مِنَ الْأَمْصَارِ أَوْ فِي قَرْيَةٍ مِنْ قُرَى أَهْلِ الدِّمَّةِ؟ قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: لَا يُعْجِبُنِي أَنْ يَبِيْعَ الرَّجُلُ دَارَهُ مِمَّنْ يَتَّخِذُهَا كَنِيْسَةً وَلَا يُؤَاجِرُ دَارَهُ مِمَّنْ يَتَّخِذُهَا كَنِيْسَةً وَلَا يَبِيْعُ شَاتَهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُمْ إِنَّمَا يَشْتَرُونَهَا لِيَتَّخِذُوهَا لِأَعْبَادِهِمْ؟ قَالَ مَالِكٌ: وَلَا يُكْرِي دَابَّتَهُ مِنْهُمْ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُمْ إِنَّمَا اسْتَكْرَوْهَا لِيُرْكَبُوهَا إِلَى أَعْبَادِهِمْ. قُلْتُ: أَرَأَيْتَ الرَّجُلُ أَعْجُوزٌ لَهُ أَنْ يُؤَاجِرَ نَفْسَهُ فِي عَمَلِ كَنِيْسَةٍ فِي قَوْلِ مَالِكٍ؟ قَالَ: لَا يَحِلُّ لَهُ؛ لِأَنَّ مَالِكًا قَالَ: لَا يُؤَاجِرُ الرَّجُلُ نَفْسَهُ فِي شَيْءٍ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ. قَالَ مَالِكٌ: وَلَا يُكْرِي دَارَهُ وَلَا يَبِيْعُهَا مِمَّنْ يَتَّخِذُهَا كَنِيْسَةً. قُلْتُ: أَرَأَيْتَ هَلْ كَانَ مَالِكٌ يَقُولُ: لَيْسَ لِلنَّصَارَى أَنْ يُجِدُّوا الْكَنَائِسَ فِي بِلَادِ الْإِسْلَامِ؟ قَالَ: نَعَمْ كَانَ مَالِكٌ يَكْرَهُ ذَلِكَ. قُلْتُ: هَلْ كَانَ مَالِكٌ يَكْرَهُ أَنْ يَتَّخِذُوا الْكَنَائِسَ أَوْ يُجِدُّوْنَهَا فِي قُرَاهُمُ الَّتِي صَالَحُوا عَلَيْهَا؟ قَالَ: سَأَلْتُ مَالِكًا هَلْ لِأَهْلِ الدِّمَّةِ أَنْ يَتَّخِذُوا الْكَنَائِسَ فِي بِلَادِ الْإِسْلَامِ؟ فَقَالَ: لَا إِلَّا أَنْ يَكُونُوا لَهُمْ شَيْءٌ أُعْطَوْهُ. قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَلَا أَرَى أَنْ يُنْتَعَمُوا مِنْ ذَلِكَ فِي قُرَاهُمُ الَّتِي صَالَحُوا عَلَيْهَا؛ لِأَنَّ الْبِلَادَ بِلَادَهُمْ يَبِيْعُونَ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَلَا يَكُونُ لِلْمُسْلِمِينَ مِنْهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِلَادَهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهَا الْمُسْلِمُونَ وَافْتَنَحُوهَا عَنْوَةً فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يُجِدُّوا فِيهَا شَيْئًا؛ لِأَنَّ الْبِلَادَ بِلَادُ الْمُسْلِمِينَ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَبِيْعُوهَا وَلَا أَنْ يُورَثُوهَا وَهِيَ فِيءٌ لِلْمُسْلِمِينَ، فَإِذَا أَسْلَمُوا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ</p>

فِيهَا شَيْءٌ، فَلِذَلِكَ لَا يُتْرَكُونَ، وَأَمَّا مَا سَكَنَ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ افْتِسَاحِهِمْ وَكَانَتْ مَدَائِنُهُمُ الَّتِي اخْتَطَّوْهَا مِثْلَ الْفُسْطَاطِ وَالْبَصْرَةِ وَالْكُوفَةِ وَإِفْرِيقِيَّةَ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ مَدَائِنِ الشَّامِ فَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُمْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ شَيْءٌ أَعْطَوْهُ فَيُؤْفِقُ لَهُمْ بِهِ لِأَنَّ سِكَكَ الْمَدَائِنِ قَدْ صَارَتْ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ مَا لَا لَهُمْ بِيَعُونَ وَبُورَتُونَ وَلَيْسَ لِأَهْلِ الصُّلْحِ فِيهَا حَقٌّ، فَقَدْ صَارَتْ مَدَائِنُ أَهْلِ الْإِسْلَامِ أَمْوَالًا لَهُمْ. قَالَ: وَقَالَ مَالِكٌ: أَرَى أَنْ يُنْتَعَمُوا مِنْ أَنْ يَتَّخِذُوا فِي بِلَادِ الْإِسْلَامِ كَنِيْسَةً إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ عَهْدٌ فَيُحْمَلُونَ عَلَى عَهْدِهِمْ. وَقَالَ غَيْرُهُ: كُلُّ بِلَادٍ أُفْتِتِحَتْ عَنَوَةً وَأُقِرُّوا فِيهَا وَقَفَتْ الْأَرْضُ لِأَعْطِيَّاتِ الْمُسْلِمِينَ وَتَوَاتِيهِمْ فَلَا يُنْتَعَمُونَ مِنْ كَنَائِسِهِمُ الَّتِي فِي قُرَاهِمُ الَّتِي أُقِرُّوا فِيهَا وَلَا مِنْ أَنْ يَتَّخِذُوا فِيهَا كَنَائِسًا؛ لِأَنَّهُمْ أُقِرُّوا فِيهَا عَلَى ذِمَّتِهِمْ وَعَلَى مَا يَجُوزُ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ فَعَلُهُ، وَلَا يَكُونُ عَلَيْهِمْ خَرَجٌ قُرَاهِمُ الَّتِي أُقِرُّوا فِيهَا وَإِنَّمَا الْخَرَجُ عَلَى الْأَرْضِ.

التاج والإكليل لمختصر خليل (١٨٢/٦)

وَقَالَ ابْنُ كِنَانَةَ: لَا يَنْبَغِي أَنْ يُبَاعَ الْعَنْبُ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا لَا مِنْ مُسْلِمٍ وَلَا مِنْ يَهُودِيٍّ. ابْنُ رُشْدٍ: يَدُلُّ هَذَا عَلَى أَنَّهُ مَكْرُوهٌ وَلَا يَفْسُخُ إِذْ لَيْسَ فِيهِ فَسَادٌ فِي ثَمَنِ وَلَا مَثْمُونٍ وَتَجِبُ عَلَيْهِ التَّوْبَةُ لِأَنَّهُ أَعَانَ عَلَى الْإِثْمِ، وَجِبُّ عَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمَا زَادَ فِي ثَمَنِه بِنَبِيْعِهِ لِلْخَمْرِ. وَهَذَا الْحُكْمُ أَيْضًا يَلْزِمُهُ بِعَيْنِهِ عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَّنَةِ إِذَا فَاتَ فَإِنْ لَمْ يَفُتْ فَإِنَّهُ يَفْسُخُ. وَحُكْمُ بَيْعِ السَّلَاحِ مِمَّنْ يُقَاتِلُ بِهِ الْمُسْلِمِينَ كَحُكْمِ بَيْعِ الْعَنْبِ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا.

البيان والتحصيل (٦١٣/١٨)

[بييع العنب ممن يعصره خمرًا] في الذي يبيع العنب ممن يعصره خمرًا، أو السلاح ممن يقاتل بها المسلمون، وما أشبه ذلك وقال ابن كنانة: لا ينبغي أن يباع العنب أو العصير ممن يتخذ خمرًا، لا من نصراني ولا من مسلم، ولا يباع السلاح ممن يقاتل بها المسلمون، ولا تباع الأرض ممن يبني فيها كنيسة، لا تباع الخشب ممن يتخذ منها صنما. قال: وأكره أن يكون الإنسان عونًا على الإثم، قال الله عز وجل: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالتَّعَدُّواْنَ} [المائدة: ٢]، وأما أن يتهمه ببعض ذلك ولا يدري ما يراد به فلا بأس أن يبيعه منه. قال ابن كنانة: أكره أن يبيع الرجل القمح ممن يعمل منه شرابًا مسكرًا، وقال ابن كنانة: يكره أن يبيع الرجل السلاح ممن أحد يعلم أنه يقاتل الأنفس بغير حق مشتهرًا بذلك معروفًا به. قال محمد بن رشد: قال ابن كنانة في هذه الرواية إنه لا ينبغي أن يباع العنب أو العصير ممن يتخذ خمرًا لا من مسلم ولا من نصراني؛ لأنه يكره أن يبيع القمح ممن يعمل منه شرابًا مسكرًا، ولم يتكلم على حكم البيع إذا وقع، ولا على ما يلزم البائع في التوبة مما صنع. والذي يدل عليه قوله فيه: إنه مكروه ولا ينبغي لأحد أن يفعله أن البيع لا يفسخ إذا وقع، إذ ليس فيه فساد في ثمن ولا مثمون. وقد باء بالإثم في ذلك لأنه عون على الإثم، وقد نهى الله عز وجل عن التعاون على الإثم والعدوان، فيجب عليه أن يتوب إلى الله من ذلك ويستغفره ويتصدق بما ازداد في ثمنه ببيعه ممن يتخذ خمرًا. وقد قيل: إن البيع يفسخ، وهو مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك في المدونة. واختلف على القول بأنه يفسخ إن فات بمغيب المبتاع عليه، فقيل: يمضي بالثمن ويتصدق البائع بما ازداد في ثمنه إذا باعه ممن يعصره خمرًا، وقيل: تصحح بالقيمة، ويجب إذا صحح بها أن لا يرد على المبتاع ما زاد الثمن على القيمة، ويتصدق بذلك إلا أن يعلم أن المبتاع لم يتخذ خمرًا. وبيع العنب ممن يعصره خمرًا من المسلمين أشد من بيعه من النصارى، إذ قد قيل في النصراني إنه غير مخاطب بشرائع الإسلام إلا بعد الإسلام، فلا يكون على هذا القول المسلم إذا باع عنبه من نصراني معينا على إثم. وحكم بيع السلاح ممن يقاتل بها المسلمين حكم بيع العنب ممن يعصره خمرًا من المسلمين. وحكم بيع الأرض ممن يبني فيها كنيسة، والعود ممن يتخذ منه صنما حكم بيع العنب من النصراني ليتخذ منه خمرًا، وبالله التوفيق.

القوانين الفقهية (ص: ١١٧)

(الْفَرْعُ الْخَامِسُ) لَا يَجِلُّ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يُؤَاجِرَ نَفْسَهُ وَلَا غُلَامَهُ وَلَا دَابَّتَهُ وَلَا ذَارَهُ فِي عَمَلِ الْخَمْرِ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ (الْفَرْعُ السَّادِسُ) لَا يَجِلُّ لِلْمُسْلِمِ بَيْعُ الْخَمْرِ إِلَى مُسْلِمٍ وَلَا كَافِرٍ وَلَا يَبِيعُ الْعَيْبَ لِمَنْ يَعْمَلُ مِنْهُ الْخَمْرَ فَإِنْ عَثَرَ عَلَى الْخَمْرِ الْمَبِيعَةِ كَسَرَتْ وَنَقُضَ الْبَيْعُ وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي لَمْ يَدْفَعِ الْقَمْنَ سَقَطَ عَنْهُ وَإِنْ كَانَ قَدْ دَفَعَهُ رَدَّ إِلَيْهِ وَقِيلَ يَتَصَدَّقُ بِهِ وَإِنْ أَسْلَمَ الْكَافِرَ وَعِنْدَهُ خَمْرٌ أَرَقَهَا وَإِنْ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ ثَمَنُ خَمْرٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ.

الذخيرة للقرافي (٢٠٠/٦)

وَتَحْرِمُ إِذَا كَانَتْ تُسْتَعْمَلُ فِي مَحْرَمٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} فَلَا تَعَارُ الدَّابَّةُ لِمَنْ يَرْكَبُهَا لِضَرَرِ مُسْلِمٍ

التبصرة للخطي (٦٠١٦/١٣)

والعوارى بين الأقارب والجيران والإخوان مندوب إليها لقوله تعالى: {وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ} [الحج: ٧٧]، ولأنها داعية إلى التودد والتواصل وداخلة في قوله عليه السلام: "تَهَادُوا تَحَابُّوا" (١) وهي فيما قل قدره أكد لقول الله سبحانه في ذم قوم: {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ} [الماعون: ٧] ومنوعة ممن يعلم أنه يستعملها فيما لا يجوز، لقوله سبحانه (٢): {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: ٢] فلا تعار السلاح لمن يقاتل بها من لا يجوز قتاله ولا شيء من الأواني لمن يستعملها فيما لا يجوز استعماله ولا دابة لمن يركبها لأذى مسلم.

الذخيرة للقرافي (٥٢/١)

سُؤَالٌ: إِذْ كَانَ الْعَالِبُ عَلَى النَّاسِ الْيَوْمَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ الرَّيَاءَ وَالْمُبَاهَاةَ وَسُوءَ الْحَالَةِ فَالْمُعَلِّمُ لَهُمْ مُعَيَّنٌ لَهُمْ عَلَى هَذِهِ الْمَعَاصِي وَالْإِعَانَةُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ مَعْصِيَةٌ فَيَحْرُمُ التَّعْلِيمُ حَيْثُ دَخَلَ عَلَى الْإِطْلَاقِ نَظَرًا إِلَى الْعَالِبِ جَوَابُهُ هَذَا سُؤَالٌ مُشْكِلٌ وَقَدْ اضْطَرَبَتْ فِيهِ فَتَاوَى الْعُلَمَاءِ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ لَوْ اغْتَبَرْنَا لَا نَحْسَمَتْ مَادَّةَ التَّعْلِيمِ وَالْإِقْرَاءِ فَيَنْقَطِعُ الشَّرْعُ وَيَسُدُّ النَّظَامُ فَيُؤَدِّي ذَلِكَ إِلَى إِظْفَاءِ نُورِ الْحَقِّ وَإِضْلَالِ الْخَلْقِ حَتَّى يَطْبُقَ الْأَرْضَ الْكُفْرَ وَمَعْلُومٌ أَنَّ هَذِهِ الْمَفَاسِدَ أَعْظَمُ مِنَ الرَّيَاءِ الَّذِي قَدْ يَفْعُ وَقَدْ لَا يَفْعُ فَإِنَّا وَإِنْ قَطَعْنَا بِوُفُوعِهِ فِي الْجُمْلَةِ لَكُنَّا لَا نَعْلَمُ حَالَ كُلِّ أَحَدٍ عَلَى انْفِرَادِهِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى مُتَوَلِّي السَّرَائِرِ فَمَا اسْتَوَى الْأَمْرَانِ وَلَا وَفُوعُهُمَا وَلِأَنَّ الْعِلْمَ قُرْبَةً مُحَقَّقَةً وَهَذِهِ الْمَعَاصِي أُمُورٌ عَارِضَةٌ الْأَصْلُ عَدَمُهَا فِي كُلِّ شَخْصٍ مُعَيَّنٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ بَلْ يَتَعَيَّنُ ذَلِكَ وَلَا يَجُوزُ التَّعْلِيمُ إِلَّا لِمَنْ يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ سَلَامَتُهُ مِنْ هَذِهِ الْمَعَاصِي طَرْدًا لِقَاعِدَةِ الْحَاقِ الْوَسَائِلِ بِالْمَقَاصِدِ وَأَمَّا قَوْلُ الْأَوْلَيْنِ إِنْ اغْتَبَرَ ذَلِكَ يُؤَدِّي إِلَى انْقِطَاعِ الشَّرْعِ وَتَطْبِيقِ الْكُفْرِ فَأُجَابَ الْعَرَّائِي عَنْهُ فَقَالَ لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ تَحْرِيمِ التَّعْلِيمِ انْقِطَاعُ الشَّرْعِ لِأَنَّ الطَّبَاعَ مَجْبُولَةٌ عَلَى حُبِّ الرِّئَاسَةِ وَلَا سِيَّمَا بِالْقَابِ الْعُلُومِ وَمَنَاصِبِ التُّبُوَّةِ بَلْ نَابَ الطَّبَعُ مَنَابَ الشَّرْعِ فِي النَّظَرِ فَإِنَّ الطَّبَاعَ مَجْبُولَةٌ عَلَى رُؤْيَةِ الْمُسْتَفْرَبَاتِ وَالْفِكْرَةِ فِيهَا وَكَذَلِكَ لَمْ يَلْزَمْ مِنْ تَحْرِيمِ الرَّيَاءِ وَعَبْرِهِ مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ عَدَمُهَا الرَّابِعُ يَنْبَغِي لِطَالِبِ الْعِلْمِ إِذَا تَعَلَّمَ مَسْأَلَةً أَنْ يَنْوِي تَعْلِيمَهَا كُلِّ مَنْ هُوَ مِنْ أَهْلِهَا وَكَذَلِكَ إِذَا عَلِمَهَا أَنْ يَنْوِي التَّوَسُّلَ إِلَى تَعْلِيمِ كُلِّ مَنْ يَتَعَلَّمُ مِنْ عِلْمِهِ فَيَكُونُ الْمَنْوِيُّ فِي الْحَالَيْنِ عَدَدًا لَا يُعَدُّ وَلَا يُحْصَى وَلَهُ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ ذَلِكَ الْعَدَدِ حَسَنَةٌ فَإِنْ وَقَعَ مَثُوبُهُ كَانَ لَهُ عَشْرٌ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَلَّمَ قَلَمًا يَعْلَمُهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ وَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْرٌ وَهَذَا مَشْجَرٌ لَا غَايَةَ لِرِجْوِهِ أَعَانَنَا اللَّهُ تَعَالَى عَلَى الْخَيْرِ كُلِّهِ.

الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (٤٤٥/٢)

(وله) أي المظاهر الذي لزمه كفارات في امرأة واحدة (المس) بوطء أو غيره (بعد) إخراج كفارة (واحدة على الأرجح) ؛ لأنها هي اللازمة عن ظهاره بالأصالة، والزائد عليها كأنه نذر، وينبغي عليه أنه لا يشترط العود فيما زاد على الواحدة (وحرّم قبلها) أي قبل الكفارة أي قبل كمالها

		<p>وأولى قبل الشروع فيها (الاستمتاع) بالمظاهر منها بوطء أو مقدماته وله النظر للوجه والأطراف فقط بلا لذة (وعليها) وجوبا (منعه) منه قبلها لما فيه من الإغانة على المعصية (ووجب) عليها (إن خافته) أي خافت الاستمتاع بها، ولم تقدر على منعه (رفعها للحاكم) ليمنعه من ذلك.</p> <p>[النراوي، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، ٢٢/٢٩٠]</p> <p><u>(وَمِنْ الْفَرَائِضِ الْعَيْنِيَّةِ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ بَرُّ الْوَالِدَيْنِ) أَي الْإِحْسَانُ إِلَيْهِمَا (وَلَوْ كَانَا فَاسِقَيْنِ) بِغَيْرِ الشَّرْكِ بَلْ (وَإِنْ كَانَا مُشْرِكَيْنِ) لِلآيَاتِ الدَّالَّةِ عَلَى الْعُمُومِ، وَالْحَقُّوقُ لَا تَسْقُطُ بِالْفِسْقِ وَلَا بِالْمُخَالَفَةِ فِي الدِّينِ، فَيَجِبُ عَلَى الْوَالِدِ الْمُسْلِمِ أَنْ يُوصَلَ أَبَاهُ الْكَافِرَ إِلَى كَنِيسَتِهِ إِنْ طَلَبَ مِنْهُ ذَلِكَ وَعَجَزَ عَنِ الْوُصُولِ بِنَفْسِهِ لِيَتَحَوَّ عَمَى كَمَا قَالَهُ ابْنُ قَاسِمٍ، كَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَ لَهُمَا مَا يُفْضِقَانِهِ فِي أَعْيَادِهِمَا لَا مَا يَصْرِفَانِهِ فِي نَحْوِ الْكَنِيسَةِ أَوْ يَدْفَعَانِهِ لِلْقَسَاسِ.</u></p> <p>البيان والتحصيل (٢٠٥/٤)</p> <p>مسألة وسئل عن الرجل تكون أمه نصرانية عمياء، فتسأله المسير معها إلى الكنيسة، هل ترى له سعة في المسير بها إلى الكنيسة؟ فقال: لا أرى بأسا أن يسير بها حتى يبلغها، ولا يدخلها الكنيسة فقبل له: أيعطيها نفقة لبعدها؟ قال: نعم يعطيها نفقة لطعامها وشرابها ولا يعطيها ما تعطي في كنيستها. قال محمد بن رشد: رأى المسير معها إلى الكنيسة أحق من أن يعطيها ما تعطي فيها؛ لأن مسيره معها إلى الكنيسة لا منفعة فيه للكنيسة، وإنما هو عون لأمه على الوصول إليها، وإعطاؤها ما تعطي في الكنيسة منفعة لها وسبب لعمارتها بمثابة أن لو أعطى ذلك هو فيها، وفي المبسوطة مالك: أنه لا يسوغ له أن يسير معها إلى الكنيسة، وهو أصل قد اختلف فيه قول مالك، وقد بين في رسم تسلف في المتاع والحياوان المضمون من سماع ابن القاسم وجه الاختلاف في ذلك.</p>
2.	Klasifikasi Status Kenegaraan	<p>مختصر خليل (ص: ٩٢)</p> <p>وَاللُّغْتَوِيُّ إِحْدَاثُ كَنِيسَةٍ إِنْ شَرَطَ وَإِلَّا فَلَا: كرم المنهدم وللصلحي الإحداث وبيع عرضتها أو حائط لا ببلد الإسلام إلا لمفسدة أعظم</p>
3.	Implikasi Klasifikasi Status Kenegaraan	<p>[محمد بن أحمد عليش، منح الجليل شرح مختصر خليل، ٣/٢٩١]</p> <p><u>(وَاللُّغْتَوِيُّ) أَي الَّذِي فُتِحَتْ بَلَدُهُ بِقِتَالِ (إِحْدَاثُ كَنِيسَةٍ) بِنَلْدِ الْعُنُوتِ الَّتِي أُقِرَّ عَلَى سُكَّانِهَا (إِنْ شَرَطَ) بِضَمِّ فَكْسَرِ الْإِحْدَاثِ أَي إِذْنِ لَهُ الْإِمَامُ فِيهِ حِينَ صَرَبَ الْجُرِيَّةَ عَلَيْهِ فَلَا يُتَابَى الْعُنُوتَ (وَإِلَّا) أَي وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ الْإِمَامُ فِيهِ حِينَئِذٍ بَأَنْ مَنَعَهُ أَوْ سَكَتَ (فَلَا) يَجُوزُ لَهُ إِحْدَاثُ كَنِيسَةٍ، هَذَا مَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَّنَةِ، وَنَصَّهَا فِي كِتَابِ الْجُعْلِ وَالْإِحَارَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يُحْدِثُوا كِنَائِسَ فِي بِلَادِ الْعُنُوتِ لِأَنَّهَا فِيءٌ لَيْسَتْ لَهُمْ وَلَا تُورَثُ عَنْهُمْ وَلَوْ أَسْلَمُوا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِيهَا شَيْءٌ، وَمَا اخْتِطَّه الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ فَتْحِهِمْ وَسَكَنُوا مَعَهُمْ فِيهِ كَالْمُسْتَطَاطِ وَالْبَصْرَةِ وَالْكُوفَةِ وَإِفْرِيقِيَّةَ وَشَبَهَهَا مِنْ مَدَائِنِ الشَّامِ فَلَيْسَ لَهُمْ إِحْدَاثُ ذَلِكَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ عَهْدٌ فَيُوفَى بِهِ. وَقَالَ غَيْرُهُ كُلُّ بَلَدٍ أُفْتِيحَ عَنْوَةٌ وَأَقْرَأُوا فِيهِ وَوَقَفَتْ أَرْضُهُ لِتَوَائِبِ الْمُسْلِمِينَ وَإِعْطَاءَاتِهِمْ فَلَا يُمْنَعُونَ مِنْ كِنَائِسِهِمُ الَّتِي فِيهَا وَلَا أَنْ يُحْدِثُوا فِيهَا كِنَائِسَ. اهـ أَبُو الْحَسَنِ. أَبُو مُحَمَّدٍ صَالِحٌ إِنْ شَرَطُوا ذَلِكَ فِي أَرْضِ الْعُنُوتِ اتَّفَقَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَغَيْرُهُ أَنَّ لَهُمْ ذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَرَطٌ فَاخْتَلَفَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَالْغَيْرُ قَائِبِ الْقَاسِمِ جَدَّبَهَا لِأَرْضِ الْإِسْلَامِ، وَغَيْرُهُ جَدَّبَهَا لِأَرْضِ الصُّلْحِ اهـ وَهَكَذَا فِي ابْنِ عَرَفَةَ وَغَيْرِهِ قَالَهُ الرَّمَاصِيُّ. وَنَصَّ ابْنُ عَرَفَةَ فِي جَوَازِ إِحْدَاثِ دَوِي الدِّمَّةِ الْكِنَائِسَ بِبَلَدِ الْعُنُوتِ الْمُقَرَّبِ بِهَا أَهْلُهَا وَفِيمَا اخْتِطَّه الْمُسْلِمُونَ فَسَكَنُوهُ مَعَهُمْ وَتَرَكَهَا إِنْ كَانَتْ تَالِثُهَا تُشْرِكُ وَلَا تَحْدُثُ لِلْحَبِيٍّ عَنْ غَيْرِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَعَنْ ابْنِ الْمَاجِشُونَ قَائِلًا وَلَوْ كَانُوا مُنْعَزِلِينَ عَنْ بِلَادِ الْإِسْلَامِ وَابْنُ الْقَاسِمِ قَائِلًا إِلَّا أَنْ يَكُونُوا أَعْطُوا ذَلِكَ اهـ (كِرْمٌ) أَي إِسْلَاحٌ (الْمُنْهَدِم) مِنْ</u></p>

		<p>الكنائس القديمة بأرض العنوة ظاهره أنه تشييده في المنع والذي صرح به أبو الحسن جوازاً وظاهره مطلقاً، وذلك أنه لما قال ابن القاسم في كتاب الجعل والإجارة من المدونة ليس لهم أن يحدوا الكنائس في بلاد العنوة لأنّها فيء ولا تورث عنهم ولو أسلموا لم يكن لهم فيها شيء. وما اختطه المسلمون عند فتحهم وسكنوه معهم فليس لهم إحداء ذلك فيه إلا أن يكون لهم عهد فيوفى به. قال أبو الحسن قوله ليس لهم الإحداء في بلاد العنوة مفهومة أن لهم أن يرؤوا ما كان قبل ذلك وكذلك الجواز في الصلح على قول ابن القاسم. ونص ابن عرفة ويجوز لهم بأرض الصلح أي إحداء الكنائس وترك قديمها إن لم يكن معهم بها مسلمون وإلا ففي جواز قول ابن القاسم وابن الماجشون قائلًا ولو شرط ذلك لهم، ويمنعون من رم قديمها إلا أن يكون شرطاً فيوفى لهم به. المواق بعد نقله فتبين أن للصلح إحداء كنيسة كرم المنهدم على قول ابن القاسم، فلعل المخرج فدم وأحراه أي فدم كرم المنهدم وأصله بعد قوله وللصلح الإحداء. طفي وهو كلام حسن. (وللصلح) أي المنسوب للصلح لفتح بـ (الإحداء) (كنيسة ببلد لم يسكنها المسلمون معه شرطه أو لا) وأما فقال ابن القاسم بجواز وابن الماجشون بمنعه (و) للصلح (بيع عرصتها) أي أرض كنيسته (أو حائط) لكنيسته. وأما العنوة فليس له بيع عرصتها لأنها وقفت بفتحها (لا) يجوز للصلح (ولا للعنوة) إحداء كنيسة (ببلد الإسلام) التي ثقلوا إليها أو التي انقرد باختطاطها المسلمون في كل حال (إلا ل) خوف تزيب (مفسدة أعظم) من الإحداء على عديمه فيمكثون منه ارتكاباً لأخف الضررين.</p> <p>[اللخمي، أبو الحسن، التبصرة للخي، ١٠/٤٩٦٩]</p> <p>فصل [هل تجوز الكنائس في بلاد المسلمين؟] واختلف في الكنائس في بلاد المسلمين في العنوة إذا أقرروا فيها أهلها، وفيما اختطه المسلمون فسكنه أهل الذمة على ثلاثة أقوال: فقال ابن القاسم: ليس لهم أن يحدوا كنيسة في (١) بلاد المسلمين كانت (٢) عنوة، فأقروا (٣) فيها، أو اختط ذلك المسلمون فسكنها أهل الذمة معهم إلا أن يكونوا أعطوا ذلك فيوفى لهم (٤). وقال غيره: لهم أن يحدوا ذلك في أرض العنوة إذا أقرروا فيها (٥). وظاهر قوليهما (٦) أن القديم منها (٧) يترك. وقال ابن القاسم: وأما أهل الصلح فلا يمنعون من أن يحدوا الكنائس؛ لأنها بلادهم (٨). وقال ابن الماجشون في "كتاب ابن حبيب": أما أهل العنوة فلا يترك لهم عند ضرب الجزية كنيسة إلا هدمت ثم لا يحدوا (٩) كنيسة وإن كانوا معتزلين عن بلاد الإسلام (١٠) (١١). قال: وأما أهل الصلح، فلا يحدوا كنيسة في بلاد المسلمين، وإن شرط لهم ذلك لم يجز (١٢)، ويمنعوا من رم (١٣) كنائسهم القديمة إذا رثت إلا أن يكون شرط لهم ذلك فيوفى (١٤) لهم، ويمنعوا من الريادة الظاهرة والباطنة (١٥). وإن كانوا منقطعين عن بلاد المسلمين وليس بينهم مسلمون كان لهم أن يحدوا الكنائس.</p>
4.	Kewajiban menaati pemerintah	<p>المقدمات المهدات (٢٥٤/٢)</p> <p>فصل: وفرض لهم على الناس التسليم والطاعة والانقياد، فقال تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكُمْ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾ [النساء: ٦٥] الآية. وقال تعالى: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٥٩]، فقارن - تعالى - طاعته بطاعة رسوله - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وبطاعة أولي الأمر من عباده. وقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميرى فقد أطاعني، ومن عصى أميرى فقد عصاني». فصل: فمن عصى إماماً أو قاضياً أو حكماً من الحكام فيما أمر به من الحق أو حكم فيه بوجه العدل، فقد عصى الله ورسوله، وتعدى حدوده، وأما إن قضى بغير العدل، أو أمر بغير الحق، فطاعته غير لازمة، لقول رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»، إلا أن</p>



No.	Data	Transkrip Data
1.	<p>Kasus yang bersinggungan dengan konsep <i>i'ānah alā al-ma'siyāt</i> (menolong orang lain dalam masalah kemaksiatan)</p>	<p>الفتاوى الفقهية الكبرى (١٤/٢٤٨) (سُئِلَ) عَنْ كَافِرٍ ضَلَّ عَنْ طَرِيقِ صَنْبِهِ فَسَأَلَ مُسْلِمًا عَنِ الطَّرِيقِ إِلَيْهِ فَهَلْ لَهُ أَنْ يَدُلَّهُ الطَّرِيقَ إِلَيْهِ؟ (فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَدُلَّهُ لِذَلِكَ؛ لِأَنَّ لَا نُفَرُّ عَائِدِي الْأَصْنَامِ عَلَى عِبَادَتِهَا فَإِزْشَادُهُ لِلطَّرِيقِ إِلَيْهِ إِعَانَةٌ لَهُ عَلَى مَعْصِيَةٍ عَظِيمَةٍ فَحَرَّمَ عَلَيْهِ ذَلِكَ، وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ. حاشية الجمل على شرح المنهج - فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب (٩/٣) (فَرُغَ) بَاعَ شَافِعِيٌّ لِتَحْوِ مَالِكِيٍّ مَا يَصِحُّ بَيْعُهُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ دُونَهُ مِنْ غَيْرِ تَقْلِيدٍ مِنْهُ لِلشَّافِعِيِّ يَنْبَغِي أَنْ يَحْرَمَ وَيَصِحُّ لِأَنَّ الشَّافِعِيَّ مُعِينٌ لَهُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ وَهُوَ تَعَاظِي الْعَقْدِ الْفَاسِدِ وَيَجُوزُ لِلشَّافِعِيِّ أَنْ يَأْخُذَ الثَّمَنَ عَمَلًا بِإِعْتِقَادِهِ اهـ م ر حاشيتا قليوبي وعميرة (٧١/٣) قَوْلُهُ: (لِحُرْمَةِ الْمَكْتَبِ) وَلَا تَسْتَحِقُّ أُجْرَةَ لَوْ خَدَمْتِ، وَمِثْلُ ذَلِكَ كُلِّ مُحَرَّمٍ كَذِي سَلَسٍ وَجِرَاحَةٍ نَضَّاحَةٍ وَتَعْلِيمِ تَوْرَاةٍ وَإِنجِيلٍ وَسِحْرِ وَفُحْشٍ وَتَنْجِيمِ وَرَمَلٍ وَحَمَلٍ مُسَكِّرٍ لِغَيْرِ إِرَاقَتِهِ، وَتَصْوِيرِ حَيَوَانٍ وَنِيَاحَةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَلَا يَجُوزُ بَدْلُ مَالٍ فِيهِ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ، وَمِثْلُهُ أَيْضًا اسْتِئْجَارُ كَافِرٍ مُسْلِمًا لِإِنِّاءِ نَحْوِ كَيْبَسِيَّةٍ، وَإِنْ أَقْرَأُوا عَلَيْهِمْ لِحُرْمَتِهِ وَمَا نَقِلَ عَنِ الزُّرْكَانِيِّ مِنْ جَوَازِهِ مَحْمُولٌ عَلَى كَيْبَسِيَّةٍ لِلْمَارَةِ، وَمِثْلُهُ اسْتِئْجَارُ أَجْنَبِيٍّ أَجْنَبِيَّةً لِحُدْمَتِهِ، وَلَوْ أُمَّةً؛ لِأَنَّهُ لَا يَجْلُو عَنِ النَّظَرِ غَالِيًا. فتح المعين بشرح قرّة العين بمهمات الدين (ص: ٣٢٦) وحرّم أيضا: بيع نحو عنب ممن علم أو ظن أنه يتخذه مسكرا للشرب والأمرد ممن عرف بالفجور به والديك للمهارشة والكبش للمناطحة والحريبر لرجل يلبسه وكذا بيع نحو المسك لكافر يشتري لتطيبب الصنم والحيوان لكافر علم أنه يأكله بلا ذبح لان الأصح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كالمسلمين عندنا خلافا لأبي حنيفة رضي الله تعالى عنه فلا يجوز الإعانة عليهما ونحو ذلك من كل تصرف يفضي إلى معصية يقينا أو ظنا ومع ذلك يصح البيع. نهاية الزين (ص: ٢٢٩) (و) حرم (بيع نحو عنب) كرطب وتمر وزبيب (ممن) من بمعنى اللأم أي لمن (ظن أنه يتخذُه مسكرا) ومثل ذلك كل تصرف يفضي إلى معصية كبيع أمرد لمن عرف بالفجور وأمة لمن يتخذها لغناء محرم وخشب لمن يتخذُه آلة هو ودابة لمن يكلفها فوق طاقتها وورق مُشْتَمَلِ عَلَى نَحْوِ اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى لِمَنْ يَتَّخِذُهُ كَاغْدَا لِلدَّرَاهِمِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا فِيهِ امْتِهَانٌ وَثُوبٌ حَرِيرٍ لِلْبَسِ رَجُلٍ بِلَا نَحْوِ ضَرُورَةٍ وَسَلَاحٍ لِنَحْوِ بَاغٍ وَقَاطِعِ طَرِيقٍ وَدِيكٍ لِلْمَهَارِشَةِ وَكَبَشٍ لِلْمَنَاطِحَةِ وَالْحُرْمَةُ ثَابِتَةٌ وَإِنْ كَانَ الْمَبِيعُ لِنَحْوِ صَبِيٍّ وَلَمْ يُوْجَدْ مِنْ يَرْغَبُ فِيهِ بِذَلِكَ غَيْرِ الْمُتَّخِذِ الْمُدْكُورِ. إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (٢٩/٣) وإنما حرم ما ذكر لأنه سبب لمعصية محققة أو مظنونة... فالمراد بالمعرفة ما يشمل الظن. وعبارة شيخ الإسلام: ومحل تحريم بيعه ذلك ممن ذكر: إذا تحقق أو ظن أنه يفعل ذلك، فإن توهمه كره. اهـ. (قوله: والديك (الخ) أي وحرّم بيع الديك للمهارشة، أي المحارشة، وتسلب بعضها على بعض. قال في القاموس: التهريش: التحريش بين الكلاب، والإفساد بين الناس. والمحارشة: تحريش بعضها على بعض. اهـ. (قوله: والكبش للمناطحة) أي وحرّم بيع الكبش لأجل المناطحة. قال في القاموس: نطحه، كمنعه، وضره: أصابه بقرنه. وانتطحت الكباش: تناطحت. والنطيحة التي ماتت منه. اهـ. (قوله: والحريبر (الخ) أي وحرّم بيع الحريبر على رجل، لأجل أن يلبسه. قال في</p>

		<p>النهاية: بلا نحو ضرورة. اه. ومفهومه أنه إذا كان لنحو ضرورة - ككثرة قمل، أو فجأة حرب - جاز بيعه عليه. (قوله: وكذا بيع نحو المسك إلخ) أي وكذا يحرم بيع نحو مسك من كل طيب يتطيب به على كافر يشتره لأجل تطيب الصنم. (قوله: والحيوان لكافر إلخ) أي وكذا يحرم بيع الحيوان على كافر علم البائع أنه يأكله بلا ذبح شرعي. (قوله: لأن الأصح إلخ) تعليل لما بعد، وكذا قوله كالمسلمين: أي كما أن المسلمين مخاطبون بها. (وقوله: عندنا) متعلق بمخاطبون، أي مخاطبون بذلك عندنا معاشر الشافعية (قوله: خلافا لأبي حنيفة رضي الله تعالى عنه) أي فإنه يقول لا مخاطبون بذلك، وهذا محترز التقييد بعندنا. (قوله: فلا يجوز) هذا من جملة التعليل، وهو محطه: أي وإذا كان الكفار مخاطبين بذلك فيحرم عليهم ما ذكر - من تطيب الصنم، وأكل الحيوان من غير ذبح - ولا يجوز لنا إعانتهم على ذلك ببيع ما ذكر عليهم. (وقوله: عليهما) أي على تطيب الصنم، وعلى أكل الحيوان بلا ذبح (قوله: ونحو ذلك) بالرفع معطوف على بيع نحو المسك إلخ، أي وكذا يحرم نحو ذلك. (وقوله: من كل تصرف يفضي إلى معصية) بيان لنحو، وذلك كبيع الدابة لمن يكلفها فوق طاقتها، والأمة على من يتخذها لغناء محرم، والخشب على من يتخذ آلة لهو، وكإطعام مسلم مكلف كافرا مكلفا في نهار رمضان، وكذا بيعه طعاما علم أو ظن أنه يأكله نهارا. (قوله: ومع ذلك إلخ) راجع لجميع ما قبله، أي ومع تحريم ما ذكر من بيع نحو العنب، وما ذكر بعد يصح البيع.</p> <p>إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (١٢/٣)</p> <p>(قوله: بخلاف غير آلة الحرب إلخ) أي فيصح بيعه للحربي. (وقوله: ولو مما تتأق) أي ولو كان ذلك الغير مما تتأق آلة الحرب منه كالحديد. (قوله: وقوله: إذ لا يتعين جعله عدة حرب) فإن ظن جعله عدة حرب: حرم.</p> <p>حاشية الجبري على الخطيب - تحفة الحبيب على شرح الخطيب (٤٥٥/٣)</p> <p>قَوْلُهُ: (مَنْ أَكْثَرَ مَالِهِ حَرَامٌ) أَيِ وَالْوَلِيْمَةُ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ ق ل، وَقَوْلُهُ أَكْثَرَ لَيْسَ قَيْدًا. قَوْلُهُ: (حَرَمْتُ إِجَابَتَهُ) أَيِ وَإِنْ لَمْ يَأْكُلْ لِمَا فِيهِ مِنَ الْإِعَانَةِ عَلَى الْمُعْصِيَةِ أَوْ الْإِفْرَارِ عَلَيْهَا. قَوْلُهُ: (وَأَلَّا) أَيِ إِنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ عَيْنَ الطَّعَامِ مِنَ الْحَرَامِ، فَلَا تَحْرُمُ الْإِجَابَةَ بَلْ تُكْرَهُ كَمَا قَدَّمَهُ.</p> <p>كنز الراغبين (١٠١/٣)</p> <p>(وَإِنْ وَقَفَ عَلَى جِهَةِ مُعْصِيَةٍ كَعِمَارَةِ كَنَائِسٍ قَبَاطِلٌ)؛ لِأَنَّهُ إِعَانَةٌ عَلَى الْمُعْصِيَةِ.</p> <p>حاشية الشيرازي على نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٤٦٥/٣)</p> <p>لَوْ تَبَاعَ شَافِعِيٌّ وَمَالِكِيٌّ بِالْمُعَاوَاةِ أَيْمَ الْمَالِكِيِّ لِإِعَانَتِهِ الشَّافِعِيَّ عَلَى الْمُعْصِيَةِ؛ لِأَنَّ الْمُعَاوَاةَ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ عَقْدٌ قَائِدٌ فَهُوَ حَرَامٌ، لَكِنَّ نُقِلَ عَنِ الْمَالِكِيَّةِ عَدَمُ إِثْمِ الْمَالِكِيِّ فَلْيُرَاجَعْ أَهْمُ عَلَى حَجِّحِ</p>
2.	<p>Catatan Izzuddin bin Abdis Salam atas konsep <i>i'ānah alā al-ma'siyāt</i> (menolong orang lain dalam masalah kemaksiatan)</p>	<p>قواعد الأحكام في مصالح الأنام (٢٩١١)</p> <p>وَكَذَلِكَ الْوَلَايَةُ عَلَى الْمُكُوسِ وَعَضْبِ الْأُمُوالِ، وَتَضْمِينِ الْحُمُورِ وَالْأَبْضَاعِ، وَكَذَلِكَ الْإِعَانَةُ عَلَى إِثْمِ وَعُدُوانِ وَفُسُوقِ وَعِصْيَانِ، وَقَدْ تَجَوَّزَ الْمُعَاوَنَةُ عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ وَالْفُسُوقِ وَالْعِصْيَانِ لَا مِنْ جِهَةِ كُوزِهِ مُعْصِيَةٍ، بَلْ مِنْ جِهَةِ كُوزِهِ وَسَبِيلَهُ إِلَى مَصْلَحَةٍ وَهُوَ أَمْتَلَةٌ مِنْهَا مَا يُبَدَّلُ فِي افْتِكَالِهِ الْأَسَارَى فَإِنَّهُ حَرَامٌ عَلَى آخِذِيهِ مُبَاحٌ لِإِذْلِيهِ وَمِنْهَا أَنْ يُرِيدَ الظَّالِمُ قَتْلَ إِنْسَانٍ مُصَادَرَةً عَلَى مَالِهِ وَتَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ يَفْتُلُهُ إِنْ لَمْ يَدْفَعْ إِلَيْهِ مَالَهُ، فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ بَدْلُ مَالِهِ فَكَأَنَّ لِنَفْسِهِ، وَمِنْهَا أَنْ يُكْرِهَ امْرَأَةً عَلَى الرِّزَا وَلَا يَبْزُكُهَا إِلَّا بِأَفْتِدَائِهِ بِمَالِهَا أَوْ بِمَالِ غَيْرِهَا فَيَلْزَمُهَا ذَلِكَ عِنْدَ إِمْكَانِهِ. وَلَيْسَ هَذَا عَلَى التَّحْقِيقِ مُعَاوَنَةً عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ وَالْفُسُوقِ وَالْعِصْيَانِ وَإِنَّمَا هُوَ إِعَانَةٌ عَلَى دَرَةِ الْمَقَاسِدِ فَكَانَتْ الْمُعَاوَنَةُ عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ وَالْفُسُوقِ وَالْعِصْيَانِ فِيهَا تَبَعًا لَا مَقْصُودًا.</p> <p>قواعد الأحكام في مصالح الأنام (٨٧١١)</p>

		وَكذَلِكَ نُعِينُ الْآخَرَ عَلَى إِفْسَادِ الْأُبْضَاعِ دَفْعًا لِمُفْسَدَةِ الدَّمَاءِ وَهِيَ مَعْصِيَةٌ، وَلَكِنْ قَدْ يَجُوزُ الْإِعَاثَةُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ لَا لِكَوْنِهَا مَعْصِيَةٌ بَلْ لِكَوْنِهَا وَسِيلَةً إِلَى تَحْصِيلِ الْمَصْلَحَةِ الرَّاجِحَةِ وَكَذَلِكَ إِذَا حَصَلَ بِالْإِعَاثَةِ مَصْلَحَةٌ تَرْبُو عَلَى مَصْلَحَةِ تَقْوِيَتِ الْمُفْسَدَةِ كَمَا، تُبَدَّلُ الْأَمْوَالُ فِي فِدَى الْأَسْرَى الْأَحْرَارِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَيْدِي الْكُفْرَةِ وَالْفَجْرَةِ.
2.	Klasifikasi Status Kenegaraan & Implikasinya	منهاج الطالبين وعمدة المفتين (ص. ٥٢٨) وَتَمَنُّهُمْ إِحْدَاثَ كَنِيسَةٍ فِي بَلَدٍ أَحَدْتْنَاهُ أَوْ أَسْلَمَ أَهْلُهُ عَلَيْهِ، وَمَا فَتِحَ عَنُودَهُ لَا يُجَدُّونَهَا فِيهِ، وَلَا يُقْرُونَ عَلَى كَنِيسَةٍ كَانَتْ فِيهِ فِي الْأَصْحَحِ، أَوْ صُلِّحًا بِشَرْطِ الْأَرْضِ لَنَا، وَشَرْطِ إِسْكَانِهِمْ، وَإِبْقَاءِ الْكِنَائِسِ جَارًا، وَإِنْ أُطْلِقَ فَالْأَصْحَحُ الْمَنْعُ، أَوْ لَهُمْ قُرْرَتْ، وَلَهُمْ الْإِحْدَاثُ فِي الْأَصْحَحِ.
3.	Sikap atas keberadaan Rumah Ibadah Non Muslim yang sudah ada terlebih dahulu	فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب (٢/٢٢١) (و) لَرَمْنَا (مَنْعُهُمْ إِحْدَاثَ كَنِيسَةٍ وَخَوَّهَا) كَنِيسَةً وَصَوْمَعَةً لِلتَّعْبُدِ فِيهِمَا (و) لَرَمْنَا (هَدْمُهُمَا) بِبَلَدٍ أَحَدْتْنَاهُ كَبَدَادَ وَالْقَاهِرَةَ أَوْ أَسْلَمَ أَهْلُهُ عَلَيْهِ كَالْبَيْتِ وَالْمَدِينَةِ أَوْ فَتَحْنَا عَنُودَهُ كِمَضَرَ وَأَصْبَهَانَ أَوْ صُلِّحًا مُطْلَقًا أَوْ بِشَرْطِ كَوْنِهِ لَنَا لَمْ نَشْرَطْ إِحْدَاثَهُمَا فِي مَسْأَلَةِ الْمَنْعِ، وَلَا إِبْقَاءَهُمَا فِي مَسْأَلَةِ الْهَدْمِ؛ لِأَنَّهُ مِلْكٌ لَنَا (لَا بِبَلَدٍ فَتَحْنَا صُلِّحًا وَشَرْطِ) كَوْنُهُ (لَنَا مَعَ إِحْدَاثِهِمَا) فِي الْأَوَّلِ (أَوْ إِبْقَائِهِمَا) فِي الْثَانِيَةِ (أَوْ) شَرْطِ كَوْنِهِ (لَهُمْ) وَيُؤَدُّونَ خَرَاجَهُ فَلَا تَمْنَعُهُمْ إِحْدَاثُهُمَا، وَلَا نَهْدُمُهُمَا؛ لِأَنَّهُ مِلْكُهُمْ فِيمَا إِذَا شَرِطَ لَهُمْ وَكَأَنَّهُمْ اسْتَنْتُوا إِحْدَاثَهُمَا أَوْ إِبْقَاءَهُمَا فِيمَا إِذَا شَرِطَ لَنَا نَعَمْ، لَوْ وَجَدْنَا بِبَلَدٍ لَمْ نَعْلَمْ إِحْدَاثَهُمَا بِهِ بَعْدَ إِحْدَاثِهِ أَوْ الْإِسْلَامَ عَلَيْهِ أَوْ فَتْحِهِ، وَلَا وَجُودَهُمَا بِهَا عِنْدَهَا لَمْ نَهْدُمُهُمَا؛ لِإِحْتِمَالِ أَنَّهَا كَانَتْ فِي قَرْيَةٍ أَوْ بَرِّيَّةٍ، فَاتَّصَلَتْ بِهَا عِمَارَتُنَا وَقَوْلِي: وَخَوَّهَا مِنْ زِيَادَتِي وَكَذَا مَسْأَلَةُ الْفَتْحِ صُلِّحًا مُطْلَقًا أَوْ بِشَرْطِ كَوْنِ الْبَلَدِ لَنَا مَعَ شَرْطِ إِحْدَاثِ مَا ذُكِرَ وَهُوَ مَا تَقَلَّهُ الشَّيْخَانِ فِي الْأَخِيرَةِ عَنِ الرُّوْبَائِيِّ وَعَبْرَهُ وَأَقْرَأَهُ وَتَوَقَّفَ فِيهِ الْأَدْرَجِيُّ، بَلْ صَرَّحَ الْمَأْوَرِدِيُّ بِالْمَنْعِ وَحَمَلَ الرَّزْكَانِيُّ عَدَمَهُ عَلَى مَا إِذَا دَعَتْ إِلَيْهِ ضَرُورَةٌ، وَمَسْأَلَةُ الْهَدْمِ بِبَلَدٍ أَحَدْتْنَاهُ أَوْ أَسْلَمَ أَهْلُهُ عَلَيْهِ مِنْ زِيَادَتِي.
4.	Restorasi ulang rumah ibadah	المجموع شرح المذهب (١٩/٤١٢) (فصل) ويمنعون من احداث الكنائس والبيع والصوامع في بلاد المسلمين لِمَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ (أَيُّمَا مَصْرَ مَصْرَتَهُ الْعَرَبُ فَلَيْسَ لِلْعَجَمِ أَنْ يَبْنُوا فِيهِ كَنِيسَةً) وَرَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنَمٍ فِي كِتَابِ عَمْرِ عَلَى نَصَارَى الشَّامِ (انكُم لِمَا قَدِمْتُمْ عَلَيَّا شَرَطْنَا لَكُمْ عَلَى أَنْفُسِنَا أَنْ لَا نُحْدِثَ فِي مَدَائِنِنَا وَلَا فِي مَا حَوْلَهَا دَبْرًا وَلَا قَلَابِيَةً وَلَا كَنِيسَةً وَلَا صَوْمَعَةً رَاهِبًا، وَهَلْ يَجُوزُ إِقْرَارُهُمْ عَلَى مَا كَانَ مِنْهَا قَبْلَ الْفَتْحِ يَنْظُرُ فِيهِ فَإِنْ كَانَ فِي بَلَدٍ فَتَحَ صُلْحًا وَاسْتَنْفَى فِيهِ الْكِنَائِسَ وَالْبَيْعَ جَازَ إِقْرَارُهُمَا لِأَنَّهُ إِذَا جَازَ أَنْ يَصَالِحُوا عَلَى أَنْ لَنَا النِّصْفَ وَلَهُمُ النِّصْفَ جَازَ أَنْ يَصَالِحُوا عَلَى أَنْ لَنَا الْبَلَدَ الْكِنَائِسَ وَالْبَيْعَ. وَإِنْ كَانَ فِي بَلَدٍ فَتَحَ عَنُودَهُ أَوْ فَتَحَ صُلْحًا وَلَمْ تَسْتَنْ الْكِنَائِسَ وَالْبَيْعَ فِيهِ وَجِهَانِ (أَحَدُهُمَا) أَنَّهُ لَا يَجُوزُ كَمَا لَا يَجُوزُ إِقْرَارُ مَا أَحْدَثُوا بَعْدَ الْفَتْحِ (وَالثَّانِي) أَنَّهُ يَجُوزُ لِأَنَّهُ لَمَّا جَازَ إِقْرَارُهُمْ عَلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنَ الْكُفْرِ جَازَ إِقْرَارُهُمْ عَلَى مَا بَنَى لِلْكَفْرِ، وَمَا جَازَ تَرْكُهُ مِنْ ذَلِكَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ إِذَا انْهَدَمَ فَهَلْ يَجُوزُ إِعَادَتُهُ؟ فِيهِ وَجِهَانِ (أَحَدُهُمَا) وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ سَعِيدٍ الْإِصْطَخَرِيِّ وَأَبِي عَلِيٍّ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِمَا رُوِيَ كَثِيرًا مِنْ مَرَّةٍ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَبْنِي الْكَنِيسَةَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ وَلَا يَجِدُّ مَا خَرِبَ مِنْهَا. وَرَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنَمٍ فِي كِتَابِ عَمْرِ عَلَى نَصَارَى الشَّامِ: وَلَا يَجِدُّ مَا خَرِبَ مِنْهَا، لِأَنَّهُ بِنَاءُ كَنِيسَةٍ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ مَنَعٌ مِنْهَا كَمَا لَوْ بَنَاهَا فِي مَوْضِعٍ آخَرَ. (وَالثَّانِي) أَنَّهُ يَجُوزُ لِأَنَّهُ لَا جَازَ تَشْيِيدِ مَا تَشَعَّبَ مِنْهَا جَازَ إِعَادَتِهِ مَا انْهَدَمَ وَإِنْ عَقِدْتَ الذِّمَّةَ فِي بَلَدٍ لَهُمْ يَنْفَرِدُونَ بِهِ لَمْ يَمْنَعُوا مِنْ إِحْدَاثِ الْكِنَائِسِ وَالْبَيْعِ وَالصَّوَامِعِ وَلَا مِنْ إِعَادَتِهِ مَا خَرِبَ مِنْهَا، وَلَا يَمْنَعُونَ مِنْ إِظْهَارِ الْخَمْرِ وَالْخَنزِيرِ

		والصليب وضرب الناقوس والجهر بالتوراة والانجيل وإظهار ما لهم من الاعياد ولا يؤخذون بلبس الغيار وشد الزناير لانهم في دار لهم فلم يمنعوا من إظهار دينهم فيه.
5.	Klausul dalam rekonsiliasi	<p>نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٩٩/٨)</p> <p>(وَنَمْنَعُهُمْ) حَتْمًا (إِحْدَاثَ كَنِيسَةٍ) وَبِيعَةَ وَصَوْمَعَةَ لِلتَّعْبُدِ وَلَوْ مَعَ غَيْرِهِ كَثْرُولِ الْمَارَةِ (فِي بَلَدٍ أَحَدُثَاتًا) كَالْقَاهِرَةِ وَالْبَصْرَةَ (أَوْ أَسْلَمَ أَهْلُهُ عَلَيْهِ) كَالْيَمَنِ، وَقَوْلُ بَعْضِ الشَّرَاحِ كَالْمَدِينَةِ مَحَلٌّ وَفَقِيهٌ لِأَنَّهَا مِنَ الْحِجَارِ وَهُمْ مَمْنُوعُونَ مِنْ سُكْنَانِهِ مُطْلَقًا كَمَا مَرَّ، وَيُهْدَمُ وَجُوبًا مَا أَحَدَثُوهُ، وَلَوْ لَمْ يُشْتَرَطْ عَلَيْهِمْ هَدْمُهُ وَالصَّلْحُ عَلَى تَمَكِينِهِمْ مِنْهُ بَاطِلٌ، وَمَا وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ وَلَمْ يُعْلَمْ إِحْدَاثُهُ بَعْدَ الْإِحْدَاثِ أَوْ الْإِسْلَامِ أَوْ الْفَتْحِ يَبْقَى لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ كَانَ بِرِّيَّةٍ أَوْ قُرْبِيَّةٍ وَاتَّصَلَ بِهَا الْعُمَرَانُ، وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا يَأْتِي فِي الصَّلْحِ، أَمَّا مَا بَيَّنَّ مِنْ ذَلِكَ لِتُرُؤْلِ الْمَارَةِ وَلَوْ مِنْهُمْ فَيَجُوزُ كَمَا جَزَمَ بِهِ صَاحِبُ الشَّامِلِ وَعَبْرُهُ (وَمَا يَفْتَحُ عَنَوَةً) كِمِصْرَ عَلَى مَا مَرَّ وَبِلَادِ الْمَغْرِبِ (لَا يُجْدُثُونَهَا فِيهِ) أَيُّ لَا يَجُوزُ تَمَكِينُهُمْ مِنْ ذَلِكَ فَيَجِبُ هَدْمُ مَا أَحَدَثُوهُ فِيهِ لِمَلِكِ الْمُسْلِمِينَ لَهَا بِالِاسْتِيْلَاءِ (وَلَا يَقْرُونَ عَلَى كَنِيسَةٍ كَانَتْ فِيهِ) حَالِ الْفَتْحِ يَقِينًا (فِي الْأَصَحِّ) لِذَلِكَ. وَالثَّانِي يَقْرُونَ بِالْمُصْلَحَةِ (أَوْ) فَيَفْتَحُ (صُلْحًا) بِشَرْطِ الْأَرْضِ لَنَا وَشَرْطِ إِسْكَانِهِمْ) بِحَرَاجِ (وَإِنْقَاءِ الْكَنَائِسِ) وَنَحْوِهَا (لَهُمْ جَازٌ) لِأَنَّ الصَّلْحَ إِذَا جَازَ بِشَرْطِ كَوْنِ جَمِيعِ الْبَلَدِ لَهُمْ فَبَعْضُهَا بِالْأُولَى، وَقَضِيَّتُهُ قَوْلُهُ وَإِبْقَاءُ مَنْعِ الْإِحْدَاثِ وَهُوَ كَذَلِكَ، وَلَيْسَ مِنْهُ إِعَادَتُهَا وَتَرْهِيمُهَا بِأَلْتِهَا أَوْ بِأَلَّةٍ جَدِيدَةٍ مَعَ تَعَدُّرِ فِعْلِ ذَلِكَ بِالْقَدِيمَةِ وَحَدَاها وَنَحْوِ تَطْيِينِهَا وَتَنْوِيرِهَا مِنْ دَاخِلِ وَخَارِجِ أَيْضًا، وَقَضِيَّتُهُ أَيْضًا مَنْعُ شَرْطِ الْإِحْدَاثِ وَهُوَ كَذَلِكَ إِنْ لَمْ تَدْعُ لَهُ ضَرُورَةٌ وَإِلَّا جَازَ. (وَإِنْ) (أُطْلِقَ) شَرْطُ الْأَرْضِ لَنَا وَسَكَتَ عَنْ نَحْوِ الْكَنَائِسِ (فَالْأَصَحُّ الْمَنْعُ) مِنْ إِبْقَائِهَا وَإِحْدَاثِهَا فَتُهْدَمُ كُلُّهَا لِأَنَّ الْإِطْلَاقَ يَقْتَضِي صَيْرُورَةَ جَمِيعِ الْأَرْضِ لَنَا وَلَا يَلْزَمُ مِنْ بَقَائِهَا بَقَاءَ مَحَلِّ عِبَادَتِهِمْ فَقَدْ يُسْلِمُونَ وَقَدْ يُحْفَنُونَ عِبَادَتَهُمْ. وَالثَّانِي لَا، وَهِيَ مُسْتَثْنَاءٌ بِقَرْبَتِهَا لِلْحَالِ لِجَاحَتِهِمْ إِلَيْهَا فِي عِبَادَتِهِمْ (أَوْ) بِشَرْطِ أَنْ تَكُونَ الْأَرْضُ لَهُمْ وَيُؤَدُّونَ حَرَاجَهَا (فَرَرْتُ) كَنَائِسُهُمْ أَوْ نَحْوِهَا (وَلَهُمْ الْإِحْدَاثُ فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّ الْأَرْضَ لَهُمْ. وَالثَّانِي الْمَنْعُ لِأَنَّ الْبَلَدَ تَحْتَ حُكْمِ الْإِسْلَامِ، وَمَا يَفْتَحُ فِي دِيَارِ أَهْلِ الْحَرْبِ بِشَرْطِ مِمَّا ذَكَرَ لَوْ اسْتَوْلَوْا عَلَيْهِ بَعْدَ كَيْبَتِ الْمَقْدِسِ ثُمَّ فُتِحَ بِشَرْطِ يُخَالِفُ ذَلِكَ فَهَلِ الْعَبْرَةُ بِالشَّرْطِ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ بِالْفَتْحِ صَارَ دَارَ إِسْلَامٍ فَلَا يَعُودُ دَارَ كُفْرٍ، أَوْ بِالشَّرْطِ الثَّانِي لِأَنَّ الْأَوَّلَ نُسِخَ بِهِ وَإِنْ لَمْ تَصِرْ دَارَ كُفْرٍ، الْأَوَّلُ وَالْأَوَّلُ، وَمَعْنَى لَهُمْ هُنَا وَفِي نِظَائِرِهِ الْمُوَهِّمَةِ حَلَّ ذَلِكَ لَهُمْ أَوْ اسْتِحْقَاقَهُمْ لَهُ عَدَمُ تَعَرُّضِنَا لَهُمْ لِأَنَّهُ يَجُوزُ لَهُمْ ذَلِكَ وَتُنْفِيهِمْ بِهِ بَلْ هُوَ مِنْ جُمْلَةِ الْمَعَاصِي الَّتِي يَقْرُونَ عَلَيْهَا.</p>

 Madzhab Hambali

No.	Data	Transkrip Data
1.	Kasus yang bersinggungan dengan konsep <i>i'ānah al-ama'siyāt</i> (menolong orang lain dalam masalah kemaksiatan)	<p>مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (٦٠٦/٣)</p> <p>(وَلَا) تَصِحُّ إِجَارَةُ (دَارٍ لِتُجْعَلَ كَنِيسَةً) أَوْ بَيْعَةٌ أَوْ صَوْمَعَةٌ، (أَوْ بَيْتِ نَارٍ) لِتَعْبُدَ الْمُجُوسِ، (أَوْ) لِيَبِيعَ حَمْرٌ وَقِمَارٌ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ إِعَانَةٌ عَلَى الْمَعْصِيَةِ قَالَ تَعَالَى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: ٢].</p> <p>مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (٤٨٢/٤)</p> <p>(فَضْلٌ: وَلَا تَصِحُّ) الْوَصِيَّةُ (لِتَحْوِ كَنِيسَةً) كَدَيْرٍ وَبِيعَةَ (أَوْ بَيْتِ نَارٍ) أَوْ صَوْمَعَةَ أَوْ مَسْكَانٍ مِنْ أَمَاكِنِ الْكُفْرِ، سِوَاءَ كَانَتْ الْوَصِيَّةُ بِنَائِهَا أَوْ إِصْلَاحِهَا وَعَبْرٌ ذَلِكَ كَثْرَاءُ حُضْرِهَا وَشُعْلُ قَنَادِيلِهَا وَخِدْمَتِهَا وَلَوْ مِنْ ذِمِّيٍّ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ إِعَانَةٌ عَلَى مَعْصِيَةٍ؛ فَلَمْ تَصِحَّ الْوَصِيَّةُ بِهِ، كَوْصِيَّتِهِ بِعَبْدِهِ أَوْ أَمْتِهِ لِلْفُجُورِ أَوْ شِرَاءِ حَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ يُتَصَدَّقُ بِهِ عَلَى أَهْلِ الدِّمَّةِ (أَوْ كُتْبِ نَحْوِ السَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ) كَالزُّبُورِ وَالصُّحُفِ، وَلَوْ كَانَتْ الْوَصِيَّةُ مِنْ ذِمِّيٍّ فَلَا تَصِحُّ؛ لِأَنَّهَا مَنْسُوخَةٌ وَالِاسْتِعْجَالُ بِهَا</p>

غَيْرُ جَائِزٍ لِمَا فِيهَا مِنَ التَّغْيِيرِ وَالتَّوْبِيلِ، «وَقَدْ غَضِبَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِينَ رَأَى مَعَ عَمْرٍ شَيْئًا مَكْتُوبًا مِنَ التَّوْرَةِ». (ولا) تَصِحُّ الوَصِيَّةُ لِكِتَابَةِ كُتُبِ (سِحْرِ) وَتَعْزِيمِ وَتَنْجِيمِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الكُتُبِ الْمُحَرَّمَاتِ؛ لِأَنَّهَا إِعَانَةٌ عَلَى المَعْصِيَةِ.

شرح منتهى الإرادات - دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (٢٠٠/٢)

(أو) أي: ولا تَصِحُّ إِجَارَةُ (دَارِ لِتَعْمَلُ كَنَيْسَةً) أَوْ بَيْعَةُ أَوْ صَوْمَعَةَ رَاهِبٍ (أَوْ بَيْتَ نَارٍ) لِتَعْبُدَ المَجُوسَ (أَوْ لِبَيْعِ حَمْرٍ) أَوْ القَمَارِ وَنَحْوِهِ. سَوَاءٌ شَرَطَ ذَلِكَ فِي العَقْدِ أَوْ عَلِمَ بِقَرِينَةٍ؛ لِأَنَّهُ فَعَلُ مُحَرَّمٌ فَلَمْ تَجْزِ الإِجَارَةُ عَلَيْهِ كِإِجَارَةِ عَبْدِهِ لِلْفُجُورِ بِهِ، وَإِنْ اسْتَأْجَرَ ذِيَّ مِنْ مُسْلِمٍ دَارًا وَأَرَادَ بَيْعَ الحَمْرِ بِهَا فَلَهُ مَنْعُهُ؛ لِأَنَّهُ مُحَرَّمٌ.

الكافي في فقه الإمام أحمد (٢٠١/٢)

فصل ولا يصح الوقف إلا على بر: كالمساجد، والقناطر، والفقراء، والأقارب، أو آدي معين، مسلمًا كان أو ذميًّا؛ لأنه في موضع القرية، ولهذا جازت الصدقة عليه، ولا يصح على غير ذلك، كالبيع وكتب التوراة والإنجيل؛ لأن هذا إعانة على المعصية، ولأن هذه الكتب منسوخة قد بدل بعضها، وقد غضب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حين رأى مع عمر شيئًا استكتبه منها، ولا على قطاع الطريق؛ لأنه إعانة على المعصية. والقصد بالوقف القرية، ولا على من لا يملك: كالميت، والملك، والحني؛ لأن الوقف تمليك في الحياة، ولا على عبد، أو أم ولد؛ لأنه لا يملك في رواية، وفي أخرى: ملكه غير لازم، والوقف لا يجوز أن يكون متزلزلًا، ولا على حربي أو مرتد؛ لأن ملكهما تجوز إزالته، والوقف يجب أن يكون لازمًا، ولا على غير معين: كرجل أو امرأة؛ لأن تمليك غير المعين لا يصح، فإن قيل: فكيف جاز الوقف على المساجد؟ وهي لا تملك، قلنا: الوقف إنما هو على المسلمين، لكن عين نفعًا خاصًا لهم.

المغني لابن قدامة (٤٨٠/٦)

إِسْأَلَةُ العَارِمُونَ وَهُمْ المَدِينُونَ العَاجِزُونَ عَنِ وِقَاةِ ذُبُونِهِمْ [٥١١٥] مَسْأَلَةٌ، قَالَ: (وَالعَارِمِينَ) وَهُمْ المَدِينُونَ العَاجِزُونَ عَنِ وِقَاةِ ذُبُونِهِمْ، هَذَا الصَّنْفُ السَّادِسُ مِنْ أَصْنَافِ الرِّكَاتِ. وَلَا خِلَافَ فِي اسْتِحْقَاقِهِمْ، وَتُبُوتِ سَهْمِهِمْ، وَأَنَّ المَدِينِينَ العَاجِزِينَ عَنِ وِقَاةِ ذُبُونِهِمْ مِنْهُمْ، لَكِنَّ إِنْ عَرِمَ فِي مَعْصِيَةٍ، مِثْلُ أَنْ يَشْتَرِيَ حَمْرًا، أَوْ يَصْرِفَهُ فِي زِنَاءٍ أَوْ قِمَارٍ أَوْ غِنَاءٍ وَنَحْوِهِ، لَمْ يُدْفَعْ إِلَيْهِ قَبْلَ التَّوْبَةِ شَيْءٌ؛ لِأَنَّهُ إِعَانَةٌ عَلَى المَعْصِيَةِ، وَإِنْ تَابَ، فَقَالَ القَاضِي: يُدْفَعُ إِلَيْهِ. وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ؛ لِأَنَّ إِثْقَالَ الدَّيْنِ الَّذِي فِي الدَّمَةِ لَيْسَ مِنَ المَعْصِيَةِ، بَلْ يَجِبُ تَفْرِيعُهَا، وَالْإِعَانَةُ عَلَى الوَاجِبِ قُرْبَةٌ لَا مَعْصِيَةٌ فَأَشْبَهَ مَنْ أَثْلَفَ مَالَهُ فِي المَعَاصِي حَتَّى افْتَقَرَ، فَإِنَّهُ يُدْفَعُ إِلَيْهِ مِنْ سَهْمِ الفُقَرَاءِ. وَفِيهِ وَجْهٌ آخَرٌ، لَا يُدْفَعُ إِلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ اسْتِدَانَةٌ لِلْمَعْصِيَةِ، فَلَمْ يُدْفَعْ إِلَيْهِ، كَمَا لَوْ لَمْ يَتَّبِعْ، وَلِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ أَنْ يَعودَ إِلَى الاسْتِدَانَةِ لِلْمَعَاصِي، ثِقَةً مِنْهُ بِأَنَّ ذَنْبَهُ يُقْضَى، بِخِلَافِ مَنْ أَثْلَفَ مَالَهُ فِي المَعَاصِي، فَإِنَّهُ يُعْطَى لِقْفَرِهِ، لَا لِمَعْصِيَتِهِ.

المبدع في شرح المنع (٤٢/٤)

إِبْيَعُ العَصِيرَ لِمَنْ يَتَّخِذُهُ حَمْرًا [وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ العَصِيرِ لِمَنْ يَتَّخِذُهُ حَمْرًا] قَطْعًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: ٢] وَهَذَا مَعُونَةٌ عَلَى الإِثْمِ فَيَكُونُ مُحَرَّمًا؛ وَلَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ عَقْدٌ عَلَى عَيْنٍ يُقْصَدُ بِهَا المَعْصِيَةُ أَشْبَهَ إِجَارَةَ الأُمَّةِ لِلرَّزِيِّ أَوْ لِلْعَنَاءِ، وَالمَذْهَبُ إِذَا عَلِمَ؛ أَي: تَحَقَّقَ، وَقِيلَ: أَوْ ظَنَّ، اخْتَارَهُ الشُّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ، وَعَلِمَ مِنْهُ أَنَّ بَيْعَ الحَمْرِ وَشِرَاءَهُ بَاطِلٌ إِجْمَاعًا، وَلَوْ مِنْ وَكَيْلٍ لِخَبْرِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (وَلَا يَصِحُّ سِلَاحُ فِي الفِئْتَةِ) أَي: بَيْنَ المُسْلِمِينَ؛ لِأَنَّهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - نَهَى عَنْهُ قَالَهُ أَحْمَدُ قَالَ: وَقَدْ يَقْتُلُ بِهِ وَلَا يَقْتُلُ بِهِ، وَإِنَّمَا هُوَ ذَرِيعَةٌ لَهُ (وَلَا لِأَهْلِ الحَرْبِ) أَوْ لِقَطَاعِ الطَّرِيقِ لِمَا فِيهِ مِنَ الإِعَانَةِ عَلَى المَعْصِيَةِ (وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَصِحَّ) فِي الحُجْبِ فِي الحُجْبِ (مَعَ التَّحْرِيمِ) كَمَا لَوْ دَلَّسَ العَيْبَ وَقَاسَهُ ابْنُ المُنْجَا عَلَى الصَّلَاةِ فِي الدَّارِ المَعْصُومَةِ إِذْ قِيلَ بِصِحَّتِهَا.

		<p>فَرَسٌ: لَا يَصِحُّ بَيْعُ مَا كُورٍ وَمَشْمُومٍ لِمَنْ يَشْرَبُ عَلَيْهِمَا السُّكَّرَ، وَأَفْدَاجٌ لِمَنْ يَشْرَبُ بِهَا، وَجَوَزٌ وَيَبِيضٌ لِقِمَارٍ وَأَمَةٌ وَأَمْرَدٌ لَوْطَاءٍ ذُبُرٌ أَوْ غَنَاءٍ، قَالَ أَحْمَدُ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَخَلَّفَ جَارِيَةً مُغْنِيَةً وَصَغِيرًا وَقَدْ احتَاجَ إِلَى بَيْعِهَا فَقَالَ: يَبِيعُهَا عَلَى أَنَّهَا سَادِجَةٌ، وَلَا عِبْرَةَ بِتَقْصِصِ قِيَمَتِهَا.</p> <p>المبدع في شرح المقنع (٤١٦/٤)</p> <p>(قَالَ تَجَوُّزُ الْإِجَارَةِ عَلَى الرَّثَا وَالزَّمْرِ وَالْغِنَاءِ) لِأَنَّ الْمُنْفَعَةَ الْمُحَرَّمَاتَةَ مَطْلُوبٌ عَدَمُهَا، وَصِحَّةُ الْإِجَارَةِ تُنَافِيهَا، إِذِ الْمُنْفَعَةُ الْمُحَرَّمَاتَةُ لَا تُقَابَلُ بِالْعَوُضِ فِي الْبَيْعِ، فَكَذَا فِي الْإِجَارَةِ أَشْبَهَ إِجَارَةَ أَمْتِهِ لِلرَّثَا، وَحَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ إِجْمَاعًا فِي الْمَغْنِيَةِ وَالنَّائِحَةِ (وَلَا إِجَارَةُ الدَّارِ لِتَجْعَلَ كَنَيْسَةً أَوْ بَيْتَ تَارٍ) مَعَ ظَنِّ الْفِعْلِ سِوَاءَ شَرْطِ ذَلِكَ فِي الْعُقُودِ أَوْ لَا، وَالْمُرَادُ بِهَا النَّارُ الَّتِي يَعْْبُدُهَا الْمَجُوسُ أَوْ مَنْ يَعْْبُدُهَا (أَوْ لِبَيْعِ الْحُمْرِ) لِأَنَّهُ فِعْلٌ مُحَرَّمٌ فَلَمْ تَجْزِ الْإِجَارَةُ عَلَيْهِ كِإِجَارَةِ عَبْدِهِ لِلْفُجُورِ، وَلِمَا فِيهِ مِنَ الْإِعَانَةِ عَلَى الْمَعْصِيَةِ.</p> <p>كشاف القناع عن متن الإقناع (٥٥٩/٣)</p> <p>[فَصَّلُ مِنْ شُرُوطِ الْإِجَارَةِ أَنْ تَكُونَ الْمُنْفَعَةُ مُبَاحَةً لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ] (أَنْ تَكُونَ الْمُنْفَعَةُ مُبَاحَةً لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ). أَيُّ بَأْنِ تَبَاحٍ مُطْلَقًا بِخِلَافِ مَا يُبَاحُ لِلضَّرُورَةِ أَوْ لِلحَاجَةِ كَأَوَانِي الذَّهَبِ وَالْكَلْبِ (مَقْصُودَةٌ) عَادَةً إِذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ (قَالَ نَصَحَ الْإِجَارَةَ عَلَى الرَّثَا، وَالزَّمْرِ، وَالْغِنَاءِ، وَالنَّائِحَةِ)؛ لِأَنَّهَا غَيْرُ مُبَاحَةٍ (وَلَا إِجَارَةُ كَاتِبٍ يَكْتُبُ ذَلِكَ) أَيُّ الْغِنَاءِ وَالنَّوْحِ وَكَذَا كِتَابَةُ شِعْرِ مُحَرَّمٌ أَوْ بَدْعَةٌ أَوْ كَلَامٌ مُحَرَّمٌ؛ لِأَنَّهُ انْتِفَاعٌ مُحَرَّمٌ. (وَلَا إِجَارَةُ الدَّارِ لِتَجْعَلَ كَنَيْسَةً أَوْ بَيْتَ تَارٍ أَوْ لِبَيْعِ الْحُمْرِ، أَوْ لِلْقِمَارِ) لِأَنَّ ذَلِكَ إِعَانَةٌ عَلَى مَعْصِيَةٍ. وَقَالَ تَعَالَى (وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) [المائدة: ٢] وَسِوَاءَ (شَرْطِ) ذَلِكَ (فِي الْعُقُودِ أَوْ لَا) إِذَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الْقُرَائِنُ (وَلَوْ اكْتَرَى ذِيٌّ مِنْ مُسْلِمٍ دَارًا) لَيْسَتْ كُنْهًا (فَأَرَادَ بَيْعَ الْحُمْرِ) فِيهَا (فَلْيَصَاحِبِ الدَّارَ مِنْهُ) مِنْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ مَعْصِيَةٌ.</p> <p>إعلام الموقعين عن رب العالمين (٦٣١٥)</p> <p>[النهي عن كل بيع يعين على معصية] الوجه السابع والتسعون (٣): قال الإمام أحمد رضي الله عنه: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع السلاح في الفتنة (٤)، ولا ريب أن هذا سد لذريعة الإعانة على المعصية، ويلزم من لم يسد الذرائع أن يجوز هذا البيع كما صرحوا به، ومن المعلوم أن هذا البيع يتضمن الإعانة على الإثم والعدوان، وفي معنى هذا كل بيع أو إجارة أو معاوضة تُعين على معصية الله تعالى كبيع السلاح للكفار والبغاة وقطاع الطريق، وبيع الرقيق لمن يفسق به أو يؤاجره لذلك، أو إجارة داره أو حانوته أو خانته لمن يقيم فيها سوق المعصية، وبيع الشمع أو إجارته لمن يعصي الله عليه، ونحو ذلك مما هو إعانة على ما يبغضه الله ويسخطه، ومن هذا عصر العنب لمن يتخذه خمراً وقد لعنه رسول الله هو والمعتصر -معاً، ويلزم من لم يسد الذرائع أن لا يلعن العاصر، وأن يجوز له أن يعصر العنب لكل أحد، ويقول: القصد غير معتبر في العقد، والذرائع غير معتبرة، ونحن مطالبون بالظواهر، والله يتولى السرائر، وقد صرحوا بهذا، ولا ريب في التنافي بين هذا وبين سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.</p>
2.	Klasifikasi Status Kenegaraan & Implikasinya	<p>المبدع في شرح المقنع (٣٧٩/٣)</p> <p>وَبِالْحَمْلَةِ فَأَمْصَارُ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةٌ: أَحَدُهَا: مَا مَصَرَهُ الْمُسْلِمُونَ، كَالْبَصْرَةِ، وَبَغْدَادَ، وَوَأَسِطَ، فَلَا يَجُوزُ إِحْدَاثُ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، وَلَوْ صُوِّلُوا عَلَيْهِ. الثَّانِي: مَا فَتَحَهُ الْمُسْلِمُونَ عَنْوَةً فَكَذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا صَارَتْ لِلْمُسْلِمِينَ، وَفِي جُوبِ هَدْمِ الْمُجُودِ وَحِجَانِ؛ وَالْمَجْرُومُ بِهِ عِنْدَ الْأَكْثَرِ إِفْرَارُهُمْ عَلَيْهَا، وَهَذَا فِي "الترغيب" "إِنْ لَمْ يُقَرَّرْ بِهِ أَحَدٌ بِجُزِيَّةٍ، وَإِلَّا لَمْ تَلْزَمْ. الثَّالِثُ: مَا فَتَحُوهُ صُلْحًا، وَهُوَ نَوْعَانِ: أَحَدُهَا: أَنْ يُصَالِحَهُمْ عَلَى أَنَّ الْأَرْضَ لَهُمْ، وَلَكِنَّا الْحَرَاجُ عَنْهَا، فَلَهُمْ إِحْدَاثُ مَا شَاءُوا. وَالثَّانِي: أَنْ يُصَالِحَهُمْ عَلَى أَنَّ الدَّارَ لِلْمُسْلِمِينَ فَالْحُكْمُ فِيهَا عَلَى مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الصُّلْحُ.</p>
3.	Sejarah dan Pendiri Negara	<p>أحكام أهل الذمة (١١٧٣/٣)</p>

		<p>الْبِلَادُ الَّتِي تَفَرَّقَ فِيهَا أَهْلُ الدِّمَةِ وَالْعَهْدِ ثَلَاثَةٌ أَقْسَامٌ: أَحَدُهَا: بِلَادُ أَنْشَأَهَا الْمُسْلِمُونَ فِي الْإِسْلَامِ. الثَّانِي: بِلَادُ أُدْنِيَتْ قَبْلَ الْإِسْلَامِ فَافْتَتَحَهَا الْمُسْلِمُونَ عَنُودًا وَمَلَكَوْا أَرْضَهَا وَسَاكِنِيهَا. الثَّلَاثُ: بِلَادُ أُدْنِيَتْ قَبْلَ الْإِسْلَامِ وَفَتَحَهَا الْمُسْلِمُونَ ضُلْحًا. فَأَمَّا الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: بِلَادُ أَنْشَأَهَا الْمُسْلِمُونَ فِي الْإِسْلَامِ. فَهُوَ مِثْلُ الْبَصْرَةِ وَالْكُوفَةِ وَوَأَسِطَ وَبَغْدَادَ وَالْقَاهِرَةَ. أَمَّا الْبَصْرَةُ وَالْكُوفَةُ فَأَدْنِيَتْنَا فِي خِلَافَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. قَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: كَانَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ هَمَّ أَنْ يَتَّخِذَ لِلْمُسْلِمِينَ مِصْرًا، وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ قَدْ غَزَوْا مِنْ قِبَلِ الْبَحْرِ وَفَتَحُوا الْأَهْوَاذَ وَكَابِلَ وَطَبْرِسْتَانَ، فَلَمَّا افْتَتَحُوهَا كَتَبُوا إِلَيْهِ: "إِنَّا وَجَدْنَا بِطَبْرِسْتَانَ مَكَانًا لَا بَأْسَ بِهِ". فَكَتَبَ إِلَيْهِمْ: "إِنَّ بَيْتِي وَبَيْتَكُمْ دِجْلَةٌ، وَلَا حَاجَةَ لِي فِي شَيْءٍ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ فِيهِ دِجْلَةٌ أَنْ نَتَّخِذَهُ مِصْرًا". قَالَ: فَقَدِمَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سُدُوسٍ يُقَالُ لَهُ ثَابِتٌ فَقَالَ لَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي مَرَرْتُ بِمَكَانٍ دُونَ دِجْلَةَ بِهِ بَادِيَةٌ يُقَالُ لَهَا الْحُرِّيَّةُ وَيُقَالُ لِلْأَرْضِ "الْبَصْرَةَ" وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ دِجْلَةَ فَرَسَخٌ فِيهِ خَلِيجٌ يَجْرِي فِيهِ الْمَاءُ وَأَجْمَةٌ قَصَبٍ. فَأَعْجَبَ ذَلِكَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَدَعَا عُثْبَةَ بْنَ غَزْوَانَ فَبَعَثَهُ فِي أَرْبَعِينَ رَجُلًا فِيهِمْ نَافِعُ بْنُ الْحَارِثِ وَزِيَادُ أَخُوهُ لِأُمَّهِ. قَالَ سَيْفُ بْنُ [عُمَرَ]: مُصِرَّتِ الْبَصْرَةَ سَنَةَ سِتِّ عَشْرَةَ، وَاخْتِطَّتْ قَبْلَ الْكُوفَةِ بِثَمَانِيَةِ أَشْهُرٍ. وَقَالَ قَتَادَةُ: أَوَّلُ مَنْ مَصَّرَ الْبَصْرَةَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي شَيْبَانَ يُسَمَّى الْمُتَنَّى بْنُ حَارِقَةَ، وَأَنَّهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: "إِنِّي نَزَلْتُ أَرْضًا بَصْرَةَ". فَكَتَبَ إِلَيْهِ: "إِذَا آتَاكَ كِتَابِي هَذَا فَاقْبُضْ حَتَّى يَأْتِيكَ أَمْرِي". فَبَعَثَ عُثْبَةَ بْنَ غَزْوَانَ مُعَلِّمًا وَأَمِيرًا، فَغَزَا الْأَبْلَةَ. وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ: إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَصَّرَ الْبَصْرَةَ وَالْكُوفَةَ. ٢٠٧ - فَضَّلَ [بَيْنَ] بِنَاءَ بَعْضِ الْمُدُنِ الْإِسْلَامِيَّةِ وَأَمَّا وَاسِطَ فَبَنَاهَا الْحَجَّاجُ بْنُ يُوْسُفَ سَنَةَ سِتِّ وَثَمَانِينَ مِنَ الْهِجْرَةِ، فِي السَّنَةِ الَّتِي مَاتَ فِيهَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ. وَأَمَّا بَغْدَادُ فَقَالَ سَلِيمَانُ بْنُ الْمَجَالِدِ وَزَيْدُ أَبِي جَعْفَرٍ: "خَرَجْتُ مَعَ أَبِي جَعْفَرٍ يَوْمًا قَبْلَ أَنْ تَبْنِي مَدِينَةَ بَغْدَادَ، وَنَحْنُ نَرْتَادُ مَوْضِعًا نَبْنِي فِيهِ مَدِينَةً يَكُونُ فِيهَا عَسْكَرُهُ، قَالَ: فَبَصَّرْنَا بِقَيْسِ شَيْخٍ كَبِيرٍ وَمَعَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ النَّصَارَى، فَقَالَ: اذْهَبْ إِلَى هَذَا الْقَيْسِ نَسْأَلُهُ، فَمَضَى إِلَيْهِ فَوَقَّفَ عَلَيْهِ أَبُو جَعْفَرٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: يَا شَيْخُ أَبْلَعْكَ أَنَّهُ يُبْنَى هَاهُنَا مَدِينَةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ؛ وَلَسْتُ بِصَاحِبِهَا. قَالَ: وَمَا عَلِمُكَ؟ قَالَ الْقَيْسُ: وَمَا اسْمُكَ؟ قَالَ اسْمِي عَبْدُ اللَّهِ. قَالَ: فَلَسْتُ بِصَاحِبِهَا. قَالَ: فَمَا اسْمُ صَاحِبِهَا؟ قَالَ: مِفْلَاصٌ. قَالَ: فَتَبَسَّمَ أَبُو جَعْفَرٍ وَصَوَّى إِلَيَّ، فَقَالَ: أَنَا وَاللَّهِ مِفْلَاصٌ، كَانَ أَبِي يُسَمِّيَنِي وَأَنَا صَغِيرٌ" مِفْلَاصًا "فَاخْتِطَّ مَوْضِعَ مَدِينَةِ أَبِي جَعْفَرٍ، وَتَحَوَّلَ أَبُو جَعْفَرٍ مِنَ الْهَاشِمِيَّةِ إِلَى بَغْدَادَ، وَأَمَرَ بِبِنَائِهَا ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْكُوفَةِ فِي سَنَةِ أَرْبَعٍ وَأَرْبَعِينَ وَمِائَةٍ، وَقَرَعَ مِنْ بِنَائِهَا وَنَزَلَهَا مَعَ جُنْدِهِ وَسَمَّاهَا "مَدِينَةَ السَّلَامِ" سَنَةَ ثَمَانِينَ وَأَرْبَعِينَ وَمِائَةٍ، وَقَرَعَ مِنْ بِنَاءِ الرِّصَافَةِ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَثَمَانِينَ وَمِائَةٍ. وَقَالَ سَلِيمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ: الَّذِي تَوَلَّى الْوُفُوفَ عَلَى حِطِّ بَغْدَادِ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ. وَكَذَلِكَ "سَامَرًا" بَنَاهَا الْمُتَوَكِّلُ. وَكَذَلِكَ "الْمُهَدِيَّةُ" الَّتِي بِالْمَغْرِبِ، وَغَيْرُهَا مِنَ الْأَمْصَارِ الَّتِي مَصَّرَهَا الْمُسْلِمُونَ. فَهَذِهِ الْبِلَادُ صَافِيَةٌ لِلْإِمَامِ إِنْ أَرَادَ الْإِمَامُ أَنْ يَقَرَّ أَهْلَ الدِّمَةِ فِيهَا بِبَدْلِ الْحِزْبِ جَارًا، فَلَوْ أَقْرَهُمُ الْإِمَامُ عَلَى أَنْ يُجِدُوا فِيهَا بَيْعَةً أَوْ كَيْبَسَةً أَوْ يُظْهِرُوا فِيهَا حَمْرًا أَوْ خَنْزِيرًا أَوْ نَافُوسًا لَمْ يُجْزَ، وَإِنْ شَرَطَ ذَلِكَ وَعَقَدَ عَلَيْهِ الدِّمَةَ كَانَ الْعَقْدُ وَالشَّرْطُ قَاسِدًا، وَهُوَ اتِّفَاقٌ مِنَ الْأُمَّةِ لَا يُعْلَمُ بَيْنَهُمْ فِيهِ نِزَاحٌ.</p>
4.	Dalil atas Implikasi status kenegeraan	<p>المغني لابن قدامة (٣٥٤ / ٩) فَضَّلَ: أَمْصَارُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ؛ أَحَدُهَا، مَا مَصَّرَهُ الْمُسْلِمُونَ، كَالْبَصْرَةِ وَالْكُوفَةِ وَبَغْدَادَ وَوَأَسِطَ، فَلَا يُجُوزُ فِيهِ إِحْدَاثُ كَيْبَسَةٍ وَلَا بَيْعَةٍ وَلَا مَجْتَمَعٍ لِصَلَاتِهِمْ، وَلَا يُجُوزُ ضَلْحُهُمْ عَلَى ذَلِكَ، بِدَلِيلِ مَا رَوَى عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَيْمًا مِصْرٍ مَصَّرْتُهُ الْعَرَبُ، فَلَيْسَ لِلْعَجَمِ أَنْ يَبْنُوا فِيهِ بَيْعَةً، وَلَا يَصَّرُوا فِيهِ نَافُوسًا، وَلَا يُشْرَبُوا فِيهِ حَمْرًا، وَلَا يَتَّخِذُوا فِيهِ خَنْزِيرًا.</p>

		<p>رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ، وَاحْتَجَّ بِهِ. وَلِأَنَّ هَذَا الْبَلَدَ مِلْكٌ لِلْمُسْلِمِينَ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَبْنُوا فِيهِ مَجَامِعَ لِلْكُفْرِ. وَمَا وَجِدَ فِي هَذِهِ الْبِلَادِ مِنَ الْبَيْعِ وَالْكَنَائِسِ، مِثْلَ كَنِيسَةِ الرُّومِ فِي بَغْدَادَ، فَهَذِهِ كَانَتْ فِي قُرَى أَهْلِ الدِّمَّةِ، فَأُفِرَّتْ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ. الْقِسْمُ الثَّانِي، مَا فَتَحَهُ الْمُسْلِمُونَ عَنُوَّةَ، فَلَا يَجُوزُ إِحْدَاثُ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فِيهِ؛ لِأَنَّهَا صَارَتْ مِلْكًا لِلْمُسْلِمِينَ، وَمَا كَانَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ فَفِيهِ وَجْهَانِ؛ أَحَدُهُمَا، يَجِبُ هَدْمُهُ، وَتَحْرُمُ تَبْقِيَتُهُ؛ لِأَنَّهَا بِلَادٌ مَمْلُوكَةٌ لِلْمُسْلِمِينَ، فَلَمْ يَجُزْ أَنْ تَكُونَ فِيهَا بَيْعَةٌ، كَالْبِلَادِ الَّتِي اخْتَطَلَهَا الْمُسْلِمُونَ. <u>وَالثَّانِي يَجُوزُ؛ لِأَنَّ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَيُّمَا مِصْرٍ مَصْرَتْهُ الْعَجَمُ، فَفَتَحَهُ اللَّهُ عَلَى الْعَرَبِ، فَزَلُّوهُ، فَإِنَّ لِلْعَجَمِ مَا فِي عَهْدِهِمْ. وَلِأَنَّ الصَّحَابَةَ، - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -، فَتَحُوا كَثِيرًا مِنَ الْبِلَادِ عَنُوَّةَ، فَلَمْ يَهْدِمُوا شَيْئًا مِنَ الْكَنَائِسِ. وَيَشْهَدُ لِصِحَّةِ هَذَا، وَجُودِ الْكَنَائِسِ وَالْبَيْعِ فِي الْبِلَادِ الَّتِي فُتِحَتْ عَنُوَّةَ، وَمَعْلُومٌ أَنَّهَا مَا أَحْدَثَتْ، فَيَلْزَمُ أَنْ تَكُونَ مَوْجُودَةً فَأَبْقِيَتْ. وَقَدْ كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - إِلَى عُمَالِهِ، أَنْ لَا يَهْدِمُوا بَيْعَةً وَلَا كَنِيسَةً وَلَا بَيْتَ نَارٍ. وَلِأَنَّ الْإِجْمَاعَ قَدْ حَصَلَ عَلَى ذَلِكَ، فَإِنَّهَا مَوْجُودَةٌ فِي بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ. الْقِسْمُ الثَّلَاثُ مَا فُتِحَ صُلْحًا، وَهُوَ نَوْعَانِ؛ أَحَدُهُمَا، أَنْ يُصَالِحَهُمْ عَلَى أَنَّ الْأَرْضَ لَهُمْ، وَلَنَا الْحِرَاجُ عَنْهَا، فَلَهُمْ إِحْدَاثُ مَا يَخْتَاجُونَ فِيهَا؛ لِأَنَّ الدَّارَ لَهُمْ وَالثَّانِي أَنْ يُصَالِحَهُمْ عَلَى أَنَّ الدَّارَ لِلْمُسْلِمِينَ، وَيُؤَدُّونَ الْجِزْيَةَ الْبَيْتَا، فَالْحُكْمُ فِي الْبَيْعِ وَالْكَنَائِسِ عَلَى مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الصُّلْحُ مَعَهُمْ، مِنْ إِحْدَاثِ ذَلِكَ، وَعِمَارَتِهِ؛ لِأَنَّهُ إِذَا جَازَ أَنْ يَقَعَ الصُّلْحُ مَعَهُمْ عَلَى أَنَّ الْكُلَّ لَهُمْ، جَازَ أَنْ يُصَالِحُوا عَلَى أَنْ يَكُونَ بَعْضُ الْبِلَدِ لَهُمْ، وَيَكُونَ مَوْضِعُ الْكَنَائِسِ وَالْبَيْعِ مُعَيَّنًا وَالْأُوتَى أَنْ يُصَالِحَهُمْ عَلَى مَا صَالِحَهُمْ عَلَيْهِ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَيَشْتَرِطُ عَلَيْهِمُ الشَّرْطَ الْمَذْكُورَةَ فِي كِتَابِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَنَمٍ، أَنْ لَا يُجَدِّثُوا بَيْعَةً، وَلَا كَنِيسَةً، وَلَا صَوْمَعَةً رَاهِبٍ، وَلَا قَلَابَةَ. وَإِنْ وَقَعَ الصُّلْحُ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ، مُحِلٌّ عَلَى مَا وَقَعَ عَلَيْهِ صُلْحُ عُمَرَ، وَأُخِذُوا بِشُرُوطِهِ. فَأَمَّا الَّذِينَ صَالِحَهُمْ عُمَرُ، وَعَقَدَ مَعَهُمُ الدِّمَّةَ، فَهُمْ عَلَى مَا فِي كِتَابِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَنَمٍ، مَا حُودُونَ بِشُرُوطِهِ كُلِّهَا وَمَا وَجِدَ فِي بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْكَنَائِسِ وَالْبَيْعِ، فَهِيَ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي زَمَنِ فَاتِحِيهَا وَمَنْ بَعْدَهُمْ، وَكُلُّ مَوْضِعٍ قُلْنَا: يَجُوزُ إِقْرَارُهَا. لَمْ يَجُزْ هَدْمُهَا، وَلَهُمْ رَمُّ مَا تَشَعَّتْ مِنْهَا، وَإِصْلَاحُهَا؛ لِأَنَّ الْمَنْعَ مِنْ ذَلِكَ يُفْضِي إِلَى خَرَابِهَا وَذَهَابِهَا، فَجَرَى تَجْرَى هَدْمِهَا. وَإِنْ وَقَعَتْ كُلُّهَا، لَمْ يَجُزْ</u></p>
5.	Sikap atas rumah ibadah yang sudah ada	<p>كشاف القناع عن متن الإقناع (١٣٣/٣) (وَلَا يَجِبُ هَدْمُ مَا كَانَ مَوْجُودًا مِنْهَا) أَي: مِنَ الْبَيْعِ وَالْكَنَائِسِ وَنَحْوِهَا (وَقُتِ فَتُح) الْأَرْضُ الَّتِي هِيَ بِهَا (وَلَوْ كَانَ) فَتُحَهَا (عَنُوَّةَ) لِمَفْهُومِ خَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ السَّابِقِ وَغَيْرِهِ.</p>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ahmad Hidhir Adib

Tempat Tanggal Lahir : Pasuruan, 4 Desember 2001

Alamat : Wisma Ma'had Aly UIN Malang

Email : rdhk6830@gmail.com

Pengalaman Akademik : Mu'allim MSAA & Aktivis LBM-NU Kota Malang

Publikasi : <https://scholar.google.com/citations?user=vwwgqvIAAAAJ&hl=id>

Artikel : Arina.id, Bincang Syariah, Sanad Media dll.

Kompilasi Publikasi : https://linktr.ee/Hidhir_Adib